HIMPUNAN KEPUTUSAN

Munas VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Jakarta, 11-13 Mei 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

HIMPUNAN KEPUTUSAN

Munas VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Jakarta, 11-13 Mei 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Tema

MELALUI MUNAS VI LDII KITA WUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT DAN BERMARTABAT

HIMPUNAN KEPUTUSAN

مؤتمر VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Jakarta, 11-13 Mei 2005

Disusun oleh :

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Saran untuk penyitiran :

DPP LDII. 2005. Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VI LDII).
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta.
274, xi halaman, 17,6 x 25 cm

Copyright © Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 2005

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

ISBN 979-97289-1-6

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan Alhamdulillahirobbil'alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh Subhanahuwata'ala atas segala nikmat, karunia dan hidayah-Nya serta atas izin-Nya Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah berhasil diselenggarakan dan menghasilkan keputusan dan ketetapan, yang merupakan refleksi pemikiran, komitmen dan konsistensi seluruh warga LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menjelang terwujudnya Indonesia baru.

Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 11-13 Mei 2005 telah berhasil melahirkan keputusan penting dan strategis. LDII sebagai institusi dalam pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi, maka keputusan Musyawarah Nasional VI menjadi landasan dan pedoman bagi segenap jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjalankan roda organisasi.

Buku ini memuat keputusan-keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dimaksud sebagai bahan acuan bagi seluruh jajaran internal Lembaga Dakwah Islam Indonesia sehingga seluruh amanat Musyawarah Nasional VI dapat dipahami untuk kemudian dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran pengurus LDII DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, PC dan PAC dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 [lima] tahun ke depan.

Bagi *stake holder* lainnya buku ini dapat berfungsi sebagai bahan kajian dan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia baik sebagai organisasi, strategi dakwahnya termasuk paham keagamaan dan paham kemasyarakatannya,

juga perannya sebagai wahana pendidikan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas yang bersifat mandiri, terbuka, moderat, majemuk dan egaliter guna mewujudkan kebahagiaan hidup berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dunia dan akhirat.

Dalam keputusan Musyawarah Nasional VI tergambar dinamika Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berupaya turut serta melakukan penguatan *civil society* [masyarakat madani] melalui pendekatan moral dan kultural sebagai sumbangsih bagi pembangunan sosial kapital guna memberikan peningkatan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Semoga Alloh Subhanahuwata'ala senantiasa memberi perlindungan, pertolongan, kekuatan serta hidayah-Nya kepada kita semua, Amiin

Jakarta, 20 Mei 2005
Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua Umum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix

KEPUTUSAN MUNAS VI LDII TAHUN 2005

1. **Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005** 01
tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

2. **Nomor KEP-02/MUNAS VI LDII/2005** 25
tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 – 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

3. **Nomor KEP-03/MUNAS VI LDII/2005** . 35
tentang Penerimaan dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2005

4. **Nomor KEP-04/MUNAS VI LDII/2005** 55
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia

5. **Nomor KEP-05/MUNAS VI LDII/2005** 109
tentang Rencana Strateji Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2005 - 2010

6. **Nomor KEP-06/MUNAS VI LDII/2005** 157
tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

7. **Nomor KEP-07/MUNAS VI LDII/2005** 169
tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

8. **Keputusan Formatur** 175
tentang Pengesahan Susunan Dewan Penasihat Tingkat Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1. **Nomor KEP-001/DPP LDII/V/2005** 181
tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 – 2010

2. **Nomor KEP-074/DPP LDII/II/2005** 193
tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005

3. **Nomor KEP-075/DPP LDII/II/2005** 197
tentang Komposisi Personalia Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SAMBUTAN

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LDII 205
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc

Ketua DPR RI 211
H.R. Agung Laksono

PENGARAHAN

Ketua Komisi II DPR RI 217
Drs. Ferry Mursyidan Baldan

Menteri Dalam Negeri RI 225
Letjen TNI (Purn) Moch. Ma'ruf, SE

Jaksa Agung RI 233
Abdul Rahman Saleh, SH, MH.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 241
DR. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H. LLM

Ketua PB Nadhatul Ulama 245
DR Ir. H. Andi Jamaro, M.Sc

Guru Besar Filsafat dan Direktur Program Pasca Sarjana 249
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Prof. DR. Komaruddin Hidayat

Wakil Rektor Universitas Paramadina 255
DR. Yudi Latif

LAIN-LAIN

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN dari Mabes POLRI 263

Doa Penutupan MUNAS VI LDII Tahun 2005 265

Foto Galeri MUNAS VI LDII Tahun 2005 269

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-01/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DAN JADWAL ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 11 - 13 Mei 2005;

b. bahwa untuk mencapai hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana

dimaksud pada butir a di atas perlu adanya Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara

c. bahwa Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor 03/MUNAS-V/LDII/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP- LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 11 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAN JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan selama Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
selaku
PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
L D I I

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **HR. Sunaryo Siswowardoyo,SH,MM.**

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-01/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 11 Mei 2005

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

a. **Alat-alat Kelengkapan MUNAS VI** terdiri atas Pimpinan MUNAS VI, Komisi dan Formatur sebagai sarana atau lembaga yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan MUNAS VI, yang pembentukannya melalui Rapat Paripurna ;

b. **Dewan Pimpinan Daerah** adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota;

c. **Dewan Pimpinan Pusat** adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

d. **MUNAS VI** adalah Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Anggaran Dasar dan Pasal 27 ayat [1] Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang berlangsung tanggal 11 - 13 Mei 2005 di Jakarta ;

e. **Organisasi** adalah organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

f. **Penasihat** adalah Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

g. **Peninjau** adalah peninjau MUNAS VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP LDII/II/2005 ;

h. **Peserta** adalah peserta MUNAS VI sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat [1] Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP LDII/II/2005 ;

i. **Rapat Komisi** adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta dari Komisi yang bersangkutan ;

j. **Rapat Paripurna** adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta ;

k. **Rapat Pimpinan MUNAS VI** adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan MUNAS VI.

BAB II
LANDASAN DAN DASAR

Pasal 2

Landasan dan dasar penyelenggaraan MUNAS VI adalah :

1. Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 19 dan 20, bahwa bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat Organisasi dan Musyawarah ;
2. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 27 ayat [1], bahwa Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 [lima] tahun sekali, dan penyelenggaraannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan MUNAS VI dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 15 Februari 2005 mengenai penyelenggaraan MUNAS VI.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

[1] MUNAS VI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, serta Peraturan Tata Tertib ini ;

[2] MUNAS VI diselenggarakan untuk :

[a] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[b] menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[c] menetapkan Program Umum / Rencana Strateji Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

[d] merumuskan sikap Organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan ;

[e] memilih Ketua Umum, Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[f] menetapkan Formatur MUNAS VI ;

[g] menetapkan keputusan-keputusan.

BAB IV
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 4

[1] MUNAS VI dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan ;

[2] Peserta MUNAS VI terdiri atas :

[a] Dewan Penasihat ;
[b] Dewan Pimpinan Pusat ;
[c] unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, masing-masing ditetapkan sebanyak 3 [tiga] orang ;
[d] unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, masing-masing ditetapkan sebanyak 2 [dua] orang ;

[3] Peninjau MUNAS VI terdiri atas :

[a]. unsur Badan dan/atau Lembaga, dan Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, masing-masing ditetapkan sebanyak 1 [satu] orang ;
[b]. perseorangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[4] Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk mengikuti MUNAS VI, terdiri atas :

[a] para pengamat, dari dalam dan luar negeri ;
[b] undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 5

[1] Setiap Peserta dari tingkat Pusat wajib membawa surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[2] Setiap Peserta dari unsur Dewan Pimpinan Daerah wajib membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing ;

[3] Setiap Peninjau dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat [3] Peraturan Tata Tertib ini wajib membawa surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah ;

[4] Setiap undangan wajib membawa surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

[5] Jumlah Peserta, Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 6

[1] Peserta mempunyai :
[a] hak bicara ;
[b] hak suara, yang pengaturannya adalah sebagai berikut :

[i] Dewan Penasihat Tingkat Pusat, 1 [satu] suara ;
[ii] Dewan Pimpinan Pusat, 1 [satu] suara ;
[iii] Unsur Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, masing-masing 1 [satu] suara ;
[iv] unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, masing-masing 1 [satu] suara ;

[2] Peninjau hanya mempunyai hak bicara ;

[3] Undangan tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.

Pasal 7

Peserta berhak mengajukan usul perubahan terhadap rancangan materi MUNAS VI yang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ; Pokok-pokok usulan perubahan dapat dikemukakan dalam Rapat Paripurna atau Rapat Komisi.

Pasal 8

[1] Peserta dan Peninjau berhak mengajukan pendapat, saran dan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat ;

[2] Pendapat, saran dan tanggapan yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan / ditujukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 9

Pemandangan umum disampaikan dalam Rapat Paripurna oleh masing-masing unsur Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.

Pasal 10

[1] Setiap Peserta dan Peninjau berkewajiban untuk :

[a] mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini ;

[b] menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini ;

[2] Peserta, Peninjau dan Undangan wajib memelihara kelancaran dan ketertiban MUNAS VI.

BAB VI

ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUNAS VI

Pasal 11

U M U M

Alat-alat kelengkapan MUNAS VI adalah :

a. Pimpinan MUNAS VI ;
b. Komisi-komisi ; dan
c. Formatur.

Pasal 12

PIMPINAN

[1] Pimpinan MUNAS VI dipilih dari dan oleh Peserta ;

[2] Sebelum Pimpinan MUNAS VI sebagaimana dimaksud pada ayat [1] terpilih, MUNAS VI dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang bertindak sebagai Pimpinan Sementara ;

[3] Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin Rapat Paripurna untuk:

[a] menetapkan jadwal acara dan Peraturan Tata Tertib MUNAS VI ;
[b] memilih Pimpinan MUNAS VI ;

[4] Pimpinan MUNAS VI merupakan satu-kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri atas :

[a] 1 [satu] orang dari Dewan Pimpinan Pusat ;
[b] 6 [enam] orang, yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, yang terdiri atas :

[i] 1 [satu] orang wakil dari wilayah Sumatera ;
[ii] 1 [satu] orang wakil dari wilayah Jawa ;
[iii] 1 [satu] orang wakil dari wilayah Kalimantan ;
[iv] 1 [satu] orang wakil dari wilayah Sulawesi ;
[v] 1 [satu] orang wakil dari wilayàh Bali dan Nusa Tenggara;
[vi] 1 [satu] orang wakil dari wilayah Maluku dan Papua ;

[5] Pimpinan MUNAS VI dari unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mengusulkan nama-nama calon anggota Pimpinan MUNAS VI kepada pimpinan sementara ;

[6] Pimpinan sementara mengumumkan nama-nama calon anggota pimpinan MUNAS VI sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat [4] dan [5] dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Pimpinan MUNAS VI ;

[7] Komposisi Pimpinan MUNAS VI terdiri atas :

[a] 1 [satu] orang Ketua merangkap Anggota ;
[b] 1 [satu] orang Sekretaris merangkap Anggota ;
[c] 5 [lima] orang Anggota ;

[8] Pembagian tugas di antara unsur Pimpinan MUNAS VI ditetapkan oleh Pimpinan MUNAS VI.

Pasal 13

[1] Wewenang Pimpinan MUNAS VI adalah :

[a] memimpin Rapat Paripurna dan rapat Pimpinan MUNAS VI ;
[b] menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS VI ;

[2] Pimpinan MUNAS VI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia MUNAS VI.

Pasal 14

K O M I S I

[1] Komisi MUNAS VI terdiri atas :

Komisi A : bidang Organisasi ;
Komisi B : bidang Program Umum / Rencana Strateji ;
Komisi C : bidang Pertanggungjawaban ;
Komisi D : bidang Pernyataan MUNAS VI ;

[2] Bila dipandang perlu, Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dapat membentuk sub Komisi.

Pasal 15

[1] Setiap Peserta dan Peninjau wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan MUNAS VI ;

[2] Keanggotaan Komisi ditetapkan berdasarkan permintaan Peserta dan Peninjau, dengan perimbangan yang diatur oleh Panitia MUNAS VI.

Pasal 16

[1] Komposisi Pimpinan Komisi terdiri atas :

[a] 1 [satu] orang Ketua merangkap Anggota ;
[b] 1 [satu] orang Sekretaris merangkap Anggota ;
[c] 3 [tiga] orang Anggota ;

[2] Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Peserta dalam Rapat Komisi ;

[3] Sebelum Pimpinan Komisi terpilih, maka Pimpinan MUNAS VI menjadi Pimpinan Sementara Komisi ;

[4] Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Komisi diatur secara musyawarah ;

[5] Pimpinan Komisi merupakan satu-kesatuan yang bersifat kolektif.

Pasal 17

[1] Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang yang menjadi tugas Komisi yang bersangkutan ;

[2] Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan pendapat, saran dan tanggapan Anggota Komisi ;

[3] Apabila dipandang perlu, Pimpinan Komisi dapat meminta beberapa orang Anggota Komisi untuk membantu menyusun laporan tersebut.

Pasal 18

Komisi memberikan laporan kepada Rapat Paripurna mengenai hasil kerjanya untuk disahkan sebagai keputusan MUNAS VI.

Pasal 19

[1] Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dibantu oleh Panitia MUNAS VI;

[2] Pembicaraan dalam Rapat Komisi disusun dalam risalah rapat.

Pasal 20
FORMATUR

Pembentukan Formatur MUNAS VI, tugas dan kewenangannya akan diatur tersendiri dalam keputusan MUNAS VI.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

[1] Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 1998 - 2005 menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Paripurna ;

[2] Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh Peserta melalui pemandangan umum dalam Rapat Paripurna ;

[3] Setelah melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2], laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 1998 - 2005 akan dibahas dalam Rapat Komisi yang dibentuk khusus untuk itu, dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna MUNAS VI guna memperoleh pengesahan atas penerimaan laporan dimaksud.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT DAN QUORUM

Pasal 22

Jenis rapat-rapat adalah :

a. Rapat Paripurna ;
b. Rapat Pimpinan MUNAS VI ;
c. Rapat Komisi.

Pasal 23

[1] Setiap rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 [setengah] jumlah Peserta ;

[2] Rapat Paripurna untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan untuk memilih pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari jumlah Peserta.

Pasal 24

[1] Sebelum menghadiri rapat, setiap Peserta dan Peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kartu hadir, atau memperlihatkan tanda Peserta atau Peninjau kepada Panitia MUNAS VI;

[2] Tepat pada waktu yang ditentukan, ketua rapat membuka rapat ;

[3] Setelah dibuka, apabila belum mencapai quorum, maka ketua rapat bertindak sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 25

[1] Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Tata Tertib ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 1[satu] jam;

[2] Apabila rapat telah ditunda selama 1 [satu] jam sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat [1] dan quorum belum tercapai juga, maka rapat ditunda kembali paling lama 1 [satu] jam ;

[3] Apabila setelah melalui 2 [dua] kali penundaan dan quorum belum tercapai juga, maka ketua rapat dapat meneruskan rapat dan rapat dinyatakan sah.

Pasal 26

[1] Setelah rapat dinyatakan telah memenuhi quorum atau sah, Pimpinan rapat menjelaskan secara singkat pokok acara rapat dan masalahnya;

[2] Pimpinan rapat memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap Peserta dan Peninjau MUNAS VI untuk berperan serta dalam setiap rapat dengan menggunakan hak dan kewajibannya secara tertib ;

[3] Pimpinan rapat dapat menentukan urutan dan lamanya Peserta dan Peninjau MUNAS VI untuk berbicara ;

[4] Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan, dan meminta agar yang bersangkutan kembali kepada pokok pembicaraan semula ;

[5] Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku Peserta, maka untuk sementara fungsi ketua diserahkan kepada salah satu anggota Pimpinan rapat.

Pasal 27

[1] Pimpinan rapat mencatat pendapat dan/atau usul yang diajukan oleh Peserta dan Peninjau MUNAS VI ;

[2] Apabila pimpinan rapat menganggap bahwa pendapat Peserta dan/atau Peninjau MUNAS VI belum jelas, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengulanginya dengan singkat dan jelas ;

[3] Pimpinan rapat mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat yang diajukan dalam rapat.

Pasal 28

Peserta dan Peninjau MUNAS VI dapat berbicara dalam Rapat Paripurna, dan Rapat Komisi ;

Pimpinan rapat mendaftar dan mengatur Peserta dan Peninjau MUNAS VI yang akan berbicara ;

Peserta dan Peninjau MUNAS VI dapat berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat, dan selama berbicara yang bersangkutan tidak boleh diganggu.

Pasal 29

[1] Peserta dan Peninjau dapat mengadakan interupsi untuk :

[a] meminta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan ;
[b] mengajukan usul tentang tata cara pembahasan materi mengenai hal yang sedang dibicarakan ;
[c] menjelaskan hal yang menyangkut pembicaraan mengenai dirinya;

[2] Interupsi tidak boleh melebihi waktu 3 [tiga] menit dan terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf [a] dan [c] Pasal ini tidak diadakan perdebatan.

Pasal 30

Apabila Peserta dan Peninjau dalam menggunakan hak bicara melanggar Peraturan Tata Tertib ini, maka Pimpinan rapat akan melakukan tindakan sebagai berikut :

a. memberikan peringatan ;
b. membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruhnya ; atau
c. memerintahkan untuk meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 31

Apabila dianggap perlu, Pimpinan rapat dapat menunda rapat dengan persetujuan Peserta yang hadir ;
Lamanya penundaan rapat tidak boleh lebih dari 1 [satu] jam.

Pasal 32

[1] Rapat-rapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh Pimpinan rapat ;

[2] Materi pembicaraan dalam rapat tertutup hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan rapat atau Panitia pengarah MUNAS VI ;

[3] Atas usul Pimpinan rapat atau Peserta, rapat dapat memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia ;

[4] Rahasia sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat [3] harus dipegang teguh oleh semua Peserta.

Pasal 33

Setiap rapat dibuat risalah lengkap yang antara lain memuat :

a. tempat, jenis dan acara rapat ;
b. hari, tanggal rapat dan jam permulaan, serta penutupan rapat ;
c. nama ketua dan sekretaris rapat ;
d. nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir ;
e. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing ;
f. keterangan-keterangan tentang keputusan dan/atau kesimpulan rapat.

BAB IX
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

[1] Pengambilan keputusan diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ;

[2] Setelah musyawarah untuk mencapai mufakat yang diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak berhasil, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara ;

[3] Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 [setengah] jumlah Peserta yang hadir, kecuali keputusan untuk mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta untuk pemilihan pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;

[4] Pengambilan keputusan mengenai perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari jumlah Peserta yang hadir.

Pasal 35

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan penuh tanggung jawab.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 36

Materi MUNAS VI disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

[1] Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS VI ;

[2] Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Selaku

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
L D I I

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc. **HR. Sunaryo Siswowardoyo, SH, MM**

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-01/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 11 Mei 2005

JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Hotel Millennium, 11 - 13 Mei 2005

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	Moderator / Pendamping
Rabu, 11 Mei 2005	08.00 -08.30	Registrasi Peserta	Panitia Pelaksana
	08.30 -09.00	Pengumuman dari Panitia Pengarah	H. R. Sunaryo Siswowardoyo, SH. MM.
	09.00-10.00	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : DR. Yuddy Chrisnadi, ME Komisi I DPR-RI "Peran serta masyarakat dalam bela negara serta upaya kemandirian pertahanan"	H. Achmad Kuntjoro, SE. MBA.
	10.00-11.30	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : Drs. Ferry Mursyidan Baldan Ketua Komisi II DPR RI "Otonomi Daerah dan Pilkada"	Drs. H. Bambang Sukamto, SE. MM.
	11.30-12.00	Rehat Kopi	
	12.00-13.00	**PEMBUKAAN MUNAS VI LDII** - Lagu Indonesia Raya - Mengheningkan Cipta - Pembacaan Kalam Ilahi - Laporan Ketua Panitia Pelaksana - Sambutan Ketua Umum DPP LDII - Sambutan Ketua DPR RI sekaligus secara resmi MUNAS LDII VI dibuka - Pembacaan Doa - Penutup	
	13.00-13.30	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : H.R. Agung Laksono Ketua DPR RI "Peran Ormas dalam penegakkan nilai-nilai Demokrasi"	H.M. Soehartono Rijadi, MBA
	13.30-14.30	Istirahat, Sholat dan Makan	
	14.30-15.15	Tata Tertib Jadwal Acara Pemilihan Pimpinan MUNAS VI	Ir. H. Teddy Suratmadji, MSc.

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	Moderator / Pendamping
Rabu, 11 Mei 2005	15.15 -16.00	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : Abdul Rahman Saleh, SH, MH. Jaksa Agung "Pendekatan kultural dalam upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan KKN"	H.R. Sunaryo Siswowardoyo SH, MM. H. Achmad Alfurqon, SH, MM.
	16.00-17.30	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : Letjen TNI [Purn] Moch. Ma'ruf, SE. Menteri dalam Negeri "Peran Ormas Islam dalam menguatkan otonomi daerah yang berbasis NKRI"	Ir. H. P. Sunaryo, M.Si Drs. H. Bambang Sukamto, SE, MM.
	17.30-19.00	Istirahat, Sholat dan Makan	
	19.00-20.00	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : Prof. DR. H. Komaruddin Hidayat Guru Besar Filsafat dan Direktur Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah "Bagaimana menghadapi Globalisasi"	Ir. H. P. Sunaryo, M.Si
	20.00 -21.45	**RAPAT PARIPURNA I** Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara MUNAS VI LDII Pemilihan Pimpinan MUNAS VI LDII	H.R. Sunaryo Siswowardoyo SH, MM.
Kamis, 12 Mei 2005	08.30-09.00	**RAPAT PARIPURNA II** Pengesahan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum DPP LDII masa Bakti 2005-2010 dan Pembentukan Tim Formatur	Ir. H. Chriswanto Santoso, MSc
	09.00-10.15	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : DR. Yudi Latif Wakil Rektor Universitas Paramadina "Sejarah Pergerakan Islam di Indonesia"	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA
	10.15-10.30	Rehat Kopi	
	10.30-12.00	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : DR. Abdul Hakim G Nusantara, SH Ketua Komnas HAM "Ketertinggalan pembaruan hukum ditengah perkembangan Demokrasi"	H.R. Sunaryo Siswowardoyo

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	Moderator / Pendamping
Kamis, 12 Mei 2005	12.30 -14.00	**PEMBEKALAN MATERI** Oleh : DR. IR. H. Andi Jamaro, MSc Ketua PBNU "Peran ormas dalam pengembangan *Civil Society*"	Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc
	14.00-15.30	Istirahat, Sholat dan Makan	
	15.30-16.00	**RAPAT PARIPURNA III** Penyampaian Pertanggungjawaban DPP LDII Masa Bakti 1998-2005	H.R. Sunaryo Siswowardoyo SH, MM.
	16.00-17.00	**RAPAT PARIPURNA IV** Pandangan Umum Peserta MUNAS VI LDII Tanggapan DPP LDII atas Pandangan Umum Peserta MUNAS VI LDII	Pimpinan Sidang
	17.00-18.30	Istirahat, Sholat dan Makan	
	18.30 -19.30	**RAPAT PARIPURNA V** Penjelasan MUNAS VI LDII Pembentukan Komisi-Komisi - Komisi A : AD /ART - Komisi B : Program/Rencana Strateji - Komisi C : Rekomendasi - Komisi D : Pertanggungjawaban	*Steering Comitee*
	19.30-22.00	**SIDANG-SIDANG KOMISI**	
Jumat, 13 Mei 2005	08.30-09.30	**RAPAT PARIPURNA VI** Laporan Sidang Komisi Pembacaan dan Pengesahan Keputusan-Keputusan MUNAS VI LDII	Pimpinan Sidang
	09.30-10.00	**RAPAT PARIPURNA VII** Pemilihan Ketua Umum LDII masa Bakti 2005-2010 secara langsung Pemilihan Tim Formatur	Pimpinan Sidang

Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan	Moderator / Pendamping
Jumat, 13 Mei 2005	10.00-11.30	**RAPAT PARIPURNA VIII** Pembacaan dan pengesahan Keputusan MUNAS VI LDII mengenai Ketua Umum DPP LDII terpilih Masa Bakti 2005-2010 dan Tim Formatur Pernyataan Demisioner DPP LDII Masa Bakti 1998-2005 Penyerahan Panji-panji LDII **RAPAT FORMATUR** **RAPAT PARIPURNA IX** Pembacaan keputusan Tim Formatur mengenai susunan Pengurus Harian DPP LDII Masa Bakti 2005-2010	Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang
	11.30-14.30	Istirahat, Sholat dan Makan	
	14.30-15.30	**UPACARA PENUTUPAN** - Pembukaan - Laporan Ketua Panitia - Pembacaan Pernyataan dan Rekomendasi MUNAS VI LDII - Pidato Ketua Umum Terpilih - Sambutan Ketua Umum Terpilih sekaligus menutup secara resmi MUNAS VI LDII - Pembacaan Doa - Penutup	Peserta, Peninjau dan Undangan

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-02/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 – 2010 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 11 - 13 Mei 2005 ;

b. bahwa Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan sarana mewujudkan demokratisasi dalam menentukan kepengurusan Organisasi, yaitu dengan melakukan pemilihan secara langsung Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

c. bahwa guna melakukan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada butir b di atas diperlukan adanya Peraturan Tata Tertib dan Tata cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

d. bahwa Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir c di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor 03/MUNAS-V/LDII/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004

tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP- LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 11 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia [selanjutnya disebut "Tata Tertib Pemilihan Langsung"] secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Tata Tertib Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara langsung, serta

membentuk Formatur yang akan bertugas menyusun dan menentukan komposisi personil Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-02/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 12 Mei 2005

PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[1] MUNAS VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia berketetapan untuk melakukan pemilihan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat guna membangun soliditas bagi penggerak utama Organisasi agar tercapai tujuan secara optimal ;

[2] Seluruh ketentuan Tata Tertib MUNAS VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005 berlaku pula dalam proses pemilihan langsung Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini ;

[3] Istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Tata Tertib ini memiliki arti dan maksud yang sama dengan istilah-istilah yang terdapat dalam Tata Tertib MUNAS VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 2

[1] Pemilihan calon Ketua Umum dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia ;

[2] Pemilihan calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat [1] dilakukan melalui 2 [dua] tahap, kecuali dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 3

[1] Setiap calon Ketua Umum dianggap sah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

[a] berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[b] tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 [lima] tahun ;

[c] bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[d] terpilih melalui MUNAS VI ;

[e] berperan aktif dan mengabdi pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia sedikitnya selama 5 [lima] tahun berturut-turut ;

[f] pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Propinsi selama 1 [satu] periode ;

[g] memperoleh dukungan dalam MUNAS VI sedikitnya oleh 30 % [tiga puluh persen] suara ;

[2] Nama calon Ketua Umum disampaikan secara tertulis oleh calon atau perwakilan yang bersangkutan, dengan melampirkan pernyataan kesediaan yang bersangkutan dan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat [1] kepada Pimpinan MUNAS VI, untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh Pimpinan MUNAS VI dan dibantu oleh Panitia MUNAS VI ;

[3] Pimpinan MUNAS VI mengumumkan calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat [2] ;

[4] Masing-masing Peserta yang memiliki hak suara dapat memberikan dukungan kepada 1 [satu] calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat [3] dengan mengisi surat dukungan yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 4

[1] Calon Ketua Umum yang diumumkan oleh Pimpinan MUNAS VI telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini, akan masuk dalam pemilihan tahap I ;

[2] Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan lebih dari 30 % [tiga puluh persen] suara pada pemilihan tahap I, selanjutnya akan masuk dalam pemilihan tahap II ;

[3] Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap II akan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai Ketua Umum terpilih.

Pasal 5

Apabila :

[a] dalam proses verifikasi hingga pengumuman oleh Pimpinan MUNAS VI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat [2] dan [3] Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 [satu] calon Ketua Umum ; atau

[b] dalam pelaksanaan pemilihan tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat [2] Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 [satu] calon

Ketua Umum yang memperoleh dukungan lebih dari 30 % [tiga puluh persen] suara maka calon tersebut langsung dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih dalam Rapat Paripurna tanpa harus melalui pemilihan.

BAB III
PEMBENTUKAN FORMATUR

Pasal 6

[1] Formatur MUNAS VI dipilih dalam Rapat Paripurna ;

[2] Ketua Umum terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur, dibantu oleh 4 [empat] orang sebagai Anggota Formatur ;

[3] Calon Anggota Formatur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat [2] diusulkan sebanyak 4 [empat] orang yang terdiri dari 3 [tiga] orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan 1 [satu] orang dari peserta MUNAS dari kalangan tokoh senior dilingkungan LDII, dari unsur DPD yaitu:

[a] 1 [satu] orang mewakili kawasan Indonesia bagian Barat ;
[b] 1 [satu] orang mewakili kawasan Indonesia bagian Tengah ;
[c] 1 [satu] orang mewakili kawasan Indonesia bagian Timur ;

disampaikan kepada Pimpinan MUNAS VI untuk dimusyawarahkan dan dipilih ;

[4] Ketua Formatur beserta 4 [empat] orang Anggota Formatur MUNAS VI disahkan menjadi Formatur MUNAS VI dalam Rapat Paripurna.

[5] Formatur MUNAS VI diberi mandat penuh untuk menentukan komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat Tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 – 2010 ;

[6] Komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat Tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 ditetapkan dalam keputusan Formatur MUNAS VI ;

[7] Formatur menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna.

[8] Dalam hal hingga batas waktu yang ditentukan, Formatur MUNAS VI belum dapat menentukan komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat Tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010, maka untuk sementara waktu hingga dapat dilaksanakannya mandat sebagaimana dimaksud pada ayat [5] Pasal ini, tugas Dewan Pimpinan Pusat dijalankan oleh Formatur.

BAB IV
BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 1998 - 2005

Pasal 7

Segera setelah terpilihnya Formatur MUNAS VI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Tata Tertib ini, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998 - 2005 dinyatakan demisioner oleh Pimpinan MUNAS VI.

BAB V
PERSYARATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 8

[1] Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[a] aktif secara terus-menerus menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia sekurang-kurangnya selama 5 [lima] tahun ;

[b] berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[c] tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 [lima] tahun ;

[d] bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[2] Dalam hal khusus, guna kepentingan perjuangan Organisasi, Formatur dapat menetapkan seseorang menjadi Pengurus di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dengan tetap memperhatikan kacakapan, kemampuan dan kesungguhannya sesuai jabatan kepengurusan yang akan dipangkunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

[1] Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS VI.

[2] Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-03/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 1998 - 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pengemban amanat tertinggi organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya ;

b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2005 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Rapat Paripurna III Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

c. bahwa laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2005 sebagaimana dimaksud pada butir b di atas telah mendapat tanggapan dari seluruh peserta Musyawarah Nasional VI dalam acara pemandangan umum peserta, serta telah dibahas dalam Sidang Komisi ;

d. bahwa penerimaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2005 sebagaimana dimaksud pada butir c di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor 03/MUNAS-V/LDII/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor 06/MUNAS-V LDII/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Pemilihan Langsung Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2003 ;

3. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor 07/MUNAS-V LDII/1998 tanggal 24 Oktober 1998 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2003 ;

4. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

5. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

6. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP-LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan : Pemandangan umum peserta yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 11 Mei 2005 dan pembahasan dalam Sidang Komisi pada tanggal 12 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENERIMAAN DAN PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 1998 - 2005.

Pasal 1

Menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 1998 - 2005 yang disampaikan pada Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 11 Mei 2005.

Pasal 2

Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2005 atas segala amal bakti dan pengabdiannya.

Pasal 3

Naskah laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 1998 - 2005 tercantum di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-03/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 13 Mei 2005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PERIODE 1998 – 2005

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ، أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ ، اَمَّا بَعْدُ :

Saudara Pimpinan, Peserta MUNAS VI dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan DPP LDII Periode 1998 – 2005 yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bab 3 : Lingkungan Strategis dan Permasalahan saat ini
Bab 4 : Kesimpulan
Bab 5 : Rekomendasi

Bab I. Pendahuluan

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh Subhanahu Wata'ala dengan kalimat syukur *Alhamdulillahi Robbil Aalamin* dan juga sholawat serta salamnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shollallohu Alaihi Wasallam*, para sohabat para tabiin serta para ulama sebagai *warotsatul anbiya*. Karena perkenan-Nya jualah kita semua diberikan hidayah berupa keimanan, kesehatan, pertolongan, kekuatan dan perlindungan yang tak ternilai, sehingga dengan dasar iman dan taqwa maka kita bisa hadir memenuhi kewajiban penting, melaksanakan, mengikuti dan berinteraksi dalam rangka mengambil keputusan – keputusan pada acara Musyawaroh Nasional VI LDII dengan tema yang telah disepakati bersama yaitu :

"MELALUI MUNAS VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KITA WUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT DAN BERMARTABAT"

Tema ini dipilih melihat pada kenyataan yang ada bahwa Republik Indonesia telah sekian tahun terpuruk akibat dari kelalaian kita semua, tidak menjalankan *Prinsip Nation Building*, Pembangunan Bangsa yang bermartabat mendahulukan kepentingan Nasional ketimbang kepentingan Golongan Ras, Suku & Agama masing-masing.

Budaya bangsa yang pernah dicanangkan oleh para pendahulu kita, sudah memuat prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu keterbukaan [*transparance*] adil [*fairness*], bertanggungjawab [*responsibility*], *Accountability* yaitu terukur profesional dalam melaksanakan hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab serta mandiri [*independence*] dalam mengambil sikap berpendirian serta mengambil keputusan.

Perubahan yang cepat baik politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dipacu dengan perkembangan iptek di satu sisi, dan di sisi lain prinsip – prinsip *good governance* terlalaikan mengakibatkan Indonesia mengalami krisis multi dimensi.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, sesuai dengan jadwal acara MUNAS yang telah ditetapkan adalah saatnya Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini Sesuai dengan Bab IV, Pasal 16 ayat [1] Anggaran Rumah Tangga LDII, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkewajiban memimpin dan menyelenggarakan organisasi tingkat nasional

serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional, dalam hal ini Munas VI LDII.

Para Peserta Musyawarah Nasional yang kami hormati,

Sejak Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dipilih dan dilantik pada MUNAS V tahun 1998, kami sepenuhnya menyadari betapa beratnya tugas mulia yang kami emban. Tugas mulia tersebut bukan saja merupakan kehormatan dan kepercayaan, akan tetapi sekaligus merupakan tumpuan harapan segenap warga LDII. Oleh karena itu kami menyadari sebagai manusia yang penuh kekurangan dan keterbatasan, maka pertanyaan kami pada waktu itu adalah : Mampukah kami melaksanakan tugas yang teramat luhur ini ? Tentu saja pada saat itu kami hanya bisa menjawab : Insya Alloh. Namun kemudian pertanyaan itulah yang menjadi motivasi dan sekaligus merupakan tantangan bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk selalu berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Waktu berjalan terus seiring dengan tugas demi tugas yang kami laksanakan. Hambatan dan keberhasilan silih berganti mewarnai kehidupan organisasi. Tanpa terasa masa bakti 1998 – 2005 telah kami lampaui dengan selamat. Dan Alhamdulillah MUNAS VI dapat dilaksanakan.

Dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati yang didorong oleh rasa tanggungjawab, kami sampaikan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dengan harapan semoga dapat kiranya pertanggungjawaban ini memenuhi harapan kita semua.

Disamping itu, pertanggungjawaban ini dapat kiranya digunakan sebagai bahan masukan bagi MUNAS VI, untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja DPP. LDII periode 1998 – 2005 dalam mengemban amanat organisasi, sekaligus sebagai umpan balik [*feed back*] terhadap segala keputusan yang akan diambil oleh MUNAS VI, untuk menyusun program organisasi dan penyempurnaan tata laksananya di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban ini merupakan rangkuman dari berbagai kegiatan selama masa bakti 1998 – 2005, atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia oleh MUNAS V tahun 1998.

Pertanggungjawaban ini disajikan dalam bentuk laporan kemajuan [*progress*

report] secara kualitatif maupun kuantitatif yang disusun secara konseptual berpijak pada program umum LDII sebagaimana yang diamanatkan oleh keputusan MUNAS V LDII Nomor 04/MUNAS V/LDII/1998.

Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, peserta Munas yang kami hormati.

LDII sebagai Ormas Islam mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Islami, serta berperan aktif dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan pancasila, yang diridhoi Alloh Subhanahu Wata'ala.

Keputusan MUNAS V LDII Nomor : 04 / MUNAS V / LDII / 1998 telah menetapkan Program Umum LDII sebagai garis besar kebijakan organisasi yang dilanjutkan dengan hasil RAKERNAS LDII di Jakarta tanggal 30 – 31 Oktober 2000 yang menghasilkan prioritas program yang populer disebut dengan CATUR SUKSES LDII, meliputi :

1. Peningkatan Kinerja Organisasi
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pemberdayaan Potensi LDII
4. Penigkatan Peran Serta Sosial Kemasyarakatan

Hadirin dan peserta MUNAS VI yang kami cintai,

Bab II . Pelaksanaan Program Kegiatan

Tidak terasa waktu telah kita lalui bersama, sejak tahun 1998 dimana kita bertemu dan melaksanakan MUNAS V LDII bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, cukup banyak kegiatan LDII yang telah dilaksanakan di dalam rangka mewujudkan CATUR SUKSES LDII.

II.1. Peningkatan Kinerja Organisasi

Peningkatan kinerja organisasi bisa terwujud apabila upaya terus menerus dari seluruh unsur di dalam maupun di luar LDII untuk membangkitkan, memotivasi, mendorong, memperkuat, mendayagunakan [mengefisienkan] dan menghasilgunakan [mengefektifkan] LDII dari mulai DPP sampai ke DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, bahkan PC dan PAC dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan yang telah dicanangkan.

Kegiatan nyata dalam Peningkatan Kinerja Organisasi LDII meliputi :

1. Pelaksanaan RAKERNAS DPP LDII pada tanggal 30 – 31 Oktober 2000 di Jakarta.

2. Pelaksanaan RAPIMNAS DPP LDII tanggal 26 – 27 Mei 2004 di Jakarta.

3. Pelaksanaan RAKERDA di 22 Provinsi di seluruh Indonesia [70%] dalam rangka menyusun Prioritas Rencana Kegiatan yang mengacu kepada Prioritas Program.

4. Dalam rangka menyikapi perubahan dan dinamika politik di tanah air terutama pemilu legislatif [Mei 2004] dan PILPRES tahap 1 dan 2 [Juni dan September 2004], LDII telah proaktif mengadakan pertemuan – pertemuan untuk memberikan kontribusi dalam Reformasi kehidupan berpolitik antara lain telah melakukan sarasehan dan silaturrohim nasional [24 – 25 Mei 2004].

5. Selama periode Kepengurusan 1998 - 2005, seluruh jajaran Ketua dan Sekretaris serta Dewan Penasehat telah melakukan 24 kali konsolidasi dan pembinaan organisasi keseluruh Indonesia dengan berbagai materi yang dikaitkan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat antara lain :

   a. Sosialisasi CATUR SUKSES LDII
   b. Metode Komunikasi efektif & Kinerja Organisasi
   c. Kepemimpinan & Manajemen Organisasi
   d. Metode Penyelesaian kasus dalam masyarakat melalui pendekatan moral.
   e. UU. Tentang Keormasan
   f. UU. Tentang Susunan, kedudukan, Lembaga Tinggi Negara
   g. UU. Tentang Partai Politik
   h. UU. Tentang Pemerintahan Daerah.
   i. Koordinasi dengan para pihak [*stakeholders*] antara lain Parpol, Ormas dan LSM lainnya.
   j. UU. Tentang HAM
   k. UU. Tentang Pemilu & Pilpres
   l. UU. Tentang Yayasan

Peningkatan kegiatan Kinerja Organisasi periode 1998 – 2005 ini, dapat dilihat melalui pertumbuhan terbentuknya organisasi pada setiap jenjang

sebagai berikut :

1. Dari 27 menjadi 32 DPD Provinsi [naik 18 %]
2. Dari 245 menjadi 302 DPD Kabupaten/Kota [naik 23 %]
3. Dari 1.462 menjadi 1.637 PC [naik 12 %]
4. Dari 2.942 menjadi 4.500 PAC [naik 53 %]

Dimana jumlah warga LDII diseluruh Nusantara mencapai ± 15 juta jiw

II.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia [SDM]

Kualitas SDM yang tinggi selain membuahkan kualitas hidup yang leb baik dan berdampak *multiplier* baik bagi warga LDII khususnya mau masyarakat sekitar pada umumnya, SDM sebagai sumberdaya pembangu ini, juga mempercepat publikasi positif LDII secara langsung maupun tid langsung.

Kegiatan yang telah dan terus dilakukan dalam rangka meningkatk kualitas SDM LDII adalah sebagai berikut :

1. Penataran Wawasan Kebangsaan bekerjasama dengan DHN 45, Mab ABRI/TNI dan para pelaku sejarah, yang telah menghasilkan 8 [delapa angkatan dimana setiap angkatan 300 orang. Penataran wawasa kebangsaan ini ditindaklanjuti oleh DPD Provinsi dan DP Kabupaten/Kota.

2. Penataran Tenaga Inti Bela Negara Ormas tingkat pusat yan dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan telah diikuti oleh LDI sebanyak 3 [tiga] angkatan.

3. DPP LDII telah mengadakan pelatihan juru dakwah LDII dari seluru Indonesia bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebany 3 [tiga] angkatan dengan jumlah lulusan juru dakwah bersertifik sebanyak 300 orang.

4. Pelatihan Mitra Kamtibmas yang diselenggarakan sebagai kerjasam antara MABES POLRI/Biro Bimmas Deops POLRI, DPP LDII dan DP Forum Komunikasi Mitra Polisi [FORMASI]. Kerjasama pelatihan ini diteruskan pada tingkat DPD LDII Provinsi sebagai perwujudan kerjasam antara POLDA, PEMDA dan DPD LDII Provinsi, seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Lampung.

Hasil pelatihan ini ditindaklanjuti dengan komunikasi aktif antara POLDA, POLRES dan POLSEK di masing – masing daerah dengan Pengurus LDII setempat sehingga timbul sinergi positif berupa Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat.

Ibu-ibu, Bapak-bapak serta hadirin peserta MUNAS VI LDII yang berbahagia

II. 3. Sukses Pemberdayaan Potensi LDII

Pemberdayaan Potensi LDII, pelaksanaannya diupayakan melalui strategi mobilisasi sosial dengan cara menggerakkan dan memberdayakan baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi maupun Sumber Daya Insani, serta memotivasi dan mendorong masyarakat untuk mampu peduli pada dirinya sendiri dan peduli kepada masyarakat sekitarnya dalam segala aspek kehidupan, terutama bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Pemberdayaan potensi LDII merupakan upaya strateji yang diarahkan bagi peningkatan kualitas hidup warga LDII, melalui pemberdayaan lembaga – lembaga dan SDM, diantaranya pendayagunaan SDM, perluasan kesempatan bekerja dan berwirausaha, penciptaan infrastruktur ekonomi umat, baik dalam bentuk lembaga koperasi, usaha bersama [UB], baitul mal wattamwil [BMT] atau bentuk – bentuk pemberdayaan ekonomi umat lainnya yang sesuai.

Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus dimaknakan dalam bentuk peran serta aktif LDII guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pada awal dilakukannya pembentukan UB di Indonesia di tahun 2000, jumlah UB terus berkembang dari 1.000 UB pada tahun 2000, menjadi 1.640 UB pada tahun 2005. UB-UB yang telah beroperasi di seluruh Indonesia ini melakukan aktivitasnya dalam bidang :

1. Sembilan bahan pokok
2. Jasa [Perpanjangan STNK, SIM]
3. Perikanan Tambak
4. Rumah Makan
5. Biro Perjalanan, Haji dan Umroh

6. Agen Penjualan BBM dan Gas
7. Bengkel Mobil, Sepeda Motor dan Elektronik
8. Suplier/Pemasok

Kebijakan UB ini diadakan dalam rangka menanggulangi krisis ekono dengan memperkuat ekonomi mandiri yang di selenggarakan di masing masing PC. Pertimbangan diselenggarakannya UB di tingkat PC didasar pada kemampuan memobilisasi modal dan kemampuan manajem

II. 4. Sukses Peningkatan Peranserta Sosial Kemasyarakata

Sukses peranserta sosial dan kemasyarakatan. Dalam prakteknya sela berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiba masyarakat sebagai warga negara RI yang kita cintai.

Hak dan kewajian warga negara pada dasarnya telah melekat pada setia individu, diantaranya hak – hak universal, termasuk perlindungan huku terhadap kesewenang – wenangan dan prinsip kesetaraan dalam huku

Hak warga negara yang paling elementer yang dijamin oleh konsitusi da prinsip – prinsip HAM yang seharusnya di penuhi oleh negara, diantaranya

1. Memberi rasa aman pada warga negara;
2. Memberi kebebasan menetapi Agama dan Kepercayaan
3. Memberi kebebasan berpendapat;
4. Memberi kebebasan berserikat;
5. Memberi kebebasan memilih dan dipilih menjadi pemimpin
6. Termasuk hak – hak lainya, seperti memperoleh pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Peran serta sosial dan kemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas peranserta LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara internal anggota LDII terus menerus ditingkatkan pemahaman dan pelaksanaan penerapan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sebagai warga negara, yang secara simultan dibarengi upaya advokasi organisasi untuk menegakkan penerapan hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari fungsi organisasi, serta memberi hak – hak anggotanya.

Secara eksternal, kegiatan lembaga dan individu anggota LDII diarahkan untuk memberikan konstribusi bagi terwujudnya " masyarakat madani" [civil *society*] yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang saat ini telah dilakukan oleh seluruh warga LDII di pusat maupun di daerah diantaranya meliputi :

[1] Kebersamaan dengan lingkungan masing – masing, didalam perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan seperti : Hari peringatan Kemerdekaan RI, Idul Qurban, Idul Fitri, dan Satu Muharom.

[2] Kegiatan Sepak Bola Perebutan Piala Menteri Dalam Negeri RI Secara umum dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

[3] Seminar, Pengobatan dan Penanggulangan Pengguna Narkoba DPP LDII bekerjasama dengan Mabes Polri dan Yayasan Alifa.

[4] Penyuluhan dan penerangan Bidang Hukum.

[5] Pengajian di Istiqlal LDII bekerjasama dengan BKPRMI [Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia]

[6] Balap Rejeki Romadhon, Personil-personil LDII kerjasama dengan RCTI.

[7] Pembentukan Posko Aceh baik di Jakarta maupun di Medan dan Nangroe Aceh Darussalam pada saat bencana tsunami sampai dengan saat ini.

Hadirin dan para peserta MUNAS VI yang berbahagia,

Tentang kepedulian dan rasa solidaritas terhadap saudara sebangsa dan setanah air yang terkena musibah gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara dilaporkan seperti di bawah ini :

Musibah ini memang menggugah empati, solidaritas, kebersamaan, kekompakan dan cinta kita pada sesama manusia. Tak ada sekat suku, agama, aliran, atau lainnya yang bisa membelenggu kita. Ribuan sukarelawan berbondong-bondong datang ke lokasi bencana. Mereka terpanggil untuk membantu sesama, ingin berbuat sesuatu demi kemanusiaan.

LDII sebagai salah satu ormas keagamaan turut terpanggil membantu sesama. Beberapa tim sukarelawan diberangkatkan untuk membawa bantuan, membantu evakuasi, melakukan pengasapan [*fogging*] untuk mengusir lalat-nyamuk, membersihkan dan membangun rumah – rumah serta memberikan

ini terdiri atas personil DPP LDII, DPD LDII Provinsi DKI, DPD LDII Provinsi Sumatera Utara dan DPD LDII Provinsi NAD. Dari segi keahlian personil ini meliputi tenaga medis, dokter, operator *fogging*, tukang kayu, tukang batu dan tenaga ahli lainnya yang dibutuhkan saat itu.

LDII sudah membuka posko penampungan pengungsi di Medan, membuka posko pengumpulan bantuan di setiap PC di seluruh Indonesia dan akan mengirimkan tim relawan secara berkala. Bantuan berupa barang dan uang tidak hanya disalurkan langsung melalui relawan namun juga disalurkan secara tidak langsung melalui Posko Indonesia Menangis Media Grup Metro TV, Posko Bencana Alam Aceh dan Sumut MUI, Posko Bersama Peduli Aceh FORGASTA [Forum Gayo, Alas, Singkil, Tamiang], Bulan Sabit Merah, Harian Pagi Indo Pos, dan Palang Merah Indonesia.

Selain itu masih banyak lagi relawan lain yang berangkat atas inisiatif sendiri. Semua itu bertujuan membantu sesama dan Alhamdulillah mendapat tanggapan positif. Selama di Banda Aceh, masing-masing tim melakukan serangkaian kegiatan sesuai kebutuhan. Tim relawan ini terdiri atas beberapa regu yang bertugas bergantian dengan tujuan evakuasi dan pembersihan dengan berkoordinasi dengan Satkorlak, SAR dan organisasi lain. Relawan LDII asal Aceh beranggotakan warga Lhokseumauwe dan warga Banda Aceh, yang merupakan korban bencana.

Dalam rangka mempercepat sosialisasi CATUR SUKSES LDII dan sekaligus meningkatkan kompetensi dan legitimasi, maka LDII telah menerbitkan Majalah Nuansa, 2 [dua] bulan sekali selama 7 [tujuh] tahun berturut – turut sehingga sampai saat ini telah mencapai 40 edisi [per edisi 25.000 exp]. Dasar pemikiran menerbitkan media ini yaitu untuk melakukan sosialisasi kegiatan – kegiatan LDII dari seluruh Indonesia, memberi dorongan bagi DPD, PC & PAC untuk mencontoh daerah – daerah yang mempunyai aktifitas positif, unik dan progresif di daerahya masing – masing. Selain itu memberi kesempatan bagi para Ahli warga LDII khususnya untuk menyalurkan informasi keahliannya sehingga mempunyai efek ganda [*multiplier effect*] dan saling memberi manfaat.

Dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan sosial kemasyarakatan ini LDII telah menerbitkan buku Direktori LDII dan juga LDII sebagai salah satu ormas Islam yang terdaftar dalam Direktori Departemen Dalam Negeri yang ditebitkan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa.

Hadirin para peserta Munas yang berbahagia,

Walaupun cukup banyak kegiatan LDII yang dapat kami sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban ini, namun perubahan-perubahan strategis yang terjadi dalam masyarakat baik infrastruktur maupun suprastruktur yang ada harus terus menerus menjadi perhatian dan pertimbangan kita secara antisipatif dan pro aktif dijadikan dasar guna pembuatan rencana strategis, program kerja dan kegiatan LDII periode yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami mewakili seluruh jajaran pengurus dan warga LDII mengucapkan belasungkawa yang sedalam – dalamnya atas wafatnya pengurus WANHAT, DPP, DPD LDII, yaitu :

1. HR. Edi Masiyadi Jabatan Ketua Dewan Penasihat.
2. HR. Sanusi Kurnain Rasidi, SH Jabatan Anggota Dewan Penasihat.
3. H. Agus Priyanto, SE Jabatan Anggota Departemen Hubungan Antar Lembaga.
4. Drs. H. Ibrahim Guril MZ Jabatan Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga.
5. H. Andi Lala Jabatan Anggota Departemen Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.
6. Ir. H. Nengah Sutika, M.Sc Jabatan Ketua DPD LDII Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Hasan Suwir, SH Jabatan Ketua DPD LDII Provinsi NAD.
8. DR. Ir. H. Fanani Jabatan Pengurus DPD LDII Provinsi DIY.
9. Dan pengurus lainnya yang tidak kami sebut satu per satu untuk itu kami mohon maaf.

Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mengangkat kedua belah tangan memohon doa kepada Alloh Subhanahu Wata'ala mudah – mudahan arwah mereka mendapat tempat yang layak sesuai dengan amal ibadahnya.

Para Peserta Munas VI yang kami cintai

Bab III. Lingkungan Strategis Dan Permasalahan Saat Ini.

Jika pada Era Revolusi kita dihadapkan pada bagaimana Republik Indonesia bisa merebut kemerdekaan dari penjajah, pada massa Orde Baru mengisi pembangunan antara lain dibidang ekonomi, sedangkan di masa Reformasi media massa mendapatkan tempat dalam berekspresi dan pemberitaan yang kadang – kadang mengabaikan norma – norma susila [maraknya

pornografi dan meningkatnya porno aksi] dan berita kriminalitas tan
batas.

Sehubungan dengan keadaan potret tersebut diatas, maka di masa Kabi
Indonesia Bersatu kita melihat adanya proses pemberdayaan masyara
madani [*civil society*] yang menjadi kekuatan lebih berimbang di dal
masyarakat / Ormas – ormas.

Lima komponen yang mempunyai peran, kekuatan dan pengaruh bes
dalam masyarakat yang perlu mendapat perhatian kita secara khusus ada
sebagai berikut :

1. Pemerintah RI baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kot
Kecamatan, Kelurahan sebagai lembaga eksekutif demikian pu
lembaga legislatif dan yudikatif yang masih terus memperbai
diri, membangun Citra Bersih dan Berwibawa.

2. *Civil Society* atau masyarakat madani yang terdiri dari :

   [1] Ormas-ormas dengan para pemimpin yang disegani seperti NU
   Muhammadiyah, dan *NGO* seperti *Indonesian Corruption Watch*

   [2] *Opinion leader* / tokoh masyarakat seperti :
   Amien Rais, Azyumardi Azra, Faisal Basri, T. Mulya Lubis dll, sesua
   bidang profesinya masing – masing.

   [3] Penerbit buku seperti : Gramedia, Mizan dsb.

3. Pemilik Modal yang mudah membentuk opini publik baik positif maupu
negatif dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dilakukan ole
pimpinan publik dengan menggunakan materi seperti *money politics*

4. Aparat keamanan, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara, dan Kepolisian yang juga sedang memperbaiki citra dan
kinerjanya seperti tidak lagi menonjolkan *Coersive Power* nya [dalam
segala tindakannya lebih menekankan pada hukum yang berlaku]

5. Media Massa baik cetak maupun elektronik yang sangat berperan
mempengaruhi opini publik bahkan berisiko dapat timbulnya pengadilan
oleh media [*trial by the press*].

Kelima faktor ini merupakan Lingkungan Strategis yang terjadi dan berpengaruh di sekitar kita. Oleh karena kadar dominasi ke - 5 kekuatan diatas itu beragam di tiap – tiap daerah, maka perlu dipertimbangkan aspek – aspek terkait dengan permasalahan daerah dan permasalahan LDII setempat. Analisis SWOT *[Strenght, Weakness, Opportunity, Threat]* merupakan salah satu metode untuk mengkaji kondisi masing – masing daerah yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita membuat Perencanaan Stratejik, Kebijakan, Program dan Kegiatan di daerah.

Permasalahan Saat Ini

Dilihat dari sisi eksternal diatas tampak bahwa tidak ada dominasi mutlak dari komponen masyarakat yang ada di Negara Indonesia untuk saat ini sehingga LDII tidak boleh hanya bertumpu pada 1[satu] atau 2 [dua] komponen yang ada tapi dapat dan harus pandai memainkan perannya diantara 5 komponen yang ada, sehingga menjadi ormas yang disegani, dihormati dan diperhitungkan.

Sementara itu jika dilihat dari sisi Internal LDII, tantangan yang terberat adalah pembentukan ormas yang profesional dan mandiri. LDII harus bisa mandiri di semua golongan, bukan justru digunakan / dimanfaatkan oleh golongan / Partai Politik tertentu. LDII harus dapat menampilkan citra Ormas yang menjunjung nilai – nilai Islami seperti, jujur, amanah, adil, profesional, dan arif. Nilai – nilai ini harus diterapkan untuk semua pihak, keluar dan kedalam, tidak ada standar ganda sebagaimana perilaku kaum Zionis.

Bab IV Kesimpulan

[1]. Pengurus LDII periode 1998 – 2005 telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Rencana, Program & Kegiatan sesuai dengan amanat Munas V yang di selenggarakan di bulan Oktober 1998.

[2]. Perubahan Lingkungan Strategis di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus seluruh komponen , Pengurus, Peserta dan warga LDII dalam rangka menjalin hubungan positif dan sinergis diantara seluruh komponen anak bangsa untuk mencapai Indonesia yang berdaulat, berwibawa, adil dan makmur yang diridhoi dan diampuni Alloh Subhanahu Wata'ala.

[3]. Walaupun seluruh pengurus LDII periode 1998 – 2005 telah berupaya untuk melaksanakan amanat Munas V yang lalu, kami mohon maaf sekiranya masih banyak kekurangan yang terjadi pada masa

kepengurusan kami, karena ada pepatah " Tak Ada Gading Yang Tak Retak" kami mohon maaf yang sebesar – besarnya kepada segenap peserta dan pimpinan Munas VI LDII. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Dewan Penasihat dan jajaran Pengurus Harian DPP LDII, DPD Provinsi, Kabupaten / Kota, PC dan PAC diseluruh pelosok tanah air sehingga program, dan kegiatan LDII dapat terlaksana dengan baik pada masa kepengurusan kami.

Hadirin dan Para Peserta Munas VI yang kami banggakan

Bab V Rekomendasi.

Melalui Laporan Pertanggungjawaban ini perlu kami memberikan masukan kepada seluruh peserta Munas VI untuk membahas beberapa pokok permasalahan di bawah ini :

[1]. Pembentukan Citra Baru LDII yang peka terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat madani seperti jujur, amanah, adil, profesional dan arif, suatu citra yang telah mengakomodir prinsip – prinsip Good *Governance*.

[2]. Tegakkan disiplin, etos kerja dan tetapkan prioritas di dalam memimpin dan mengambil keputusan dalam organisasi LDII ke depan dengan pendekatan pada urgensi dan kepentingannya untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dahulukan kepentingan umum dan organisasi LDII diatas kepentingan individu, kelompok maupun golongan .

[3]. Penetapan Diklat Pengkaderan bagi generasi penerus dan persiapan pembentukan komponen pemuda LDII seyogyanya dapat dilaksanakan

[4]. Perlunya diselenggarakan seminar/lokakarya/pengkajian – pengkajian dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Selain itu aspek kepemudaan dan seni budaya yang berkesinambungan menjadikan SDM LDII semakin pandai, bertambah luas pengetahuannya dan profesional. Dengan demikian SDM LDII siap menghadapi tantangan masa kini maupun masa mendatang.

[5] LDII sebagai organisasi besar yang mandiri harus menyiapkan diri memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat melaksanakan kegiatan yang optimal.

Penutup

Demikianlah Laporan Pertanggung jawaban ini kami sampaikan. Atas pengertian dan perhatian Bapak/ Ibu peserta Munas VI LDII kami ucapkan terima kasih, mudah – mudahan Alloh Subhanahu Wata'ala memberi manfaat dan barokah bagi kita semua. Selanjutnya kami harapkan Munas VI ini dapat berjalan lancar, aman dan sukses sesuai dengan tujuan.

Kepada segenap SC dan OC serta pihak – pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mempersiapkan, mengorganisir dan membantu baik moril maupun material, sehingga Munas VI ini dapat terselenggara dengan baik, kami ucapkan terima kasih, mudah – mudahan Alloh Subhanahu Wata'ala memberi pahala dan ganjaran yang berlimpah. Amien.

Jakarta, 13 Mei 2005

Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc.

[a] menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai ketentuan Angg
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah
Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Per
Organisasi ;

[b] mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan D
Kabupaten / Kota ;

[c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan D
Kabupaten / Kota ;

[3] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran D
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat
tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Orga

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Da
Provinsi.

Pasal 20
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

[1] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota adalah badan pela
organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten /

[2] Dewan Pimpinan Daerah Kabupeten / Kota berwenang :

[a] menentukan kebijakan tingkat Kabupaten / Kota sesuai ket
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musya
dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun
Kabupaten / Kota, serta Peraturan Organisasi ;

[b] mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Cabang dan
Pimpinan Anak Cabang ;

[c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ca

[3] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten / Kota, serta Peraturan Organisasi ;

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 21
Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Cabang

[1] Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan ;

[2] Pimpinan Cabang berwenang :

[a] menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi ;

[b] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang;

[3] Pimpinan Cabang berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi ;

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 22
Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Anak Cabang

[1] Pimpinan Anak Cabang adalah badan pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa / Kelurahan ;

[2] Pimpinan Anak Cabang berwenang menentukan kebijakan tingkat D / Kelurahan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan, serta Peraturan Organisasi ;

[3] Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan, serta Peraturan Organisasi ;

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

BAB IX
DEWAN PENASIHAT

Pasal 23

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Dewan Penasihat yang berfungsi memberi saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan / Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing.

[2] Dewan Penasihat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan / Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing ;

[3] Saran, nasihat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan / Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing ;

[4] Ketua Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang sesuai tingkatan masing-masing ;

[5] Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 24

[1] Dewan Pimpinan sesuai tingkatan dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu ;

[2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
ORGANISASI OTONOM

Pasal 25

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk Organisasi Otonom yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi ;

[2] Pembentukan Organisasi Otonom diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional ;

[3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KERJA SAMA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 26

[1] Organisasi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah dan/atau swasta dalam rangka memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, baik secara kelembagaan maupun keanggotaan;

[2] Dalam pelaksanaan kerja sama, posisi kedua belah pihak adalah sederajat dan mandiri, salah satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi;

[3] Pengaturan lebih lanjut hubungan dan kerja sama antar lem
sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini akan d
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat tingkat Nasional terdiri atas :

[a] Musyawarah Nasional ;
[b] Musyawarah Nasional Luar Biasa ;
[c] Rapat Pimpinan Nasional ;
[d] Rapat Kerja Nasional ;
[e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;

[2] Musyawarah Nasional :

[a] Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan te
Lembaga yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tah

[b] Musyawarah Nasional berwenang :

[i] menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasa
Anggaran Rumah Tangga ;

[ii] menetapkan Program Umum / Rencana Strateji ;

[iii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat ;

[iv] memilih dan menetapkan Ketua Umum ;

[v] menetapkan Formatur Musyawarah Nasional untuk me
pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan mene
Dewan Penasihat tingkat Pusat ;

[vi] menetapkan keputusan-keputusan lainnya ;

[3] Musyawarah Nasional Luar Biasa :

[a] Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas dasar permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan :

[i] Lembaga dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa ;

[ii] Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya ;

[b] Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

[c] Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf [b] ayat [3] Pasal ini, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh suatu Presidium yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

[d] Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional ;

[e] Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut ;

[4] Rapat Pimpinan Nasional

[a] Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional ;

[b] Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan;

[5] Rapat Kerja Nasional

[a] Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-04/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

b. bahwa seiring dengan perkembangan cepat di era

reformasi yang dihadapi bangsa Indonesia, dian
perlu untuk mengadakan perubahan Anggaran D
dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, agar pe
aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia da
pembangunan bangsa dan negara d
dipertahankan bahkan lebih ditingkatk

c. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Isla
Indonesia telah diberi kewenangan khusus u
melakukan pengkajian secara mendalam da
merumuskan perubahan Anggaran Dasar d
Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;

d. bahwa Perubahan Anggaran Dasar dan Angga
Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indone
sebagaimana dimaksud pada butir b di atas pe
ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawa
Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indones

Mengingat : a. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwa
Islam Indonesia Nomor 03/MUNAS-V/LDII/199
tanggal 24 Oktober 1998 tentang Anggaran Das
dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwa
Islam Indonesia ;

b. Keputusan Musyawarah Nasional V Lembaga Dakwa
Islam Indonesia Nomor 07/MUNAS-V LDII/199
tanggal 24 Oktober 1998 tentang Pengesaha
Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat da
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Isla
Indonesia Masa Bakti 1998 - 2003 ;

c. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembag
Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS V
LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peratura
Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasiona
VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

d. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembag
Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-02/MUNAS V
LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peratura

Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

e. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

f. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP-LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 12 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara lengkap dan terinci tertuang dalam naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dan menjadi lampiran, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Naskah Paradigma Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan

bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 3

Kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota yang telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah diberi waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan keputusan keputusannya dengan Keputusan ini, yang dituangkan dalam keputusan Rapat Pimpinan Daerah.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-04/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 13 Mei 2005

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا اِلَى اللهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِـــي وَسُبْحٰنَ اللهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ سورة يوسف ١٠٨﴾

Artinya :
Katakanlah Muhammad, inilah jalanku [agamaku], aku mengajak manusia ke jalan Alloh atas dasar pengertian [hujjah yang nyata],aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Alloh dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. *[Q.S Yusuf ayat : 108]*

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ...الأية ﴿ سورة النحل ١٢٥﴾

Artinya :
Ajaklah [Manusia] kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik *[Q.S AnNahl : 125]*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ سورة ال عمران ١٠٤ ﴾

Artinya :
Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan [umat] yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. *[Q.S Ali Imran : 104]*

تحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن

مخلصون ﴿ سورة البقرة ١٣٩﴾

Artinya :
Katakanlah Muhammad apakah kalian membantah kepada ku didalam urusan A
sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian, bagi kami am
kami dan bagi kamu sekalian adalah amalan kalian dan kami kepada Alloh as
orang-orang yang mukhlis . *[Q. S Al-Baqoroh : 139]*

يقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له

عقبة الدار انه لا يفلح الظلمون ﴿ سورة الأنعام ١٣٥﴾

Artinya :
"Katakanlah Muhammad wahai kaumku beramallah di atas jalan dan keadaan
ada pada kamu sekalian, sesungguhnya aku adalah orang yang beramal, maka
akan mengetahui orang yang baginya mendapat akibat baik di negeri akhirat [su
sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang menganiaya *[Q.S Al An'am*

MUKADIMAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Jan
1972 di Surabaya, Jawa Timur, menyadari sepenuhnya

Bahwa sebagai kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia un
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan mencapai cita-cita sebagaim
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindu
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memaju
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan i
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdam
abadi dan keadilan sosial, mutlak diperlukan partisipasi dan peran se
dari segenap lapisan masyarakat Indonesia.

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia dan upaya mencapai tujuan nasio
hanya dapat terwujud dan berkelanjutan manakala seluruh kompon
bangsa dan seluruh potensi yang ada, termasuk umat Islam, berkewaji
sepenuhnya untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan su

masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa kelahiran dan peranserta Lembaga Dakwah Islam Indonesia dilandasi semangat melaksanakan ajaran agama sebagai rahmat bagi seluruh alam *[rahmatan lil alamien]* berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui pelaksanaan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* [ibadah sosial] sebagai implementasi kedudukan insani terhadap Al-Khaliq dalam: [i] melaksanakan ibadah semata-mata kepada-Nya, [ii] menjalankan tugas sebagai hamba Alloh untuk memakmurkan bumi, dan [iii] membangun komunitas *[civil society]* yang kompetitif, guna meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemikiran tersebut dan sejalan dengan fungsi Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun potensi bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya insani, kualitas hidup dan kualitas peranserta, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, STATUS, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama "Lembaga Dakwah Islam Indonesia" atau disingkat "LDII".

Pasal 2
Status dan Waktu

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari Lembaga Karyawan Islam, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Kedudukan

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkedudukan
Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4
Azas

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berazaskan Pancasi

Pasal 5
Maksud

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bermaksud melakukan atau melaksanak
dan berperan serta menghimpun seluruh potensi bangsa, yang memi
persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi a
persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Neg
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Unda
Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Tujuan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan meningkatkan kual
peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarak
berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manu
Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepa
Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demok
dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhan
Wa ta'ala.

BAB III
KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia berada di tangan Angg

dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
SIFAT, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 8
Sifat

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai wahana bagi pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, bersifat *independen*, mandiri, terbuka, moderat, majemuk dan *egaliter* [kesetaraan] guna mewujudkan kebahagiaan hidup yang berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dunia dan akhirat

Pasal 9
Fungsi

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi kaum muslimin, muslimat, mubaligh, mubalighot, da'i dan da'iat dalam beramal sholih melaksanakan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* [ibadah sosial] dalam rangka mengabdikan segenap kemampuan untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia khususnya, serta umat manusia dan alam semesta pada umumnya.

Pasal 10
Tugas

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertugas melaksanakan dakwah Agama Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengamalan dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

BAB V
UPAYA

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia berupaya :

1. menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan ekste
Organisasi, termasuk membangun hubungan dan kerja sama de
instansi / lembaga, baik dalam maupun luar nege

2. meningkatkan kualitas sumberdaya insani yang beriman, bertaqwa
berakhlaq mulia, dan meningkatkan kualitas sumberdaya pembangu
yang memiliki etos kerja produktif dan profesional yang mem
kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajeme

3. memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya insani
memiliki kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,
kemampuan untuk beramal sholih melakukan pengabdian masya
di bidang sosial budaya, hukum, ekonomi dan poli

4. menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausa
dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebut
baik pada sektor formal maupun informal melalui usaha bersama
koperasi, serta bentuk badan usaha lain ;

5. mendorong pembangunan masyarakat madani *[civil society]*
kompetitif, dengan tetap mengembangkan sikap: [i] persaudar
[ukhuwah] sesama umat manusia, komunitas muslim, serta bangsa
negara, [ii] kepekaan dan kesetiakawanan sosial, dan [iii] pening
kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membang
dan memperkuat karakter bangsa ;

6. meningkatkan advokasi, penyadaran dan pemberdayaan masya
tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban azasi manusia [K
hak azasi manusia [HAM], dan tanggungjawab azasi manusia [
serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik
perusakan lingkungan.

BAB VI
PARADIGMA DAKWAH

Pasal 12

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Paradigma dal
melaksanakan dakwahnya yang merupakan cara pandang tentang
dan lingkungan dalam kerangka pelaksanaan dakwah dalam ran
mencapai tujuan nasional ;

[2] Paradigma Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 13

[1] Kenggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam;

[2] Pengaturan mengenai keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 14

Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang :

1. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. menyatakan diri dengan sukarela menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;
4. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta Peraturan Organisasi ; dan
5. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja Organisasi.

Pasal 15

Setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama selanjutnya kewajiban dan hak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
TINGKAT KEPENGURUSAN, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 16
Tingkat Kepengurusan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki tingkatan kepengurusan sebagai berikut :

1. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat dengan sebutan "DPP";

2. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau disingkat dengan sebutan "DPD Provinsi";

3. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kabupaten / Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota atau disingkat dengan sebutan "DPD Kab / Kota" ;

4. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat dengan sebutan "PC" ;

5. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Desa / Kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat dengan sebutan "PAC".

Pasal 17

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk perwakilan di luar negeri ;

[2] Pengaturan lebih lanjut mengenai perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

[a] menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai ketentuan Angg
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah
Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Per
Organisasi ;

[b] mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan D
Kabupaten / Kota ;

[c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan D
Kabupaten / Kota ;

[3] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran D
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat
tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Orga

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Da
Provinsi.

Pasal 20
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

[1] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota adalah badan pela
organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten /

[2] Dewan Pimpinan Daerah Kabupeten / Kota berwenang :

[a] menentukan kebijakan tingkat Kabupaten / Kota sesuai ket
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musya
dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun
Kabupaten / Kota, serta Peraturan Organisasi ;

[b] mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Cabang dan
Pimpinan Anak Cabang ;

[c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ca

[3] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten / Kota, serta Peraturan Organisasi ;

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 21
Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Cabang

[1] Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan ;

[2] Pimpinan Cabang berwenang :

[a] menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi ;

[b] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang;

[3] Pimpinan Cabang berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi ;

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 22
Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Anak Cabang

[1] Pimpinan Anak Cabang adalah badan pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa / Kelurahan ;

[2] Pimpinan Anak Cabang berwenang menentukan kebijakan tingkat D / Kelurahan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan, serta Peraturan Organisasi ;

[3] Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :

[a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten / Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa / Kelurahan, serta Peraturan Organisasi ;

[b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

BAB IX
DEWAN PENASIHAT

Pasal 23

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Dewan Penasihat yang berfungsi memberi saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan / Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing.

[2] Dewan Penasihat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan / Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing ;

[3] Saran, nasihat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan / Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing ;

[4] Ketua Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang sesuai tingkatan masing-masing ;

[5] Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 24

[1] Dewan Pimpinan sesuai tingkatan dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu ;

[2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
ORGANISASI OTONOM

Pasal 25

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk Organisasi Otonom yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi ;

[2] Pembentukan Organisasi Otonom diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional ;

[3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KERJA SAMA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 26

[1] Organisasi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah dan/atau swasta dalam rangka memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, baik secara kelembagaan maupun keanggotaan;

[2] Dalam pelaksanaan kerja sama, posisi kedua belah pihak adalah sederajat dan mandiri, salah satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi;

[3] Pengaturan lebih lanjut hubungan dan kerja sama antar lem
sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini akan d
dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat tingkat Nasional terdiri atas :

[a] Musyawarah Nasional ;
[b] Musyawarah Nasional Luar Biasa ;
[c] Rapat Pimpinan Nasional ;
[d] Rapat Kerja Nasional ;
[e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;

[2] Musyawarah Nasional :

[a] Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan te
Lembaga yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tah

[b] Musyawarah Nasional berwenang :

[i] menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasa
Anggaran Rumah Tangga ;

[ii] menetapkan Program Umum / Rencana Strateji ;

[iii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat ;

[iv] memilih dan menetapkan Ketua Umum ;

[v] menetapkan Formatur Musyawarah Nasional untuk me
pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan mene
Dewan Penasihat tingkat Pusat ;

[vi] menetapkan keputusan-keputusan lainnya ;

[3] Musyawarah Nasional Luar Biasa :

[a] Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas dasar permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan :

[i] Lembaga dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa ;

[ii] Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya ;

[b] Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

[c] Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf [b] ayat [3] Pasal ini, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh suatu Presidium yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

[d] Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional ;

[e] Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut ;

[4] Rapat Pimpinan Nasional

[a] Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional ;

[b] Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan;

[5] Rapat Kerja Nasional

[a] Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun

dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Na

[b] Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pe periode kepengurusan.

Pasal 28
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat Provinsi terdiri atas :

[a] Musyawarah Daerah Provinsi ;

[b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi ;

[c] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ;

[d] Rapat Kerja Daerah Provinsi ;

[e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;

[2] Musyawarah Daerah Provinsi

[a] Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan L di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 [lima]

[b] Musyawarah Daerah Provinsi berwenang :

[i] menetapkan Program Kerja Provinsi ;

[ii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah P

[iii] memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan D Provinsi ;

[iv] menetapkan Formatur Musyawarah Daerah Provinsi menyusun Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan mene Dewan Penasihat tingkat Provinsi ;

[v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya ;

[3] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi.

[a] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi adalah Musyawarah Daerah Provinsi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :

[i] kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam ;

[ii] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.

[b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

[c] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi;

[d] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi tersebut ;

[4] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi

[a] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah Provinsi ;

[b] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan ;

[5] Rapat Kerja Daerah Provinsi

[a] Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi ;

[b] Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal
pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 29
Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten / Kota

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat Kabupaten / Kota terdiri atas :

[a] Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota ;
[b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota ;
[c] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
[d] Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota ;
[e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;

[2] Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota

[a] Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota adalah pemegang kekuasa
Organisasi di tingkat Kabupaten / Kota yang diadakan sekali dal
5 [lima] tahun ;

[b] Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota berwenang :

[i] menetapkan program kerja Daerah Kabupaten / Kota ;
[ii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daera
Kabupaten / Kota ;
[iii] memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daera
Kabupaten / Kota ;
[iv] menetapkan Formatur Musyawarah Daerah Kabupaten / Ko
untuk menyusun Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Ko
dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Kabupaten / Ko
[v] menetapkan keputusan-keputusan lain ;

[3] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota

[a] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota adal
Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota yang diselenggarak
dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekur
kurangnya 2/3 [dua per tiga] Pimpinan Cabang dan disetujui o
Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :

[i] kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dalam keadaan terancam ;

[ii] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya ;

[b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;

[c] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota ;

[d] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota tersebut ;

[4] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

[a] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota ;

[b] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota ;

[c] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota diadakan sesuai dengan kebutuhan ;

[5] Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota

[a] Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota ;

[b] Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 31
Musyawarah dan Rapat-Rapat Cabang

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat Cabang terdiri atas :

[a] Musyawarah Cabang ;
[b] Rapat Pimpinan Cabang ;

[2] Musyawarah Cabang

[a] Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisa
tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahu

[b] Musyawarah Cabang berwenang :

[i] menetapkan program kerja Cabang ;

[ii] menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang ;

[iii] memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang ;

[iv] menetapkan Formatur Musyawarah Cabang untuk me
Pimpinan Cabang ;

[v] menetapkan keputusan-keputusan lain ;

[3] Rapat Pimpinan Cabang

[a] Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusa
bawah Musyawarah Cabang ;

[b] Rapat Pimpinan Cabang berwenang menyelesaikan masa
masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang me
wewenang Musyawarah Cabang;

[c] Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan;

Pasal 32
Musyawarah dan Rapat-Rapat Anak Cabang

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat Anak Cabang terdiri atas :

[a] Musyawarah Anak Cabang;
[b] Rapat Pimpinan Anak Cabang ;

[2] Musyawarah Anak Cabang

[a] Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Desa / Kelurahan yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahun ;

[b] Musyawarah Anak Cabang berwenang :

[i] menetapkan program kerja Anak Cabang ;
[ii] menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang ;
[iii] memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang ;
[iv] menetapkan Formatur Musyawarah Anak Cabang untuk menyusun Pimpinan Anak Cabang;
[v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya ;

[3] Rapat Pimpinan Anak Cabang

[a] Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Anak Cabang ;

[b] Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang ;

[c] Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan;

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Bab XIII Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

[1] Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud pada Ba
Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah
peserta ;

[2] Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musy
untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin, maka keputusan di
berdasarkan suara terbanyak ;

[3] Dalam hal Musyawarah mengambil keputusan tentang pem
Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah
yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] Pasal

[4] Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar, maka Musyawarah
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari jumlah
yang diundang, dan keputusan harus diambil dengan persetu
sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari jumlah peserta yang

BAB XV
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 35

Kekayaan dan keuangan organisasi dapat diperoleh dari :

1. modal pertama pada waktu mendirikan organisasi ;
2. Sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak meng
3. Sodaqoh, wasiat, hibah dan athiyah dari orang per orang, masy
   lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta;
4. Dana-dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah;

BAB XVII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 36

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menyatakan pembubaran bilamana ternyata bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya ;

[2] Keputusan untuk membubarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap sah bilamana mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] suara peserta dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan untuk maksud tersebut ;

[3] Jika Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, Dewan Pimpinan Pusat beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan [membereskan] hutang-piutang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan mengawasi, serta menyalurkan sisa kekayaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 37

Peraturan, badan dan lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 38

[1] Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan di
dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan de
Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[2] Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 20

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-04/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 13 Mei 2005

ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota dan Warga

[1] Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap;

[2] Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini selanjutnya disebut anggota adalah anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memenuhi ketentuan pada Pasal 14 Anggaran Dasar;

[3] Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini atau yang lazim disebut Warga, adalah warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] Pasal ini, yang mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

Pasal 2
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban :

1. menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Paradigma Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. memiliki keterikatan secara formal maupun moral, serta menj tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan Lembaga Dakwah Indonesia ;

3. mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran R Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, keputusan Musya Nasional, serta hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Le Dakwah Islam Indonesia ;

4. mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan Le Dakwah Islam Indonesia ;

5. secara sukarela memberikan sumbangan dan bantuan untuk ke organisasi.

Pasal 3
Hak Anggota

Setiap Anggota berhak :

1. memperoleh perlakuan yang sama dari Lembaga Dakwah Islam In

2. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindung bimbingan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

3. memperoleh penghargaan dari organisasi sesuai dengan pre

4. menghadiri rapat Anggota, mengemukakan pendapat, meng pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat mem

5. memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi atau me jabatan lain yang dipercayakan kepadanya ;

6. melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dik Lembaga Dakwah Islam Indonesia atas dirinya.

Pasal 4
Pemberhentian Anggota

[1] Anggota berhenti karena :

[a] mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ;
[b] diberhentikan ;
[c] meninggal dunia ;

[2] Anggota dapat diberhentikan karena :

[a] tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota ;

[b] melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Pimpinan Nasional ;

[c] melaksanakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan atau kebijakan Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[d] melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

[3] Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat [2] Pasal ini harus memenuhi dan melalui proses administrasi pemberian sanksi disiplin secara bertahap, berupa :

[a] teguran lisan ;
[b] teguran tertulis ;
[c] sangsi administratif ;
[d] berhenti sementara sebagai Anggota ;
[e] berhenti sebagai Anggota.

Pasal 5
Prosedur Tetap

Ketentuan mengenai prosedur tetap atau tata cara menjadi Anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban dan sanksi disiplin Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II
SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 6
Dewan Pimpinan Pusat

[1] Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan kolektif yang menerima m
Musyawarah Nasional, sebagai pemimpin dan pemegang tan
jawab tertinggi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik ke d
maupun ke luar.

[2] Susunan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

[a] Ketua Umum ;
[b] Ketua-Ketua ;
[c] Sekretaris Jendral ;
[d] Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal ;
[e] Bendahara ;
[f] Wakil-Wakil Bendaraha ;
[g] Ketua-Ketua Departemen ;
[h] Anggota Departemen.

Pasal 7
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

[1] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah pimpinan kolekti
menerima mandat Musyawarah Daerah Provinsi / Daerah Isti
Daerah Khusus, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung
Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Daerah Provinsi / D
Istimewa / Daerah Khusus, baik ke dalam maupun ke l

[2] Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, terdiri dari :

[a] Ketua ;
[b] Wakil-Wakil Ketua ;
[c] Sekretaris ;
[d] Wakil-Wakil Sekretaris ;
[e] Bendahara ;
[f] Wakil-Wakil Bendahara ;
[g] Ketua-Ketua Biro.
[h] Anggota Biro

Pasal 8
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

[1] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kabupaten / Kota, baik ke dalam maupun ke luar.

[2] Dalam hal Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota oleh karena [i] belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, atau [ii] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota cukup ditetapkan dengan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;

[3] Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri dari :

[a] Ketua ;
[b] Wakil-Wakil Ketua ;
[c] Sekretaris ;
[d] Wakil-Wakil Sekretaris ;
[e] Bendahara ;
[f] Wakil-Wakil Bendahara ;
[g] Ketua-Ketua Bagian.
[h] Anggota Bagian

Pasal 9
Pimpinan Cabang

[1] Pimpinan Cabang adalah pengurus kolektif yang menerima mandat Musyawarah Cabang, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, baik ke dalam maupun ke luar ;

[2] Dalam hal Pimpinan Cabang oleh karena [i] belum dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang, atau [ii] Pimpinan Cabang baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Cabang cukup ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;

[3] Susunan Pimpinan Cabang terdiri dari :

[a] Ketua ;
[b] Wakil-Wakil Ketua ;
[c] Sekretaris ;
[d] Wakil-Wakil Sekretaris ;
[e] Bendahara ;
[f] Wakil-Wakil Bendahara ;
[g] Seksi-Seksi.

Pasal 10
Pimpinan Anak Cabang

[1] Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus kolektif yang m
mandat Musyawarah Anak Cabang, sebagai pemimpin dan p
tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingk
Kelurahan, baik ke dalam maupun ke luar ;

[2] Dalam hal ini Pimpinan Anak Cabang oleh karena [i] belu
menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang, atau [ii] Pimp
Cabang baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan
Anak Cabang cukup ditetapkan dengan keputusan Dewan P
Daerah Kabupaten / Kota ;

[3] Susunan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :

[a] Ketua ;
[b] Wakil Ketua ;
[c] Sekretaris ;
[d] Wakil Sekretaris ;
[e] Bendahara ;
[f] Wakil Bendahara ;
[g] Sub-Sub Seksi.

BAB III
PEMBIDANGAN

Pasal 11

Pembidangan di semua tingkatan struktur Lembaga Dakwah Islam
merupakan tindak lanjut dari implementasi upaya sebagaimana

pada Pasal 11 Anggaran Dasar, di mana penyebutannya adalah sebagai berikut :

1. Departemen, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ;
2. Biro, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
3. Bagian, untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
4. Seksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Cabang ;
5. Sub Seksi, untuk struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 12
Departemen - Departemen

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat terdapat 10 [sepuluh] Departemen, yang terdiri dari :

1. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi ;
2. Departemen Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri ;
3. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media ;
4. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah ;
5. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan ;
6. Departemen IPTEK, Lingkungan Hidup dan Kajian Strategis;
7. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Departemen Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya ;
9. Departemen Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
10. Departemen Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 13
Biro - Biro

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdapat 10 [sepuluh] Biro, yang terdiri dari :

1. Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi ;
2. Biro Hubungan antar Lembaga ;
3. Biro Komunikasi, Informasi dan Media ;
4. Biro Pendidikan, Agama dan Dakwah ;
5. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan ;
6. Biro IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup;
7. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Biro Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya ;

9. Biro Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
10. Biro Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14
Bagian - Bagian

Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupa
terdapat 10 [sepuluh] Bagian, yang terdiri dari :

1. Bagian Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi ;
2. Bagian Hubungan antar Lembaga ;
3. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media ;
4. Bagian Pendidikan, Agama dan Dakwah ;
5. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan ;
6. Bagian IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup;
7. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Bagian Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya ;
9. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
10. Bagian Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 15
Seksi - Seksi

Seksi-Seksi dalam struktur kepengurusan Pimpinan Cabang diben
kebutuhan dengan mengacu ketentuan yang dimaksud pada P

Pasal 16
Sub - Sub Seksi

Sub-Sub Seksi dalam struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang
sesuai kebutuhan dengan mengacu ketentuan yang dimaksud pada P

BAB IV
SYARAT PENGURUS

Pasal 17

[1] Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga D
Islam Indonesia dengan syarat dan ketentuan sebagai be

[a] bertaqwa kepada Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, berakhlaqul k

berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[b] tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal 5 [lima] tahun;

[c] bersedia aktif dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[d] terpilih melalui musyawarah [sesuai tingkatannya] yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[2] Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia di semua tingkatan, seorang Anggota harus dapat membuktikan peran sertanya secara aktif dan pengabdiannya terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedikitnya :

[a] selama 5 [lima] tahun berturut-turut, bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ; atau

[b] selama 2 [dua] tahun berturut-turut, bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, pengurus Pimpinan Cabang dan pengurus Pimpinan Anak Cabang ;

[3] Untuk menjadi Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, maka seorang Anggota harus :

[a] memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini ;

[b] pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi selama 1 [satu] periode ;

[c] memperoleh dukungan dalam Musyawarah Nasional, sedikitnya oleh 30 % [tiga puluh persen] suara ;

[4] Untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota, Ketua Pimpinan Cabang atau Ketua Pimpinan Anak Cabang, maka seorang Anggota harus :

[a] memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
[1] dan [2] Pasal ini ;

[b] telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya sela
periode pada tingkatan yang bersangkutan atau satu ti
bawahnya.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 18

[1] Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ket
Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah
/ Kota, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan An
dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah sesu
masing-masing ;

[2] Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini di
melalui tahapan pencalonan dan pemilihan ;

[3] Ketua Umum atau Ketua sebagaimana dimaksud pada ay
ini ditetapkan sebagai Ketua Formatur ;

[4] Pemilihan personil yang akan menduduki struktur Pimp
tingkatan masing-masing dilakukan oleh Ketua Formatur di
beberapa orang anggota Formatur ;

[5] Tata cara pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pa
diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

[1] Apabila terjadi lowongan jabatan dalam masa bakti ke
Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka jabatan dimaksu
pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno peng
diselenggarakannya musyawarah sesuai ting

[2] Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat terjadi karena adanya pengurus yang :

[a] meninggal dunia ;
[b] mengundurkan diri ; dan/atau
[c] diberhentikan ;

[2] Pejabat sementara yang mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini disebut pejabat antar waktu ;

[3] Pejabat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [3] Pasal ini memegang jabatan hingga berakhirnya masa jabatan pengurus yang digantikannya ;

[4] Dalam hal penggantian jabatan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, atau oleh suatu sebab tertentu lainnya tidak dapat dilaksanakan, maka Pimpinan setingkat di atasnya dapat mengesahkan pejabat antar waktu untuk melanjutkan masa jabatan pengurus yang digantikannya ;

[5] Pejabat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [5] Pasal ini, diusulkan oleh pengurus lainnya kepada Pimpinan setingkat di atasnya untuk disahkan ;

[6] Tata cara dan syarat pengisian lowongan jabatan antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
DEWAN PENASIHAT

Pasal 20

[1] Dewan Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan suatu badan yang bersifat kolektif ;

[2] Susunan dan personalia Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah sesuai tingkatan masing-masing ;

[3] Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Penasihat ;

[4] Jumlah anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini adalah sebagai berikut :

[a] Dewan Penasihat tingkat Pusat, sebanyak-banyaknya ber
[lima belas] orang ;

[b] Dewan Penasihat tingkat Provinsi, sebanyak-banyaknya be
10 [sepuluh] orang ;

[c] Dewan Penasihat tingkat Kabupaten / Kota, sebanyak-ba
berjumlah 7 [tujuh] orang ;

[5] Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal in
menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan P
sesuai tingkatan masing-masing ;

[6] Anggota Dewan Penasihat diangkat dari Pengurus yang tel
dari struktur kepengurusan dan atau tokoh-tokoh di lingkungan L
Dakwah Islam Indonesia yang dipandang sesuai dengan tu
jabatan sebagai Dewan Penasihat ;

[7] Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat [1] P
merupakan badan pertimbangan yang berhak me
pertimbangan, saran dan nasihat, baik diminta maupun ti
dilakukan baik secara perorangan maupun secara kolek
tingkatan masing-masing.

BAB VIII
BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 21

[1] Badan dan/atau Lembaga dapat dibentuk pada setiap tingkat
dengan kebutuhan, dan berfungsi sebagai sarana pe
pelaksanaan program Lembaga Dakwah Islam Indo

[2] Komposisi kepengurusan Badan dan/atau Lembaga seba
dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ditetapkan oleh Dewan P
sesuai tingkatannya ;

[3] Badan dan/atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
ini dapat melakukan koordinasi dengan Badan dan/atau L
yang berada satu tingkat di bawahnya ;

[4] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan/atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
ORGANISASI OTONOM

Pasal 22

[1] Organisasi Otonom dapat dibentuk pada setiap tingkatan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[2] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Organisasi Otonom Perempuan dan Pemuda, serta dapat membentuk Organisasi Otonom lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

[3] Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini memiliki struktur dan kewenangan mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai bidang dan/atau kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertangggungjawabkan kepada pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatan masing-masing ;

[4] Kepengurusan Organisasi Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini ditetapkan oleh pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatan masing-masing ;

[5] Organisasi Otonom yang berada satu tingkat di atasnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Otonom yang berada satu tingkat di bawahnya ;

[6] Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X
KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 23

[1] Kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan instansi, lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Anggaran

Dasar dilakukan melalui pelaksanaan program di semua tingkatan or
Lembaga Dakwah Islam Indonesia, berupa :

[a] pelaksanaan program-program kerja Organisasi ;

[b] pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ;

[c] pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan kelembagaan, te
lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga lain

[d] hal-hal lain yang dianggap perlu ;

[2] Kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan lembag
maupun lembaga negara asing hanya dapat dilakukan ole
Pimpinan Pusat ;

[3] Tata cara pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar le
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini diatur lebih lanjut
Peraturan Organisasi.

BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT

Pasal 24
Musyawarah dan Rapat - Rapat Tingkat Nasiona

[1] Musyawarah Nasional [MUNAS]

[a] Musyawarah Nasional dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat tingkat Pusat ;
- Dewan Pimpinan Pusat ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat ;

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat P

- unsur pimpinan Badan / Lembaga / Organisasi Otonom tingkat Provinsi ;

[iii] undangan, yang terdiri atas :

- perwakilan institusi ;
- perorangan ;

[b] jumlah peserta, peninjau dan undangan Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

[c] pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta ;

[d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, maka Dewan Pimpinan Pusat bertindak selaku pimpinan sementara ;

[2] Musyawarah Nasional Luar Biasa

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa mengacu kepada pada ayat [1] Pasal ini ;

[3] Rapat Pimpinan Nasional [RAPIMNAS]

[a] Pimpinan Nasional dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Pimpinan Pusat ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat ;

[ii] Peninjau, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat Tingkat Pusat ;
- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga Tingkat Pusat,dan
- Kelompok Kerja Dewan Pimpinan Pusat ;
- unsur pimpinan Badan / Lembaga / Organisasi Otonom tingkat Provinsi ;

[iii] undangan, yang terdiri atas :

- perwakilan institusi ;
- perorangan ;

[b] jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ;

[4] Rapat Kerja Nasional [RAKERNAS]

[a] Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Pimpinan Pusat ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat ;

[ii] peninjau, terdiri atas :

- Dewan Penasihat tingkat Pusat ;
- unsur pimpinan Badan / Lembaga / Organisasi O Tingkat Pusat, dan Kelompok Kerja Dewan Pimpinan

[b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Kerja Nasional ditetapk Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25
Musyawarah dan Rapat - Rapat Daerah Provinsi

[1] Musyawarah Daerah [MUSDA] Provinsi

[a] Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat tingkat Provinsi ;
- unsur Dewan Pimpinan Pusat ;
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom Tingkat Provinsi ;

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga Tingkat Provinsi;
- unsur pimpinan Badan / Lembaga / Organisasi Otonom tingkat Kabupaten / Kota ;

[iii] undangan, yang terdiri atas :

- perwakilan institusi ;
- perorangan ;

[b] jumlah peserta, peninjau dan undangan Musyawarah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;

[c] pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh peserta;

[d] sebelum terpilihnya Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi, maka Dewan Pimpinan Daerah Provinsi bertindak selaku pimpinan sementara ;

[2] Musyawarah Daerah Luar Biasa [MUSDALUB] Provinsi

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi ;

[3] Rapat Pimpinan Daerah [RAPIMDA] Provinsi

[a] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- unsur Dewan Pimpinan Pusat ;
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota :
- unsur pimpinan Organisasi Otonom Tingkat Provinsi ;

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat Tingkat Provinsi ;
- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Provinsi

- unsur pimpinan Badan / Lembaga / Organisasi
  tingkat Kabupaten / Kota ;

[iii] undangan, yang terdiri atas :

- perwakilan institusi ;
- perorangan ;

[b] jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan
Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

[4] Rapat Kerja Daerah [RAKERDA] Provinsi

[a] Rapat Kerja Daerah Provinsi dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- unsur Dewan Pimpinan Pusat ;
- Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom Tingkat Provinsi

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat tingkat Provinsi ;
- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat
- unsur pimpinan Badan / Lembaga / Organisasi
  tingkat Kabupaten / Kota ;

[b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Kerja Daerah Provinsi
oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 26
Musyawarah dan Rapat - Rapat Daerah Kabupaten

[1] Musyawarah Daerah [MUSDA] Kabupaten / Kota

[a] Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat Tingkat Kabupaten / Kota ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom Tingkat Kabupaten / Kota ;

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Kabupaten / Kota ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom Tingkat Cabang ;

[iv] undangan, yang terdiri atas :

- perwakilan institusi ;
- perorangan ;

[b] jumlah peserta, peninjau dan undangan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ;

[c] pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota dipilih dari dan oleh peserta ;

[d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota, maka Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota bertindak selaku pimpinan sementara ;

[2] Musyawarah Daerah Luar Biasa [MUSDALUB] Kabupaten / Kota

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten / Kota ;

[3] Rapat Pimpinan Daerah [RAPIMDA] Kabupaten / Kota

[a] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat Tingkat Kabupaten / Kota ;

- unsur Dewan Pimpinan Provinsi ;
- Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- unsur Pimpinan Cabang ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten /

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Kabu / Kota;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cab

[c] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Daerah Kabu / Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten /

[4] Rapat Kerja Daerah [RAKERDA] Kabupaten / Kota

[a] Rapat Kerja Daerah Kabupaten / Kota dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- Dewan Penasihat tingkat Kabupaten / Kota ;
- unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ;
- Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- unsur Pimpinan Cabang ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten /

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur pimpinan Badan dan/atau Lembaga tingkat Kabu / Kota ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

[c] jumlah peserta dan peninjau Rapat Kerja Daerah Kabup Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten /

Pasal 27
Musyawarah dan Rapat - Rapat Tingkat Cabang

[1] Musyawarah Cabang [MUSCAB]

[a] Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota
- Pimpinan Cabang ;
- unsur Pimpinan Anak Cabang ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang ;

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang;

[b] jumlah peserta dan peninjau Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang ;

[c] Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta ;

[e] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Cabang, maka Pimpinan Cabang bertindak selaku pimpinan sementara ;

[2] Rapat Pimpinan Cabang [RAPIMCAB]

[a] Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota ;
- Pimpinan Cabang ;
- unsur Pimpinan Anak Cabang ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang ;

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang;

[b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 28
Musyawarah dan Rapat - Rapat Tingkat Anak Cabang

[1] Musyawarah Anak Cabang [MUSACAB]

[a] Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- unsur Pimpinan Cabang ;
- Pimpinan Anak Cabang ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Anak

[b] jumlah peserta dan peninjau Musyawarah Anak Cabang
oleh Pimpinan Anak Cabang ;

[c] pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan

[d] sebelum terpilihnya pimpinan Musyawarah Anak Cabang
Pimpinan Anak Cabang bertindak selaku pimpinan

[2] Rapat Pimpinan Anak Cabang [RAPIMACAB]

[a] Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :

[i] peserta, yang terdiri atas :

- unsur Pimpinan Cabang ;
- Pimpinan Anak Cabang ;
- unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak

[ii] peninjau, yang terdiri atas :

- Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Anak

[b] jumlah peserta dan peninjau Rapat Pimpinan Anak
ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan musyawarah
rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga
diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 30

[1] Sumbangan yang tidak mengikat, yang diperoleh dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini tidak mensyaratkan sesuatu kepada Lambaga Dakwah Islam Indonesia ;

[2] Usaha-usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara.

BAB XIII
ATRIBUT

Pasal 31

[1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki atribut yang meliputi Panji-panji, Lambang, Hymne dan Mars Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

[2] Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 32

[1] Usul pembubaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat oleh 3/4 [tiga per empat] dari seluruh jumlah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota yang sah di seluruh Indonesia ;

[2] Guna membahas usul pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 3 [tiga] bulan setelah diterimanya usul pembubaran dimaksud, maka Dewan Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa ;

[3] Musyawarah Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari seluruh jumlah Dewan

Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah Ko
Kota yang sah di seluruh Indonesia ;

[4] Keputusan mengenai pembubaran Lembaga Dakwah Islam
dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3
empat] dari jumlah peserta ;

[5] Apabila Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan,
kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Organisasi
lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 33

[1] Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya ;

[2] Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-05/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

RENCANA STRATEJI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2005 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun bagian dan potensi bangsa, bertujuan memberikan peningkatan bagi kualitas sumberdaya manusia, kualitas hidup dan kualitas peran serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari kontribusi untuk pencapaian tujuan nasional ;

b. bahwa dalam rangka turut mempercepat
tujuan nasional, yaitu Indonesia yang
bermartabat, bersatu, adil, makmur, sejah
batin, serta berdiri sejajar dengan bangsa
perlu dirumuskan Rencana Strateji Lemba
Islam Indonesia tahun 2005 - 2010 ;

c. bahwa perumusan Rencana Strateji Lemba
Islam Indonesia tahun 2005 - 2010 se
dimaksud pada butir b di atas perlu dite
suatu Keputusan Musyawarah Nasional
Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lemba
Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS
tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata
Jadual Acara Musyawarah Nasional VI Lemba
Islam Indonesia ;

2. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lemba
Islam Indonesia Nomor KEP-04/MUNAS
tanggal 12 Mei 2005 tentang Perubahan
Dasar dan Anggaran Rumah Tanggal Lemba
Islam Indonesia ;

3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP-LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEJI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2005 - 2010.

Pasal 1

Rencana Strateji Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005-2010 secara lengkap dan terinci tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Strateji Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005-2010 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini merupakan agenda pokok Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menjadi pedoman bagi seluruh Anggota, Pengurus dan jajaran Organisasi di semua tingkatan dalam mengembangkan kehidupan Organisasi dan menyikapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 20

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-05/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 13 Mei 2005

RENCANA STRATEJI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
2005 – 2010

PEMBUKAAN

Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan damai.

Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia penerapannya harus benar-benar selaras hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, dan alam sekitarnya yang memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah. Selain itu mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat kebersamaan dalam mencermati dan menyikapi arus reformasi di berbagai bidang serta perkembangan lingkungan strateji yang bersifat nasional, regional, dan global.

Bahwa upaya pembangunan bidang agama, kualitas beragama, dan kualitas manusia Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat, hal ini karena pada abad ke-21 yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, terjadi transformasi mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antar bangsa di dunia. Era ini ditandai oleh fenomena kehidupan; mudahnya melakukan komunikasi dan mengakses informasi, kebijakan memacu investasi

telah mendorong masuknya modal, teknologi, dan manajemen
Negara, kesepakatan negara-negara melakukan perdagangan be
berdampak pada semakin kaburnya batas suatu negara. Era ini
membuka berbagai peluang juga sangat potensial menimbulkan
permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia
kualitas akhlaknya.

Bahwa LDII dalam peran sertanya mewujudkan tujuan nasional
konsisten melakukan amal nyata melalui upaya meningkatkan
manusia Indonesia dengan menitik-beratkan usaha-usaha yang
kepada kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
terpeliharanya kerukunan di antara sesama umat beragama dan
sebagaimana digariskan dalam Anggaran Rumah Tangga serta
Organisasi LDII.

Bahwa berhasilnya tujuan dan peran serta Lembaga Dakwah Islam
diperlukan adanya keikutsertaan dan rasa tanggungjawab segen
Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya,
memenuhi pangilan :

سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا اِلَى اللهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ انا وَمَنِ اتبعنـــي وسبحن
ا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ سورة يوسف ١٠٨﴾

Artinya :
Katakanlah Muhammad, inilah jalanku [agamaku], aku mengajak
jalan Alloh atas dasar pengertian [hujjah yang nyata], aku dan orang-
mengikutiku. Maha suci Alloh dan bukanlah aku termasuk orang-
musyrik.[Q.S. Yusuf :108]

سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ
الأية ﴿ سورة النحل ١٢٥﴾...

Artinya :
Ajaklah [Manusia] kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran
dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik *[Q.S AnNa*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ سورة ال عمران ١٠٤ ﴾

Artinya :
Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan [umat] yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. *[Q.S Ali Imran : 104]*

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ سورة الأنعام ١٣٥ ﴾

Artinya :
"Katakanlah Muhammad wahai kaumku beramallah di atas jalan dan keadaan yang ada pada kamu sekalian, sesungguhnya aku adalah orang yang beramal, maka kamu akan mengetahui orang yang baginya mendapat akibat baik di negeri akhirat [surga], sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang menganiaya *[Q.S Al An'am : 135]*

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ سورة البقرة ١٣٩ ﴾

Artinya :
Katakanlah Muhammad apakah kalian membantah kepada ku didalam urusan Alloh, sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian, bagi kami amalan kami dan bagi kamu sekalian amalan kalian dan kami kepada Alloh adalah orang-orang yang mukhlis. *[Q. S Al-Baqoroh : 139]*

Bahwa pendirian Negara Republik Indonesia memiliki dimensi spiritual-religius yang sangat kental sebagaimana terbaca dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dimensi spiritual-religius tersebut, para pendiri negara menetapkan empat tujuan bernegara yakni melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam dan sarat dengan dimensi spiritual-religius, dituntut untuk turut berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Agar partisipasi dapat berlangsung efektif dan efisien, organisasi dan manajemen Lembaga Dakwah Islam Indonesia terus berupaya untuk dinamis dan modern tanpa meninggalkan dimensi-dimensi spiritual-religius yang menjadi landasannya.

Dalam kerangka itu, Rencana Strateji ini disusun sebagai
manajemen yang akan membantu seluruh jajaran organisa
memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal,
efisien agar dapat menjadi kinerja organisasi, kinerja bangsa
menuju tujuan bernegara yang telah ditetapkan oleh para pend
kita.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini tengah menghadapi proses transforma
akibat dari perkembangan lingkungan strateji internal dan eksterna
eksternal, transformasi dipicu dan dipacu oleh globalisasi, perke
teknologi, dan semangat liberalisasi. Ketiga faktor ini pada akhi
mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan ekono
pemerintahan, dan sosial budaya. Perubahan tersebut terny
membawa pula perubahan pada pengelolaan segala aspek k
politik, pemerintahan dan sosial budaya. Pada gilirannya, peru
menuntut pula perubahan terhadap organisasi kemasyarakatan,
Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII].

Pada saat yang bersamaan, secara internal, masyarakat dan pe
Indonesia juga dihadapkan pada krisis multi demensi seperti situa
yang belum stabil, ancaman disintegrasi bangsa, menipisnya kep
masyarakat kepada pemerintah, lemahnya penegakan hu
pemberantasan KKN, lambatnya pemulihan ekonomi, meni
pengangguran dan jumlah penduduk miskin, merosotnya daya saing
pembangunan manusia [*Human Development Index*].

Perubahan lingkungan strateji baik internasional maupun nasiona
diatas menuntut pula pemerintah Indonesia melakukan perubahan. S
perubahan yang signifikan adalah perubahan paradigma dalam pe
negara. Oleh pemerintah, perubahan ini dilakukan dengan m
paradigma pengelolaan negara yang selama ini dikenal deng
'pembangunan' yakni paradigma pembangunan yang berciri sen
down, kemudian menggantinya dengan paradigma *good governa*
kepemerintahan yang baik yang berciri desentralistis-demokrati
pemberlakukan prinsip-prinsip demokratis, desentralistik, partisipatif, tra
profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, be
akuntabel; serta berorientasi pada peningkatan daya

Pemberlakuan paradigma *good governance* beserta prinsip-prinsipnya ternyata mengubah peran pemerintah secara drastis, dari unsur pelaksanaan [*rowing*] menjadi lebih banyak sebagai unsur pendorong [*steering*], melalui desentralisasi, peningkatan daya saing dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemberlakuan paradigma tersebut, ke depan peran *rowing* pemerintah semakin diperkecil karena diharapkan masyarakatlah yang lebih berperan membangun kehidupannya. Kebijakan otonomi daerah, demokratisasi di segala aspek kehidupan, pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian kebijakan sebagai tindaklanjut dari pergeseran paradigma itu.

LDII sebagai suatu organisasi kemasyarakatan [ormas] keagamaan memandang perubahan paradigma tersebut sebagai suatu peluang yang harus dimanfaatkan. Dengan paradigma tersebut, LDII dituntut untuk mengerahkan seluruh potensi masyarakat Islam dan memanfaatkan segala jenis peluang eksternal dan internal yang dapat diraih, guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam di Indonesia.

Di samping itu, LDII perlu pula memandang bahwa perubahan paradigma tersebut merupakan suatu tantangan untuk lebih meningkatkan dan menguatkan manajemen internal organisasinya, agar peran yang dimainkannya tidak bertentangan *[contra-productive]* dengan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Disadari sepenuhnya bahwa LDII sebenarnya telah memahami perubahan tersebut, dan jauh sebelumnya telah mengambil posisi proaktif. Ini ditandai dengan hasil-hasil Rakernas tahun 2000 lalu, dimana rakernas itu sendiri sebagai upaya strateji dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Keputusan Rakernas nomor Kep-01/Rakernas/LDII/2000,Kep-02/Rakernas/LDII/2000, Kep-03/Rakernas/LDII/2000 masing-masing tentang Pemberian Wewenang Khusus Kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk mempersiapkan Perubahan dan Penyesuaian Format Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Serta Pelaksanaannya di Lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia; tentang Pernyataan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia; dan tentang Program Prioritas Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2000-2003, merupakan contoh-contoh sikap proaktif tersebut.

Adalah prinsip LDII untuk terus menerus proaktif terhadap perubahan-perubahan lingkungan strateji di sekelilingnya. Untuk itu, LDII memandang perlu menetapkan suatu Rencana Strateji [Renstra] periode 2005-2010, yang dimaksudkan sebagai cetak biru dan acuan dalam pengembangan

organisasi secara komprehensif, yang nantinya diharapkan dapat mengarahkan seluruh potensi organisasi secara fokus, agar setiap sumberdaya yang dipergunakannya, dapat memperlihatkan suatu kinerja yang optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien, dan tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan bangsa dan negara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Berdasarkan Anggaran Dasar LDII, maka LDII mempunyai tugas sebagai berikut :

"Melaksanakan dakwah agama Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan segenap aspek pengamalannya dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan organisasi. "

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, LDII melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a Melaksanakan dakwah Islam secara berkesinambungan, komprehensif dan terprogram dengan menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber materi utama dakwah;

b. Mendorong nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika masyarakat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

c. Mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat Islam dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara;

d. Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan masyarakat Islam Indonesia yang berada di luar negeri;

e. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Islam melalui peningkatan akses ke sumber-sumber pendidikan, pelatihan dan program pengembangan lainnya;

f. Mendorong partisipasi masyarakat Islam dalam pembangunan bangsa dan negara;

g. Meningkatkan kerukunan sosial inter dan antar pemeluk agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati.

II. ANALISIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEJIK

Dengan memperhatikan perkembangan stratejik baik tingkat global, regional maupun nasional yang mempengaruhi eksistensi LDII dalam menjalankan perannya sebagai ormas, maka kondisi ormas Islam saat ini dan yang diharapkan dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut :

A. Kondisi Saat Ini

Subtansi sebuah ormas terbentuk dari tiga unsur yakni kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia. Kelembagaan meliputi struktur organisasi dan unsur nilai yang menjadi landasan pendirian organisasi itu. Manajemen meliputi proses, sistem dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya merupakan bahan utama organisasi dan sumber daya manusialah yang memproses sumber daya lainnya guna menghasilkan kinerja organisasi. Pada kondisi kekinian, ketiga unsur tersebut dipotret sebagai berikut :

1. Kelembagaan

a. Globalisasi telah melahirkan berbagai lembaga internasional seperti APEC, AFTA, WTO dan berbagai lembaga internasional lainnya yang bergerak diberbagai bidang, ternyata belum sepenuhnya diikuti perubahan kelembagaan ormas Islam baik dalam perubahan arah organisasi yang lebih mengglobal dan seharusnya memanfaatkan peluang yang terkandung dalam perubahan di tingkat internasional itu, maupun dalam dinamika internal organisasi yang seharusnya lebih menekankan efisiensi dan efektifitas sebagai ciri suatu lembaga modern.

b. Kuatnya pengaruh pendekatan sentralistik dan *top-down* masa lalu banyak mempengaruhi struktur kelembagaan ormas, sehingga struktur kelembagaan yang ada kurang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kontekstual karena pada prinsipnya rancangan-rancangan

yang ada memang didisain untuk menghadapi permasalahan-permasalahan umum dan klasik.

c. Pemberlakuan kebijakan desentralisasi pembangunan melalui penerapan otonomi daerah mengharuskan pemerintah pusat melimpahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang ini berarti pula meningkatnya volume kewenangan dan kegiatan pembangunan di daerah di seluruh Indonesia. Akan tetapi, struktur kelembagaan ormas baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum ditata ulang secara komprehensif dan terpadu untuk mengantisipasi kebijakan tersebut.

d. Luasnya wilayah Indonesia dan gencarnya pemekaran wilayah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun kelurahan/desa, mengakibatkan bertambahnya pula ormas mengikuti pertambahan itu, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengendaliannya. Dengan kata lain, rentang kendalinya *[span of control]* sudah begitu besar sehingga mekanisme kontrol yang ada selama ini sudah kurang efektif dalam melakukan pengendalian.

e. Perkembangan permasalahan di lapangan dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang begitu pesat, menimbulkan spesialitas-spesialitas baru dan bervariasi yang belum memiliki departemen khusus yang menanganinya. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan prinsip departementalisasi urusan yang fokus, termasuk pembagian fungsi lini dan perbantuan pada urusan-urusan organisasi.

f. Pada umumnya citra ormas Islam mengalami penurunan yang disebabkan terutama oleh ketidakmampuan ormas Islam dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang berkembang baik pada keluarga, masyarakat maupun tingkat negara. Akan tetapi, struktur kelembagaan dan program ormas yang ada belum optimal mengakomodir upaya pembangunan citra yang perlu dilakukan secara sistematis dan melembaga.

2. Manajemen

2.1. Manajemen Organisasi

a. Manajemen ormas dalam wujud sistem dan proses manajemen, baik dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian maupun pelaporan belum

sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip organisasi modern.

b. Manajemen pembiayaan kegiatan belum memiliki sistem dan kebijakan yang padu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam memobilisasi dan mengendalikan sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga internasional.

c. Sistem dan proses pengawasan dan pelaporan serta pengarsipan belum terkoordinasi dengan baik dan belum memberikan adanya jaminan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan.

2.2. Manajemen Informasi

a. Data dan Informasi sebagai bahan *utama dalam* pengambilan keputusan manajemen organisasi masih dikelola secara tradisional dan manual sehingga tingkat kecepatan dan ketepatan belum seoptimal jika memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Aset yang tak nampak *[intangible assets]* seperti data, informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi belum dikelola secara optimal, sehingga asset tersebut lebih merupakan milik individu daripada milik organisasi. Akibatnya, potensi yang dimiliki oleh asset tadi untuk meningkatkan kinerja organisasi belum termanfaatkan secara optimal.

c. Otomasi manajemen melalui pemanfaatan teknologi informasi pada setiap level ormas belum diterapkan sehingga kecepatan *[speed]* dan ketepatan *[accuracy]* proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan juga belum dapat terfasilitasi dengan baik.

3. Sumberdaya

3.1. Sumber Daya Manusia

a. Keadaan dan masalah yang dihadapai dibidang sumber daya manusia adalah populasi penganut Islam yang mencapai 85 % dari keseluruhan penduduk Indonesia, belum memiliki persepsi yang sama terhadap peran dan tanggungjawab dalam pembagunan masyarakat Islam yang adil, damai dan sejahtera. Kondisi ini mengakibatkan program-program yang dikembangkan ditengah masyarakat tidak saling sinergis. Dalam beberapa kasus, malah saling kontra produktif dan bertentangan dengan cita-cita pembangunan bangsa dan negara. Padahal, secara kuantitatif potensi tersebut sangat besar dengan angkatan kerja yang cukup signifikan.

Bahkan sebagian kondisi masa depan bangsa juga dipengaruhi dari sumber daya manusia ini mengingat jumlah remaja/generasi penerus yang juga terus bertambah.

b. Masyarakat Islam masih menunjukkan kepincangan dalam hal pengetahuan mereka terhadap sumber ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Al-hadits maupun pendidikan mereka secara umum. Jumlah penganut Islam yang buta baca dan buta makna terhadap Al Quran dan Al hadits masih signifikan. Di samping itu, pendidikan formal dan non-formal mereka belum sepenuhnya memuaskan karena rendahnya akses mereka terhadap pendidikan sebagai akibat dari kemiskinan.

c. Penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing masyarakat Islam masih tergolong rendah, sehingga mereka belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antara bangsa guna memanfaatkan peluang-peluang global, inovasi masyarakat internasional, serta pemulihan dan peningkatan citra paradaban bangsa dalam masyarakat dunia.

d. Masih lemahnya semangat dan keterampilan kewirausahaan masyarakat dalam menangkap dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

3.2. Sumber Daya Lainnya

a. Sumber daya domestik seperti sumber daya alam, budaya dan sosial memiliki potensi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam. Namun kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ini belum optimal terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan.

b. Kegiatan dan peluang berusaha merupakan sumber daya ekonomi yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam. Namun, tingkat akses masyarakat Islam terhadap pemanfaatan sumber daya tersebut tergolong masih rendah.

c. Akses terhadap permodalan yang berbasis syariah belum sepenuhnya terbuka lebar bagi masyarakat Islam sehingga pemanfaatannya dalam meningkatkan kesempatan berusaha belum optimal.

B. Kondisi yang Diharapkan

Dengan mengacu pada kondisi ormas saat ini yang telah diuraikan di atas, maka kondisi ormas Islam yang diharapkan, sesuai dengan arah

pembangunan nasional, secara rinci dijabarkan dan divisualisasikan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

a. Struktur kelembagaan ormas pada semua level bersifat ramping, terbuka, akomodatif dimana terdapat kejelasan kewenangan dan tanggungjawab, yang dapat menjamin pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, berkeseimbangan antara hubungan pusat dan daerah, serta mampu mewujudkan strategi-strategi yang bersifat global;

b. Struktur kelembagaan ormas yang sepenuhnya menerapkan prinsip *'structure follows Strateji'* sehingga semua permasalahan organisasi pada setiap jenjang/tingkatan dapat terfasilitasi penyelesaiannya oleh struktur yang ada.

c. Perlunya penataan ulang kelembagaan ormas terutama di tingkat daerah [provinsi, kabupaten/kota] sebagai antisipasi pelimpahan kewenangan yang besar dari pusat sebagai tindaklanjut dari penerapan kebijakan otonomi daerah.

d. Perlunya restrukturisasi kelembagaan yang dapat mengakomodir strategi pengendalian sebagai konsekwensi melebarnya rentang kendali sebagai akibat dari luasnya wilayah Indonesia dan gencarnya pemekaran wilayah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun kelurahan/desa.

e. Perlunya penerapan prinsip departementalisasi urusan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih fokus dan terkelompokkan dengan benar, termasuk pembagian fungsi lini dan perbantuan pada urusan-urusan organisasi.

f. Perlunya kelembagaan ormas yang mengakomodir pembangunan citra ormas Islam yang dewasa ini mengalami kemerosotan.

2. Manajemen

2.1. Manajemen Organisasi

a. Penerapan prinsip-prinsip manajemen modern sehingga kegiatan ormas Islam dapat berlangsung efektif dan efisien serta akuntabel, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Keseluruhan proses ini dilaksanakan dalam nuansa yang desentralistis.

b. Manajemen berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat Islam baik di pusat maupun daerah yang mantap, serasi, dan terpadu.

c. Manajemen pembiayaan kegiatan yang memiliki sistem dan kebijakan yang padu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan, dan pengendalian sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha,pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional.

d. Sistem dan proses pengawasan dan pelaporan serta pengarsipan yang terkoordinasi dengan baik dan mampu memberikan adanya jaminan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan.

2.2 Manajemen Informasi

a. Data dan Informasi sebagai bahan utama dalam pengambilan keputusan manajemen organisasi dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tingkat kecepatan dan ketepatan dapat lebih optimal.

b. Aset yang tak nampak *[intangible assets]* seperti data, informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi perlu dikelola secara optimal agar aset tersebut menjadi milik organisasi. Dengan demikian, potensi yang dimiliknya untuk meningkatkan kinerja organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Otomasi manajemen melalui pemanfaatan teknologi informasi pada setiap level ormas perlu diterapkan sehingga kecepatan *[speed]* dan ketepatan *[accuracy]* proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan dapat terfasilitasi dengan baik.

3. Sumber Daya

3.1 Sumber Daya Manusia

a. Sumber daya manusia masyarakat Islam yang populasinya mencapai 85 % dari keseluruhan penduduk Indonesia memiliki persepsi yang sama terhadap peran dan tanggungjawab dalam pembangunan masyarakat Islam, agar upaya pembangunan masyarakat Islam yang adil, damai dan sejahtera dapat berjalan lancar. Di samping itu, potensi angkatan kerja dan generasi muda dapat memberi kontribusi kinerja yang nyata terhadap pembangunan bangsa.

b. Masyarakat Islam memiliki tingkat pengetahuan yang komprehensif dan merata terhadap sumber ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Al-Hadits. Hal yang sama juga diharapkan terjadi pada pendidikan formal dan non-formal mereka secara umum.
c. Masyarakat Islam menguasai teknologi informatika dan bahasa asing, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan interaksi antara bangsa dalam memanfaatkan peluang-peluang global, pemasaran infestasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra paradaban bangsa dalam masyarakat dunia.
d. Akses terhadap kegiatan dan peluang berusaha atau ekonomi perlu ditingkatkan agar masyarakat Islam dapat memanfaatkannya secara optimal.

3.2 Sumber Daya Lainnya

a. Sumber daya domestik seperti sumber daya alam, budaya dan sosial perlu dikelola secara professional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.
b. Akses terhadap permodalan yang berbasis syariah juga perlu dibuka lebar bagi masyarakat Islam sehingga pemanfaatannya dalam meningkatkan kesempatan berusaha dapat difasilitasi.
c. Pemanfaatan sumber daya domestik seperti sumber daya alam, budaya dan sosial dalam memajukan tingkat keadilan dan kesejahteraan masyarakat Islam.

III. VISI DAN MISI

A. Visi

Untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran tersebut diatas, Lembaga Dakwah Islam Indonesia mempunyai visi sebagai berikut :

"Menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Alloh, menjalankan tugas sebagai hamba Alloh untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat dan kerja keras, rukun, kompak dan dapat bekerjasama yang baik."

B. Misi

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka misi LDII adalah :

"Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Strateji untuk pencapaian Misi tersebut akan dilakukan upaya-upaya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar LDII sebagai berikut :

[1] Menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan external organisasi, termasuk membangun hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga, baik dalam maupun luar negeri ;

[2] Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dan meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan yang memiliki etos kerja produktif dan profesional yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen ;

[3] Memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya manunusia yang memiliki kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk beramal sholih melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya, hukum, ekonomi dan politik ;

[4] Menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik pada sektor formalm maupun informal melalui usaha bersama dan usaha koperasi, serta bentuk badan usaha lain ;

[5] Mendorong pembangunan masyarakat madani *[civil society]* yang kompetitif, dengan tetap mengembangkan sikap persaudaraan *[ukhuwah]* sesama umat manusia, komunitas muslim, serta bangsa dan negara, sikap kepekaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap terhadap peningkatan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membangun dan memperkuat karakter bangsa ;

[6] Meningkatkan advokasi, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban azasi manusia [KAM], hak azasi manusia [HAMi] dan tanggungjawab azasi manusia [TAM] serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan.

C. Nilai-Nilai

Dalam menjalankan misi guna mencapai visinya, LDII mengembangkan nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi setiap kegiatan dan menjadi motif utama atau niat bagi setiap warganya dalam beraktivitas baik internal maupun eksternal organisasi. Nilai-nilai LDII adalah sebagai berikut :

1. Memiliki sikap dasar dan paham keagamaan yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan tujuan penerapan untuk kemaslahatan seluruh ummat manusia.
2. Memiliki jiwa nasionalisme dengan keikhlasan untuk menempatkan tujuan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan untuk mewujudkan *empat cita luhur bangsa* Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki hati yang terbuka untuk bersikap toleran dan tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan pandangan;
4. Memiliki sikap adil, jujur, lurus dalam menjalani perannya baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara;
5. Memiliki kompetensi untuk menyeimbangkan tindakan dan perilakunya dalam menjalankan pengabdian kepada Alloh, berinteraksi dengan sesama umat manusia, dan memperlakukan alam semesta/lingkungan hidup;
6. Memiliki kompetensi untuk bersifat moderat dalam merumuskan pendapat, pemikiran dan perbuatan;
7. Memiliki sifat integritas, keberanian dan konsistensi dalam menyuarakan kebenaran meskipun dalam situasi yang sulit.
8. Memiliki komitmen untuk mendukung dan menjalankan keputusan-keputusan organisasi;

IV. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi LDII maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

"Meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Alloh Subhanahu Wa ta'ala."

B. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kegiatan dakwah Islam secara merata di seluruh tanah air.
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Islam secara merata.
3. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang berasal dari sumber-sumber ajaran Islam yang murni.
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat Islami.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat Islam dalam berbagai program pembangunan bangsa dan negara.
6. Meningkatnya kerukunan beragama dan kesetiakawanan sosial.

Sebagaimana telah menjadi opini masyarakat dan keyakinan kita bahwa sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi, dalam hal ini Lembaga Dakwah Islam Indonesia, bahwa rumusan yang spesifik dari sasaran seperti diuraikan diatas akan menjadi *informative* dan *workable* apabila dilengkapi dengan indikator sasaran yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat untuk berbagi visi *[shared vision]* diantara SDM pelaksana program kegiatan organisasi secara transparan dengan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu manfaat dari indikator sasaran adalah agar sasaran dapat lebih terukur dalam waktu yang lebih pendek dari kurun waktu untuk pencapaian tujuan, maka dalam setiap sasaran yang ditetapkan telah dirancang indikator sasaran sebagai mana diuraikan dibawah ini:

1. Meningkatnya kegiatan dakwah Islam secara merata di seluruh tanah air.

Indikator sasaran sebagai berikut :

1.1. Terbentuknya Organisasi LDII yang legitimate dan terakreditasi dengan baik diberbagai level pemerintahan di seluruh Indonesia [Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa].

1.2. Terbangunnya mekanisme dan prosedur kerja organisasi pada seluruh tingkatan organisasi [DPP,DPD Provinsi, DPD Kab/Kota, PC dan PAC];

1.3. Tersedianya SDM organisasi yang handal untuk memutar roda orgasisasi modern LDII;

1.4. Tersedianya prasarana dan sarana kerja organisasi yang lebih memadai;

1.5. Tersedianya dana dari sumber resmi yang tidak mengikat;

1.6. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi melalui kegiatan penerangan dan publikasi [media cetak dan elektronik] tentang tugas pokok dan fungsi serta program kerja organisasi;

1.7. Tertatanya Sistem Informasi Managemen LDII melalui pembangunan jejaring komunikasi dan informasi [*hardware* dan *software*] yang mampu mengkondisikan persepsi masyarakat secara luas secara positif dan kondusif untuk mengungkit *[leverage]* kinerja organisasi LDII di seluruh wilayah;

2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Islam secara merata dan meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang berasal dari sumber-sumber ajaran Islam yang murni

Indikator sasaran dari sasaran kedua dan ketiga dapat diuraikan dibawah ini secara bersamaan karena secara intrinsik mempunyai keterkaitan yang erat, sebagai berikut :

2.1. Adanya sistem penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara baik berdasarkan kepada Al Quran dan Al Hadits;

2.2. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah Islam untuk masyarakat Islam di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga masyarakat lebih mampu meningkatkan aksessibilitas terhadap materi dakwah;

2.3. Adanya peningkatan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non formal yang berkualitas untuk menyangga calon peserta didik yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi terhadap fasilitas pendidikan pemerintah;

2.4. Adanya peningkatan jumlah [kuantitas] dan kualitas pelatihan dan penyebarannya sehingga dapat menghasilkan kelompok angkatan kerja yang terampil, handal dan siap pakai;

2.5. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli [specialist] dan profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga mampu akses ke pasar kerja yang semakin berkembang dan berubah setiap saat;

2.6. Tersedianya sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai dan up to date.

2.7. Tercapainya Kesehatan Keluarga yang terus meningkat:

1] adanya peningkatan kesehatan ibu hamil *[pregnant mother]* dan ibu yang lemah *[lactation mother]* dan bayi;
2] adanya peningkatan pengetahuan msyarakat tentang gizi [pangan beragam, bergizi berimbang atau 3B, pola pangan harapan atau PPH, dan pangan aman, sehat, utuh dan halal [ASUH];
3] khusus untuk kepedulian terhadap daerah rawan pangan, kumuh dan miskin [duafa] , adanya peningkatan aksessibilitas masyarakat di daerah tersebut terhadap kartu sehat, cadangan pangan masyarakat dan pemerintah melalui program *padat karya [food for work and food for asset]* dan program-program pemberdayaan *[capacity building]* lainnya.

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat Islami

Indikator sasaran sebagai berikut:

3.1. Semakin meningkatnya kemampuan SDM warga LDII yang profesional dan mempunyai kemampuan [berdaya] dalam kesadaran berkonstitusi sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam menggerakkan roda reformasi pemerintahan dalam dinamika mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

3.2. Semakin meningkatnya kemampuan SDM warga LDII yang berkiprah dalam peningkatan ketahanan nasional sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa.

3.3. Semakin meningkatnya potensi SDM warga LDII yang mampu berkiprah dalam peningkatan kesadaran hukum dan HAM.

3.4. Semakin berkembangnya berbagai upaya peningkatan Ekonomi Ummat yang dibangun kemandirian, swadaya dan swakarsa SDM LDII dengan tetap bergandengan tangan bersama pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya, antara lain dalam program memerangi kelaparan untuk mengurangi kemiskinan *[Fight hunger to reduce poverty]*.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat Islam dalam berbagai program pembangunan bangsa dan negara.

Indikator sasaran sebagai berikut :

4.1. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dan terbangunnya pola kemitraan melalui berbagai upaya peningkatan pemanfaatan sumberdaya LDII dan mitra kerja secara bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi.

4.2. Adanya manfaat yang diambil dari penerapan konsep pengarus-utamaan gender sehingga ada peningkatan kontribusi yang setara dan berkeadilan bagi wanita Islam [muslimah] dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional.

4.3. Adanya peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, korban bencana alam dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya, terbangunnya peran serta masyarakat dalam peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat.

4.4. Adanya kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik itu buatan maupun alami.

5. Meningkatnya kerukunan beragama dan kesetiakawanan sosial

Indikator sasaran sebagai berikut :

5.1. Terbangunnya berbagai program kerjasama dan persaudaraan, program peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa kebanggaan nasional, dan program peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetia-kawanan sosial secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan insaniah/basyariah.

5.2. Terselenggaranya kehidupan beragama yang baik terutama

1] dalam hal kerukunan diantara sesama umat beragama dan pemerintah [tri kerukunan umat beragama],

2] pemberdayaan kehidupan beragama untuk membangun masyarakat madani yang maju, berkeadilan, maju dan sejahtera yang diridhoi oleh Alloh Subhanahu Wata'ala

V. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun ditetapkan berbagai kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama untuk sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi. Sedangkan program adalah sekumpulan kegiatan yang secara sistematis dan terpadu akan dilaksanakan oleh satu departemen atau lebih yang sesuai dengan kompetensi departemen dalam organisasi LDII dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

A. Kebijakan

1. Peningkatan Kinerja Organisasi

Peningkatan kinerja organisasi adalah upaya keorganisasian yang sistematis dan sinergis, serta diarahkan agar LDII sebagai organisasi kemasyarakatan dapat memberikan ruang gerak dan ruang partisipasi, serta suasana kondusif bagi peran internal LDII sebagai wadah seluruh anggota dan proses untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kualitas peran serta seluruh anggota LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara eksternal, LDII diharapkan mampu mensosialisasikan seluruh peran internalnya dan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan peran serta sosial dan kemasyarakatannya sebagai bagian dari kontribusi LDII kepada bangsa dan negara untuk mempercepat tercapainya tujuan nasional.

Peningkatan kinerja organisasi diarahkan terutama kepada dua hal yaitu:

a. Membangun Citra LDII

Adalah merupakan tugas organisasi untuk mampu menjalankan fungsi secara sistematis dan mengartikulasikan kondisi objektif melalui suatu konsepsi dan tindakan nyata di lapangan yang apresiatif, yang merupakan paradigma baru LDII, yaitu membangun citra LDII untuk tampil menjadi lebih konstruktif dan kontributif.

1. Mensinergikan Proses Organisasi

Dibangunnya organisasi dan pendekatan baru organisasi yang dilengkapi dengan "pendekatan horizontal", secara legal harus dapat menyajikan format baru dalam menjalankan perannya sebagai wadah dan proses bagi seluruh aktivitas organisasi.

Penguatan mekanisme kerja organisasi merupakan syarat mutlak organisasi modern dewasa ini. Pengelolaan organisasi yang sistematis dan melembaga sangat dibutuhkan untuk mengerahkan segala sumberdaya organisasi dan masyarakat Islam agar visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kebijakan ini membutuhkan penerapan manajemen professional yang ditopang oleh dukungan sumberdaya manusia yang handal dan yang memiliki komitmen tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kuantitas masyarakat islam yang berjumlah 85 % dari keseluruhan penduduk Indonesia, kurang memiliki makna apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Kualitas ini mencakup tingkat pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang murni, tingkat pendidikan dan keterampilan mereka sebagai bagian dari masyarakat internasional, teknologi, dan ilmu pengetahuan.

Peningkatan kualitas SDM merupakan upaya sistematik, gradual dan sinergis, yang diarahkan bagi peningkatan kualitas SDM dalam rangka membentuk SDM sebagai insan dan SDM sebagai sumberdaya pembangunan, sehingga menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan motivasi dan inovasi pembentukan karakter melalui upaya yang mengarah pada pembentukan perilaku dan integritas, baik secara kognitif [pembentukan pola pikir, wawasan dan penalaran yang luas], efektif [akhlaqul karimah] dan psikomotorik [kemampuan manajerial dan pemilikan sikap kemandirian yang kuat].

Peningkatan kualitas SDM, baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan secara eksternal merupakan sumbangan nyata LDII dalam turut serta membentuk SDM Indonesia yang berkualitas dan kompetitif dalam menyikapi era globalisasi dan era informasi yang semakin mengarah pada kompetisi .

SDM sebagai insan diwujudkan melalui :
Peningkatan iman dan taqwa kepada Tunan Yang Maha Esa, berakhlaq

mulia, amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsa, memiliki kepercayaan diri, cerdas, demokratis dan memiliki kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

SDM sebagai sumberdaya pembangunan diwujudkan melalui:

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang memiliki pola pikir, pola dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional, memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen.

Generasi muda merupakan SDM baik sebagai insan maupun sebagai sumberdaya pembangunan sangat Strateji untuk mendapatkan perhatian khusus, karena generasi muda adalah pewaris masa depan yang berperan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagai generasi penerus nilai-nilai luhur budaya bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar pemuda menjadi kader pimpinan bangsa yang memiliki disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan, baik masa kini maupun masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan dalam membangun masa depan bangsa dan negara.

3. Pemberdayaan Potensi LDII

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang yang berpenduduk mayoritas Islam berhak memiliki kualitas hidup yang layak, dan sepadan dengan tingkat kualitas hidup masyarakat di negara maju. Kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Perberdayaan potensi LDII merupakan upaya Strateji yang diarahkan bagi peningkatan kualitas hidup anggota LDII, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga dan SDM, diantaranya pendayagunaan SDM, perluasan kesempatan bekerja dan berwirausaha, penciptaan infrastruktur ekonomi umat, baik dalam bentuk lembaga koperasi, usaha bersama [UB], baitul mal wattamwil

[BMT] atau bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi umat lainnya yang sesuai.

Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus dimaknakan sebagai peran serta aktif LDII dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu pada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan potensi LDII mencakup materi sebagai berikut :

3.1. Konsep Pemberdayaan

Konsepsi pemberdayaan potensi LDII merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kondisi objektif potensi kesejahteraan anggota LDII yang secara nyata memiliki tingkat kebersamaan yang sangat tinggi dalam komunitas yang heterogen namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan bermuamalah.

Kondisi ideal yang diharapkan dalam proses pemberdayaan ini adalah peningkatan kualitas hidup bagi anggota LDII melalui upaya :

- Menggerakkan potensi cendekiawan, profesional, praktisi, pengusaha, wanita dan generasi muda untuk melakukan pengabdian masyarakat dibidang peningkatan kualitas SDM, kesempatan bekerja dan berusaha, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, melestarikan lingkungan hidup serta pemberdayaan ekonomi umat;

- Mengembangkan potensi, memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumberdaya secara bijaksana agar diperoleh nilai optimal bagi peningkatan kesejahteraan anggota LDII;

- Turut serta mengupayakan perluasan lapangan kerja pada sektor pertanian, industri dan jasa, serta peningkatan kesempatan kerja yang terbuka sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahliannya, serta menumbuhkembangkan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik pada sektor formal maupun informal melalui bentuk-bentuk usaha bersama [UB].

- Konsep Pemberdayaan bagi SDM didaerah kumuh, miskin dan korban bencana mengacu pada konsep management bencana *[disaster management]* yang biasa digunakan oleh organisasi modern manapun di dunia ini, termasuk oleh LSM maupun kelembagaan internasional, yaitu ada dua pendekatan, *pertama,* apabila memang kita tidak melihat adanya potensi sedikitpun dari SDM yang kita hadapi maka konsep

pendekatan "konvensional" harus dilakukan dengan *relief programme atau* tanggap darurat untuk menuju rehabilitasi fungsi-fungsi keberdayaan SDM disana dan tetap fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan lahir dan bathin. Adapun, pendekatan *kedua,* adalah pendekatan pemberdayaan [capacity building] harus dilakukan apabila masyarakat miskin, kumuh atau korban bencana masih mempunyai kinerja yang dapat dikembangkan. Berikan pancingnya jangan diberikan ikannya dalam melakukan pendekatan kedua ini. Bantuan yang dimaksudkan selain modal kerja atau sarana produksi sebagai *seed-money* untuk revitalisasi kinerja sumberdaya, maka bantuan sudah harus termasuk "advokasi moralitas" atau "advokasi psychologis" berbentuk dakwah Islam yang terncana dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin.

- Pemberdayaan SDM sacara umum hendaknya dilihat dari tiga aspek yaitu aspek peningkatan pendidikan *[increase education opportunities],* peningkatan kesehatan *[health improvement]* dan kesejahteraan sosial *[sustainable livelihood opportunities]* . Tercapainya Kesehatan Keluarga dapat dilakukan dengan:
  1] peningkatan kesehatan ibu hamil *[pregnant mother]* dan ibu yang lemah *[lactation mother]* dan bayi,
  2] peningkatan pengetahuan msyarakat tentang gizi [pangan beragam, bergizi berimbang atau 3B, pola pangan harapan atau PPH, dan pangan aman, sehat, utuh dan halal [ASUH];
  3] khusus untuk kepedulian terhadap daerah rawan pangan, kumuh dan miskin [duafa] , dengan peningkatan aksessibilitas masyarakat di daerah tersebut terhadap kartu sehat, cadangan pangan masyarakat dan pemerintah melalui program *padat karya [food for work and food for assets]* dan program-program pemberdayaan *[capacity building]* lainnya.

LDII juga mempunyai komitment untuk membantu pemerintah dalam mencermati pentingnya pemberdayaan SDM dan bahkan akan menjadi *motivator* dan *accelerator* pembangunan. Maka dengan demikian LDII bersama-sama komponent masyarakat lainnya terus berjuang sesuai dengan kompetensinya sebagai wujud nyata organisasi LDII dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan dari *Millennium Development Goal* [MDG] di Indonesia.

3.2. Sasaran Pemberdayaan

Sasaran pemberdayaan yang diharapkan dicapai adalah terselenggaranya

sistem perekomonian yang mandiri dan handal, yang didasarkan pada usaha bersama dan koperasi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran anggota LDII yang semakin mandiri, kemitraan berusaha yang kokoh antara lembaga dan umat LDII, iklim berusaha yang sehat dan kondusif, dukungan SDM yang berkualitas, profesional, produktif dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh kebijakan peningkatan kemampuan manajerial dari para pengurus UB, peningkatan daya saing, penataan struktur dan jaringan usaha, serta peningkatan investasi dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan produktivitas, kemandirian dan daya saing di era global ini.

3.3. Peranan Wanita

Pembinaan peranan wanita diarahkan untuk terlaksananya program "Panca Dharma Wanita" yang ditujukan untuk meningkatkan peran aktif mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, pembinaan anak, remaja dan pemuda.

Kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dipelihara dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pemberdayaan potensi LDII dengan tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya.

Konsep Pengarus-Utamaan Gender [PUG] menjadi panutan dalam perencanaan pengembangan wanita kedepan. Oleh karena Pemerintah Republik Indonesia telah mengangkat PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. PUG dapat ditafsirkan sebagai suatu strategi untuk menjadikan prioritas dan aspirasi serta pengalaman wanita dan laki-laki menjadi dimensi integral dari desain, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dari berbagai kebijakan pada semua bidang sosial ekonomi politik serta kemasyarakatan. PUG dapat pula dipandang sebagai suatu proses penilaian terhadap implikasi dari rencana aksi, termasuk yang mencakup undang-undang/kebijakan serta program terhadap wanita maupun laki-laki, pada semua bidang dan pada setiap tingkatan pembangunan. Dalam segala pemikiran itu, LDII tetap menempatkan wanita sebagai SDM dengan segala kelebihan dan

kekurangannya namun perhatian terhadap kompetensi wanita sebagai penjaga kualitas generasi penerus akan menjadi sangat prioritas. Dengan demikian program peningkatan pengetahuan dibidang pendidikan dan kesehatan bukan hanya hiasan tetapi kewajiban yang mutlak harus dilakukan terutama membangun balita yang cerdas dan aktif agar pada saat mulai ABG telah mampu menyerap ilmu yang diwajibkan untuk dimilikinya yaitu ilmu Al Quran dan Al Hadits dan juga pilihan ilmu yang bermanfaat lainnya baik melalui program pendidikan formal maupun informal.

3.4. Perluasan Kerjasama

Diusahakan seluas-luasnya kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah dengan prinsip *"mutual benefit"* agar dicapai hasil usaha yang maksimal bagi kepentingan internal LDII, sedangkan secara eksternal diarahkan sebagai bagian peningkatan peran serta LDII dibidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

4. Peranserta Sosial dan Kemasyarakatan

Peranserta sosial dan kemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas peran serta bernegara. Masyarakat Islam yang mayoritas memiliki potensi besar dalam memfasilisitasi bahkan mempercepat tercapainya cita-cita pembangunan bangsa dan negara. Partisipasi mereka dalam setiap kegiatan pembangunan merupakan kontribusi nyata dan partisipasi aktif mereka dalam memanfaatkan peluang yang telah disediakan oleh pemerintah. Secara internal anggota LDII terus-menerus ditingkatkan pemahaman dan pelaksanaan penerapan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab sebagai warga Negara, yang secara simultan dibarengi upaya advokasi organisasi untuk menegakan penerapan hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari fungsi organisasi, serta membela hak-hak anggotanya. Secara eksternal, kegiatan lembaga dan individu anggota LDII diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya "masyarakat madani" [*civil society*] yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Hak dan kewajiban warga negara yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

4.1. Pemahaman Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

Hak dan kewajiban sebagai warga negara pada dasarnya telah melekat pada setiap individu, diantaranya meliputi hak-hak universal, termasuk

perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan dan prinsip kesetaraan didalam hukum.

Hak warga negara yang paling elementer yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip HAM yang seharusnya dipenuhi oleh negara, diantaranya adalah :

- Memberi rasa aman kepada warga negara;
- Memberi kebebasan menetapi agama dan kepercayaan;
- Memberi kebebasan berpendapat;
- Memberi kemerdekaan berserikat;
- Memberi kebebasan memilih dan dipilih menjadi pemimpin;
- Termasuk hak-hak lainnya, seperti memperoleh pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.

4.2. Penegakan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara perlu ditegakkan melalui kegiatan advokasi yang meliputi upaya legislasi, legalisasi dan litigasi.

Upaya advokasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diperlukan guna mendekatkan nilai-nilai *"das sollen"* [keharusan] dan *"das sein"* [kesenyataan], serta sebagai kegiatan konkret fungsi organisasi membela hak-hak anggota.

- Melegalisasikan seluruh gerak dan dinamika LDII, dengan menempatkan hukum sebagai supremasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, lembaga maupun hubungan-hubungan kemasyarakatan.
- Peran serta warga negara [peran legislasi], dengan menggunakan hak-hak warga negara secara baikdan bertanggungjawab, serta berusaha ikut serta menyampaikan masukan dan atau usulan yang bernuansa bagi peningkatan kehidupan beragama yang harmonis pada lembaga yang berwenang melaksanakan proses legislasi dan menerbitkan produk regulasi.

4.3. Penegakan Ukhuwah dan Kesetiakawanan

Turut serta membentuk terwujudnya "masyarakat madani [*civil society*]" yang demokratis dan berkeadilan sosial dengan mengembangkan sikap *ukhuwah* :

- *Ukhuwah Islamiah*, meningkatkan kerjasama dan persaudaraan di kalangan umat Islam.
- *Ukhuwah Wathoniah*, mengembangkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
- *Ukhuwah Basyariah*, memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah bangsa-bangsa di dunia dalam rangka menempuh perdamaian abadi dan keadilan sosial. Meningkatkan kesadaran, kepekaan dan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

5. Peningkatan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama

Disadari bahwa pluralisme agama, sosial dan budaya masyakat Indonesia dapat menjadi tantangan dalam pembangunan. Namun, pluralisme tersebut juga memiliki potensi dalam pembangunan. Melalui peningkatan kerukunan beragama, potensi itu akan nampak lebih kontributif terhadap proses pembangunan.

Meningkatkan kehidupan beragama terutama dalam turut sertanya membina kerukunan di antara sesama umat beragama dan pemerintah [Tri Kerukunan Umat Beragama] serta meningkatkan peranan dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera yang diridhoi Alloh Subhanahu Wata'ala. Kebijakan ini didasarkan pada Prinsip-Prinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

B. Program

1. Kebijakan Peningkatan Kinerja Organisasi menurunkan program-program berikut :

1.1. Penataan ulang kelembagaan;

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan organisasi pada masing-masing tingkatan agar terwujud suatu kelembagaan organisasi yang kapasitasnya dapat menerapkan strategi-strateginya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya guna mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan organisasinya menuju kapasitas yang lebih tinggi.

1.2. Penerapan manajemen modern;

Program ini bertujuan untuk membangun suatu mekanisme dan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur mulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau sampai pada mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi, agar melalui penerapan manajemen modern tersebut,

organisasi, agar melalui penerapan manajemen modern tersebut, pengelolaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.3. Peningkatan sumber daya manusia organisasi;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi yang meliputi peningkatan kompetensi niat, sikap, pengetahuan, keterampilan dan fisik [*traits*] yang relevan dengan strategi-strategi organisasi. Pengurus organisasi dengan kompetensi yang tinggi pada gilirannya akan mampu mengelola sumber-sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

1.4. Peningkatan prasarana dan sarana kerja organisasi;

Program ini bertujuan selain untuk mewujudkan prasarana dan sarana kerja organisasi pada masing-masing tingkatan juga untuk meningkatkan pemanfaatan dan kemanfaatan serta memelihara keberfungsiannya untuk mendukung tugas-tugas organisasi.

1.5. Penggalangan dana organisasi;

Program ini bertujuan menggalang dana dari berbagai sumber resmi tanpa melakukan ikatan-ikatan yang dapat mengancam visi, misi dan tujuan organisasi.

1.6. Peningkatan penerangan dan publikasi;

Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan eksistensi dan kegiatan-kegiatan organisasi kepada para *stakeholders* organisasi agar terbangun suatu persepsi positif yang diharapkan dapat berubah menjadi dukungan terhadap tujuan dan kegiatan-kegiatan organisasi.

1.7. Peningkatan jejaring komunikasi dan informasi.

Program ini bertujuan untuk membangun jejaring atau hubungan kerja seluas mungkin dengan sumber-sumber data dan informasi yang relevan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Data dan informasi yang terjaring diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan dan mereposisi peran organisasi.

2. Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menurunkan program-program berikut :

2.1. Penataan Pendidikan Keagamaan [Al-Qur'an dan Al-Hadits];

Program ini bertujuan untuk menata sistem pendidikan keagamaan

dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Hadits agar substansi kedua sumber ajaran tersebut dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada ummat Islam. Sistem pendidikan keagamaan yang tertata dengan baik pada gilirannya akan membentuk kecerdasan pada setiap ummat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara konsisten.

2.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah;

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah dan penyebaran kegiatan dakwah Islam sehingga dapat mencapai sebagian besar warga ummat Islam yang bertempat tinggal di pelosok-pelosok. Kegiatan-kegiatan dakwah yang menyebar itu dilaksanakan secara berkualitas yang diindikasikan oleh mudahnya ummat Islam menerima materi dakwah.

2.3.Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan [formal dan non formal];

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non-formal yang berkualitas kepada seluruh warga Indonesia. Program ini terutama diperuntukkan bagi ummat Islam yang tingkat aksesnya ke pendidikan milik pemerintah rendah yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan finansial mereka.

2.4.Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran pelatihan yang berkualitas kepada seluruh warga Indonesia guna memperoleh kompetensi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program terutama peruntukkan kepada kelompok angkatan kerja guna membekali mereka dengan keterampilan kerja.

2.5.Pengembangan spesialisasi dan profesionalisme SDM;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, penyebaran dan kualitas spesialis dan professional di kalangan warga Islam. Program ini terutama diperuntukkan bagi warga Islam yang sudah memasuki pasar kerja namun memerlukan peningkatan keahlian dan profesionalisme agar mereka dapat memiliki keunggulan kompetitif.

2.6.Peningkatan sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM. Sarana dan prasarana yang baik dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan. Di samping itu, juga dapat meningkatkan citra organisasi.

2.7. Peningkatan kesehatan keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga yang merupakan basis/unit kekuatan organisasi. Program terutama diperuntukkan pada peningkatan kesehatan Ibu dan bayi yang merupakan titik awal dalam membentuk generasi penerus yang tangguh.

3. Kebijakan Pemberdayaan Potensi LDII menurunkan program-program berikut :

3.1. Peningkatan kesadaran konstitusi;

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal kesadaran konstitusi Negara Republik Indonesia. Meningkatnya jumlah warga LDII yang sadar konstitusi dapat memberikan kontribusi positif terhadap jalannya roda reformasi pemerintahan dalam dinamikanya mencapai tujuan bangsa dan negara.

3.2. Peningkatan kesadaran ketahanan nasional ;

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan ketahanan nasional. Meningkatnya jumlah warga LDII yang memiliki ketahanan individu dan keluarga pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap ketahanan nasional yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa.

3.3. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM;

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan HAM. Meningkatnya jumlah warga LDII yang sadar hukum dan HAM pada gilirannya berkontribusi positif terhadap ketertiban dan ketentraman hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan.

3.4. Peningkatan implementasi ekonomi umat;

Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ummat Islam. Meningkatnya jumlah ummat Islam yang keluar dari belenggu kemiskinan akan berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

4. Kebijakan Peran Serta Sosial dan Kemasyarakatan menurunkan program-program berikut :

4.1. Peningkatan kerjasama dan pola kemitraan;

Program ini bertujuan membangun jejaring kerja baik dengan individu

maupun dengan organisasi lain dalam berbagai bidang sehingga sumber daya mereka dapat bersinergi dengan sumber daya LDII dalam meningkatkan kinerja organisasi;

4.2. Peningkatan pemberdayaan perempuan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender. Meningkatnya jumlah wanita Islam yang memiliki akses terhadap berbagai kegiatan pembangunan, akan berkontribusi terhadap program nasional tentang pengarusutamaan gender.

4.3. Peningkatan kepedulian & kesetiakawanan sosial;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, yang terkena bencana alam, dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya. Meningkatnya jumlah ummat Islam yang keluar dari kelompok yang kurang beruntung ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

4.4. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat;

Program ini bertujuan untuk menggalang peran serta masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan secara swakarsa. Ketertiban dan keamanan masyarakat akan lebih kondusif jika masyarakat yang merupakan bagian intergral bersinergi dengan aparat pemerintah.

4.5. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kualitas, keberadaan dan kelestarian sumberdaya ekosistem baik itu berupa lingkungan hidup buatan [pemukiman, kawasan industri dll] maupun berupa lingkungan hidup alami.

5. Kebijakan Peningkatan Kerukunan Hidup Inter dan Antar Umat Beragama menurunkan program program berikut :

5.1. Peningkatan Ukhuwah Islamiah, Wathoniah dan Insaniah/Basyariah;

Program ini bertujuan :

- Meningkatkan kerjasama dan persaudaraan dikalangan umat Islam;
- Mengembangkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa bangga dan mandiri sebagai Bangsa Indonesia, dan;
- Memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah bangsa di dunia pada umumnya dan meningkatkan kesadaran, kepekaan dan

kesetiakawanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

5.2. Peningkatan kerjasama lintas agama.

Program ini bertujuan meningkatkan kehidupan beragama terutama dalam turutsertanya membina kerukunan diantara sesama umat beragama dan pemerintah [tri kerukunan umat beragama] serta meningkatkan pemberadayaan kehidupan beragama tersebut dalam pembangunan *masyarakat yang* maju, adil, makmur dan sejahtera yang diridloi Alloh Subhanahu Wata'ala.

C. Kegiatan

Dengan mengacu pada program-program tersebut di atas, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah [Provinsi dan Kabupaten/Kota] Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyusun rencana kegiatan-kegiatan rinci yang akan dilaksanakan selama kurun waktu periode I tahun [2005-2010], dan mempersiapkan rencana periode II [2010-2015] serta periode III [2015-2020]. Setiap tahun, kinerja kegiatan dilaporkan secara berkala dan berjenjang dengan mengacu pada **Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Organisasi 2005-2010.**

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-05/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 13 Mei 2005

RENCANA STRATEJI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
2005 – 2010

VISI

Menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan luas mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Alloh, menjalankan tugas sebagai hamba Alloh untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak dan dapat bekerjasama yang baik.

MISI

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lampiran 1. Matriks Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program Rencana Strateji

TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM	
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	TUJUAN
Peningkatan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Alloh Subhanahu Wa ta'ala.	1. Meningkatnya kegiatan dakwah Islam secara merata di seluruh tanah air;	1. Terbentuknya Organisasi LDII yang legitimate dan terakreditasi dengan baik diberbagai level pemerintahan di seluruh Indonesia [Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa]. 2. Terbangunnya mekanisme dan prosedur kerja organisasi pada seluruh tingkatan organisasi [DPP, DPD Provinsi, DPD Kab/Kota, PC dan PAC]; 3. Tersedianya SDM organisasi yang handal untuk memutar roda orgasisasi modern LDII; 4. Tersedianya prasarana dan sarana kerja organisasi yang lebih memadai 5. Tersedianya dana dari sumber resmi yang tidak mengikat; 6. Terlaksananya advokasi dan sosialisasi melalui kegiatan penerangan dan publikasi [media cetak dan elektronik] tentang tugas pokok dan fungsi serta program kerja organisasi; 7. Tertatanya Sistem Informasi Managemen LDII melalui pembangunan jejaring komunikasi dan informasi [*hardware* dan *software*] yang mampu mengkondisikan persepsi masyarakat secara luas secara positif dan kondusif untuk mengungkit *[leverage]* kinerja organisasi LDII di seluruh wilayah;	1. Kebijakan peningkatan kinerja organisasi	1.1. Penataan ulang kelembagaan 1.2. Penerapan manajemen modern 1.3. Peningkatan sumberdaya manusia organisasi 1.4. Peningkatan prasana dan sarana kerja organisasi 1.5. Penggalangan dana organisasi 1.6. Peningkatan penerangan dan publikasi 1.7. peningkatan jejaring komukasi dan informasi	Tujuan Program 1.1 s/d 1.7 dapat dilihat pada Lampiran 2

TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM	
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	TUJUAN
	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat : - Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Islam secara merata. - Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam yang Berasal dari sumber-sumber ajaran Islam yang murni	2.1 Adanya sistem penyelenggaraan pendidikan keagamaan secara baik berdasarkan kepada Al Quran dan Al Hadits; 2.2 Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah Islam untuk masyarakat Islam diseluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga masyarakat lebih mampu meningkatkan aksessibilitas terhadap materi dakwah; 2.3 Adanya peningkatan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non formal yang berkualitas untuk menyangga calon peserta didik yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi terhadap fasilitas pendidikan pemerintah; 2.4 Adanya peningkatan jumlah [kuantitas] dan kualitas pelatihan dan penyebarannya sehingga dapat menghasilkan kelompok angkatan kerja yang terampil, handal dan siap pakai; 2.5 Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli *[specialist]* dan profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif sehingga mampu akses ke pasar kerja yang semakin berkembang dan berubah setiap saat; 2.6 Tersedianya sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai dan up to date. Tercapainya Kesehatan keluarga meningkat: 1] adanya peningkatan kesehatan ibu hamil *[pregnant mother]* dan ibu yang lemah *[lactation mother]* dan bayi, 2] adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi [pangan beragam, bergizi berimbang atau 3B, pola pangan harapan atau PPH, dan pangan aman, sehat, utuh dan halal [ASUH]; 3] khusus untuk di daerah rawan pangan, kumuh danmiskin [duafa] , adanya peningkatan aksessibilitas terhadap kartu sehat, cadangan pangan masyarakat dan pemerintah melalui program *padat karya [food for work and food for asset]* dan program-program pemberdayaan *[capacity building]* lainnya.	2. Kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	2.1. Penataan pendidiakan keagaman [Al-Qur'an dan Al-Hadits] 2.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah 2.3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan [formal dan non formal] 2.4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan 2.5. Pengembangan spesialisasi dan profesionalisme SDM 2.6. Peningkatan sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM 2.7. Peningkatan kesehatan keluarga	Tujuan Program 2.1 s/d 2.7 dapat dilihat pada Lampiran 2

TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM	
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	TUJUAN
	3.Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat Islami;	3.1. Semakin meningkatnya kemampuan SDM warga LDII yang profesional dan mempunyai kemampuan [berdaya] dalam kesadaran berkonstitusi sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam menggerakkan roda reformasi pemerintahan dalam dinamika mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. 3.2. Semakin meningkatnya kemampuan SDM warga LDII yang berkiprah dalam peningkatan ketahanan nasional sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa. 3.3. Semakin meningkatnya potensi SDM warga LDII yang mampu berkiprah dalam peningkatan kesadaran hukum dan HAM. 3.4. Semakin berkembangnya berbagai upaya peningkatan Ekonomi Ummat yang dilakukan oleh SDM LDII dengan bergandengan tangan bersama pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya, antara lain dalam program memerangi kelaparan untuk mengurangi kemiskinan *[Fight hunger to reduce poverty]*.	3. Kebijakan pemberdayaan potensi LDII	3.1. Peningkatan kesadaran konstitusi 3.2. Peningkatan kesadaran ketahan nasional 3.3. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM 3.4. Peningkatan implementasi ekonomi umat	Tujuan Program 3.1 s/d 3.4 dapat dilihat pada Lampiran 2

TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM	
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	TUJUAN
	4. Meningkatnya partisipasi masyarakat Islam dalam berbagai program pembangunan bangsa dan negara.	4.1. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dan terbangunnya pola kemitraan melalui berbagai upaya peningkatan pemanfaatan sumberdaya LDII dan mitra kerja secara bersinergi dengan baik untuk meningkatkan kinerja organisasi. 4.2. Adanya manfaat yang diambil dari penerapan konsep pengarus-utamaan gender sehingga ada peningkatan kontribusi yang setara dan berkeadilan bagi wanita Islam [muslimah] dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional. 4.3. Adanya peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, korban bencana alam dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya. 4.4. Terbangunnya peranserta masyarakat dalam peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat. 4.5. Adanya kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik itu buatan maupun alami.	4. Kebijakan peran serta sosial dan kemasyara-katan	4.1. Peningkatan kerjasama dan pola kemitraan 4.2. Peningkatan pemberdayaan perempuan 4.3. Peningkatan kepedulian & kesetiakawanan sosial 4.4. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat 4.5. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup	Tujuan Program 4.1 s/d 4.5 dapat dilihat pada Lampiran 2
	5. Meningkatnya kerukunan beragama dan kesetiakawanan sosial.	5.1. Terbangunnya berbagai program kerjasama dan persaudaraan, program peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa kebanggaan nasional, dan program peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetia-kawanan sosial secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan *ukhuwah* Islamiah, wathoniah dan basyariah. 5.2. Terselenggaranya kehidupan beragama yang baik terutama 1] dalam hal kerukunan diantara sesama umat beragama dan pemerintah [tri kerukunan umat beragama], 2] pemberdayaan kehidupan beragama untuk membangun masyarakat madani yang maju, berkeadilan, maju dan sejahtera yang diridhoi oleh Alloh Subhanahu Wata'ala.	5. Kebijakan Peningkatan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama	5.1. Peningkatan *ukhuwah Islamiah, wathoniah* dan *insaniah/basyariah* 5.2. Peningkatan kerjasama lintas agama	Tujuan Program 5.1 s/d 5.2 dapat dilihat pada Lampiran 2

Lampiran 2. Matriks Tujuan Masing-Masing Program Sebagai Arahan Penyusunan Rencana Kegiatan [Action Plan] [Lanjutan Lampiran 1]

PROGRAM	
URAIAN	**TUJUAN**
1.1 Penataan ulang kelembagaan	Program ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan organisasi pada masing-masing tingkatan agar terwujud suatu kelembagaan organisasi yang kapasitasnya dapat menerapkan strategi-strateginya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya guna mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan organisasinya menuju kapasitas yang lebih tinggi
1.2 Penerapan manajemen modern	Program ini bertujuan untuk membangun suatu mekanisme dan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur mulai dari merencanakan, melaksanakan, memantau sampai pada mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi, agar melalui penerapan manajemen modern tersebut, pengelolaan sumberdaya organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
1.3 Peningkatan sumberdaya manusia organisasi	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi yang meliputi peningkatan kompetensi niat, sikap, pengetahuan, keterampilan dan fisik [traits] yang relavan dengan strategi-strategi organisasi. Pengurus organisasi dengan kompetensi yang tinggi pada gilirannya akan mampu mengelola sumber-sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
1.4 Peningkatan prasana dan sarana kerja organisasi	Program ini bertujuan selain untuk mewujudkan prasarana dan sarana kerja organisasi pada masing-masing tingkatan juga untuk meningkatkan pemanfaatan dan kemanfaatan serta memelihara keberfungsiannya untuk mendukung tugas-tugas organisasi.
1.5 Penggalangan dana organisasi	Program ini bertujuan menggalang dana dari berbagai sumber resmi tanpa melakukan ikatan-ikatan yang dapat mengancam visi, misi dan tujuan organisasi.
1.6 Peningkatan penerangan dan publikasi	Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan eksistensi dan kegiatan-kegiatan organisasi kepada para stakehorlders organisasi agar terbangun suatu persepsi positif yang diharapkan dapat berubah menjadi dukungan terhadap tujuan dan kegiatan-kegiatan organisasi.
1.7 Peningkatan jejaring komunikasi dan informasi	Program ini bertujuan untuk membangun jejaring atau hubungan kerja seluas mungkin dengan sumber-sumber data dan informasi yang relevan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Data dan informasi yang terjaring diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan dan mereposisi peran organisasi.

PROGRAM	
URAIAN	**TUJUAN**
2.1. Penataan pendidikan keagaman [Al-Qur'an dan Al-Hadits]	Program ini bertujuan untuk menata sistem pendidikan keagaman dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Hadits agar substansi kedua sumber ajaran tersebut dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada umat Islam. Sistem pendidikan keagaman yang tertata dengan baik pada gilirannya akan membentuk kecerdasan pada setiap umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara konsisten
2.2. Peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah	Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran kegiatan dakwah Islam sehingga dapat mencapai sebagian besar warga umat Islam yang bertempat tinggal di pelosok-pelosok. Kegiatan-kegiatan dakwah yang menyebar itu dilaksanakan secara berkualitas yang diindikasikan oleh mudahnya ummat Islam menerima materi dakwah.
2.3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (formal dan non formal)	Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran program pendidikan formal dan non formal yang berkualitas kepada seluruh warga Indonesia. Program ini terutama diperuntukkan bagi umat Islam yang tingkat aksesnya kependidikan milik pemerintah rendah yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan finansial mereka
2.4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan	Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penyebaran pelatihan yang berkualitas kepada seluruh warga Indonesia guna memperoleh kompetensi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program terutama peruntukkan kepada kelompok angkatan kerja guna membekali mereka dengan ketrampilan kerja.
2.5. Pengembangan spesialisasi dan profesionalisme SDM	Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, penyebaran kualitas spesialis dan professional di kalangan warga Islam, program ini terutama diperuntukan bagi warga Islam yang sudah memasuki pasar kerja namun memerlukan peningkatan keahlian dan profesionalisme agar mereka dapat memiliki keunggulan kompetitif.
2.6. Peningkatan sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM. Sarana dan prasarana yang baik dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan. Disamping itu, juga dapat meningkatkan citra organisasi.
2.7. Peningkatan kesehatan keluarga	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keluarga yang merupakan basis/unit kekuatan organisasi. Program terutama diperuntukkan pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang merupakan titik awal dalam membentuk generasi penerus yang tangguh.

PROGRAM	
URAIAN	**TUJUAN**
3.1. Peningkatan kesadaran konstitusi	Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal kesadaran konstitusi Negara Republik Indonesia. Meningkatnya jumlah warga LDII yang sadar konstitusi dapat memberikan konstribusi positif terhadap jalannya roda reformasi pemerintahan dalam dinamikanya mencapai tujuan banga dan negara.
3.2. Peningkatan kesadaran ketahanan nasional	Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan ketahanan nasional. Meningkatnya jumlah warga LDII yang memiliki ketahanan individu dan keluarga pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap ketahanan nasional yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa
3.3. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM	Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan HAM. Meningkatnya jumlah warga LDII yang sadar hukum dan HAM pada gilirannya berkontribusi positif terhadap ketertiban dan ketentraman hidup bangsa Indonesia secara keseluruhan.
3.4. Peningkatan implementasi ekonomi umat	Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan umat Islam, meningkatnya jumlah umat Islam yang keluar dari belenggu kemiskinan akan berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
4.1. Peningkatan kerjasama dan pola kemitraan	Program ini bertujuan membangun jejaring kerja baik dengan individu maupun dengan organisasi lain dalam berbagai bidang sehingga sumber daya mereka dapat bersinergi dengan sumber daya LDII dalam meningkatkan kinerja organisasi
4.2. Peningkatan pemberdayaan perempuan	Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender. Meningkatnya jumlah wanita Islam yang memiliki akses terhadap berbagai kegiatan pembangunan, akan berkontribusi terhadap program nasional tentang pengarusutamaan gender
4.3. Peningkatan kepedulian & kesetiakawanan sosial	Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat miskin, yang terkena bencana alam, dan masyarakat yang kurang beruntung lainnya. Meningkatnya jumlah ummat Islam yang keluar dari kelompok yang kurang beruntung ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

PROGRAM	
URAIAN	**TUJUAN**
4.4. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	Program ini bertujuan untuk menggalang peranserta masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan secara swakarsa. Ketertiban dan keamanan masyarakat akan lebih kondusif jika masyarakat yang merupakan bagian intergral bersinergi dengan aparat pemerintah.
4.5. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.	Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kualitas, keberadaan dan kelestarian sumberdaya ekosistem baik itu berupa lingkungan hidup buatan (pemukiman, kawasan industri dll) maupun berupa lingkungan hidup alami.
5.1. Peningkatan ukhuwah Islamiah, wathoniah dan insaniah/basyariah	Program ini bertujuan : - Meningkatkan kerjasama dan persaudaraan dikalangan umat Islam - Mengembangkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa bangga dan mandiri sebagai bangsa Indonesia, dan; - Memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah bangsa di dunia pada umumnya dan meningkatkan kesadaran, kepekaaan dan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
5.2. Peningkatan kerjasama lintas agama	Program ini bertujuan meningkatkan kehidupan beragama terutama dalam turutsertanya membina kerukunan diantara sesama umat beragama dan pemerintah (tri kerukunan umat beragama) serta meningkatkan pemberdayaan kehidupan beragama tersebut dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera yang diridhoi Alloh Subhanahu Wata'ala.

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-06/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perkembangan lingkungan strategis menuntut keterlibatan dan tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia memberikan kontribusi positif bersinergi dengan komponen bangsa lainnya untuk bersama menjawab tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ;

b. bahwa untuk menyikapi berbagai masalah yang berkembang sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, Lembaga Dakwah Islam Indonesia perlu memiliki sikap dan pandangan, serta menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam suatu Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

c. bahwa Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-04/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP-LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 13 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG POKOK - POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang harus didukung oleh segenap jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

Lampiran
Keputusan MUNAS VI LDII
Nomor : KEP-06/MUNAS VI LDII/2005
Tanggal : 13 Mei 2005

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUNAS VI LDII

I. Dasar Pertimbangan

1. Indonesia dan beberapa negara-negara di wilayah Asia Pasifik yang pernah mengalami periode *economics booming*, tiba-tiba menjelang pertengahan tahun 1997 mengalami krisis yang sangat luar biasa. Krisis yang menerpa negara-negara itu menyebabkan pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, ternyata tidak mampu menyesuaikan keadaan akibat proses liberalisasi pasar global[1], 1999, sehingga timbul serangkaian krisis yang dampaknya sampai saat ini masih terasa. Keadaan tersebut mengharuskan, bahwa **paradigma pembangunan** yang dianut pada masa lalu memerlukan adanya **perubahan** atau **penyesuaian**, yang diharapkan lebih sesuai dan lebih *antisipatif dalam menyongsong dinamika perkembangan global* yang akan terjadi di masa mendatang serta mampu pula *mengakomodasikan perkembangan aspirasi lokal.*

2. Gejala/penyebab krisis sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya tidak pernah terbaca atau terduga berdasarkan **indikator - indikator** kinerja pembangunan yang selama ini dipakai atau yang ada pada masing-masing negara terkena krisis. Paling tidak didalam membaca indikator yang ada pada saat itu, satu dengan yang lain masih terjadi perbedaan didalam menafsirkannya atau didalam melakukan analisis implikasinya.

3. Hal lain yang terjadi adalah, kekurang pekaan dari para perencana pembangunan, bahwa bersamaan dengan perjalanan waktu, telah

[1] Vinod Thomas, 1999

terjadi berbagai tuntutan perubahan pada tiga taktor ***determinant*** sumber perubahan pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Perubahan pada masing-masing tiga faktor tersebut berimplikasi pada membesar atau mengecilnya *magnitude* daya survival bangsa, yaitu[1] :

[1] faktor keyakinan yang melahirkan **paradigma - paradigma** yang akan dirujuk,
[2] faktor **sistem/organisasi** yang diberlakukan dan
[3] faktor tingkat **iptek** yang dikuasai,

[tiga faktor tersebut diatas merupakan faktor-faktor *determinant* peubah kinerja pembangunan suatu bangsa, yang dalam hal Indonesia, faktor keyakinan dalam berbangasa dan bernegara adalah Pancasila] yang dalam implementasinya terjadi dinamika di masing-masing faktor yang dapat berlangsung secara sendiri-sendiri maupun secara simultan, karena satu sama lain saling terkait dalam suatu konteks kultural – struktural. Kekurang pekaan terhadap terjadinya dinamika pada faktor – faktor tersebut, akhirnya secara kenyataan mengakibatkan krisis, yang terjadi seolah-olah tidak terduga sebelumnya.

4. Demikian pula, faktor terjadinya **kenaikan tingkat** pendidikan dan pengetahuan rata-rata masyarakat, baik yang disebabkan karena telah tersedianya sarana pendidikan yang makin merata, khususnya pada pendidikan menengah kejuruan, maupun karena terjadinya proses peningkatan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi dengan berkembangnya **teknologi informatika**, kesemuanya mempercepat terjadinya tuntutan agar beberapa faktor *determinant* yang berfungsi sebagai sumber perubahan, segera memperoleh penyesuaian – penyesuaian yang menjamin bagi proses tersalurnya **energi kreatif masyarakat.**

5. Sementara itu, terjadinya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan yang begitu banyak sebagai tuntutan perubahan di **faktor organisasi**, yang semula dimaksudkan untuk memperpendek rentang jangkauan pemerintahan agar pelayanan publik lebih efektif dan efisien, dalam kenyataannya, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan memang telah memperluas ruang kiprah bagi elit politik dan birokrasi, tetapi belum Memperluas peluang rakyat untuk menikmati pelayanan Publik yang lebih baik. Bisa dibuat perbandingan antara porsi Anggaran untuk penyelenggara pemerintahan dan untuk Peningkatan kepentingan rakyat termasuk pelayanan publik dalam **APBD**.

[1] Charles F. Andrain, 1993

6. Hal lain yang menjadi beban baru bagi bangsa Indonesia adalah keharusannya untuk mampu **menginternalisasikan faktor-faktor** yang pada paradigma sebelumnya masih dianggap sebagai faktor eksternalitas yang dapat diabaikan atau setidaknya tidak dianggap prioritas untuk ditangani, tetapi di masa mendatang faktor-faktor tersebut harus diatasi secara serentak/bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan atau penyesuaian yang secara alamiah memang harus dilaksanakan. Faktor tersebut antara lain adalah masalah HAM, lingkungan hidup, standard harmonisasi faktor sosial dan sebagainya.

7. Dalam menyikapi realitas dinamis yang terjadi tersebut, menunjukkan bahwa pada berbagai lembaga-lembaga publik maupun pada kelompok masyarakat strategis, telah ada yang melakukan perubahan-perubahan pada dirinya yang lebih bersifat **perubahan paradigmatik**, dan beberapa lainnya sedang dalam taraf proses, guna menyesuaikan dengan tuntutan perubahan agar tidak kehilangan relevansi kelembagaannya.

8. Perubahan paradigma yang termasuk mencolok adalah dari sisi moral, telah terjadi tuntutan agar pertimbangan moral menjadi arus utama pada berbagai jenis penilaian kualitas, baik pada tataran global maupun nasional.

9. Dampak lain dari perkembangan issue terorisme yang terjadi dari adanya pengeboman di beberapa tempat, secara sosial psikologis telah menyebabkan terjadinya saling curiga diantara berbagai komponen masyarakat, yang menyebabkan terjadinya peningkatan energi negatif yaitu energi yang terkuras tanpa menghasilkan produk apapun bagi anak bangsa, maupun bagi upaya pemulihan krisis multidimensional ini.

10. Dalam keadaan sebagaimana diuraikan diatas, maka pola **pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk upaya pembangunan nasional** dan **daerah** memerlukan pula penyesuaian. Disatu segi telah menghasilkan kepemimpinan nasional secara demokratis, di sisi lain harus pula menghasilkan kepemimpinan daerah yang mampu mengembangkan potensi daerahnya sekaligus menumbuhkan pengusaha nasional dan daerah yang mampu bersaing di pasar lokal dalam iklim kompetisi global, yang secara simultan juga harus menumbuhkan kemudahan iklim investasi yang tidak menimbulkan saingan yang tidak seimbang dengan pengusaha nasional/lokal/daerah.

11. Inilah masalah – masalah strategis yang memerlukan penyelesaian antisipatif menyongsong perubahan – perubahan pardigmatik yang salah satu dampak strtegisnya adalah menimbulkan era kompetisi global diseluruh pelosok dunia. Melalui pertimbangan ini, rekomendasi Munas khusus akan dititik beratkan pada usulan upaya – upaya yang perlu dilaksanakan secara bersama oleh pihak pemerintah baik pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan dan profesi agar dapat menggali potensi nasional dan daerah secara lebih komprehensif, baik dari sisi SDM nya dan SDA serta penyempurnaan dan pelengkapan infrastruktur politik, sosial dan ekonomi yang ada.

II. Rekomendasi

Dengan memperhatikan 11 butir diatas, maka MUNAS VI LDII merekomendasikan hal – hal berikut :

II.1 Bidang Moral :

1. Bahwa dengan perkembangan jumlah penduduk yang telah mencapai diatas 220 juta, maka diperlukan upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa, agar menghasilkan **akhlaq bangsa** yang berbudi luhur, yang antara lain di indikasikan dengan kesungguh – sungguhan untuk mempraktekkan nilai – nilai kejujuran secara utuh, kemampuan memegang janji/amanah, saling tolong – menolong dan mampu bekerjasama secara positif [sinergi positif].

2. Di bidang moralitas kultural, mengharapkan agar bangsa Indonesia mampu memberikan penghargaan pada **hasil karya** dan bukan se – mata-mata menghargai seseorang karena **kepemilikan materi**. Moralitas seperti ini hanya akan menghasilkan masyarakat hedonis, dan karena itu MUNAS secara serius mengharapkan agar seluruh komponen masyarakat mulai bisa menghargai karya dan bukan materi, karena karya adalah manifestasi dari kemampuan SDM untuk mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliknya secara lahiriah, sementara materi hanya memberikan sinyal yang bersifat indikatif dan bukan substantif.

3. Sejalan dengan perkembangan pada upaya penegakan nilai moral, baik pada tataran global maupun lokal, maka MUNAS LDII mengharapkan bahwa kedudukan nilai moral sebagai salah satu faktor instrumen kehidupan harus ditempatkan pada tempat yang utama dan

terdepan. Pada moralitas ini, mengedepankan kecurigaan tanpa dukungan fakta yang kuat harus dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Karena itu LDII bersama seluruh komponen bangsa lainnya merekomendasikan dan mengajak untuk membangun SDM Indonesia agar menjadi SDM yang berakhlaq mulia.

5. Munas merekomendasikan agar segenap komponen bangsa mengembangkan mentalitas yang menghasilkan tindakan yang bersifat produktif dan menghasilkan sinergi positif dan menghindarkan darimentalitas saling curiga mencurigai tanpa dasar, sehingga akhirnya secara sosial psikologis tidak mampu membedakan antara waspada, curiga, prasangka dan menuduh tanpa dasar, yang hakekatnya merupakan ketidak mampuan mengintegrasikan moral dan nalar.

6. Bila melihat masih ada pergesekan sosial yang terjadi beberapa tahun terakhir adalah pergesekan yang terkadang berbau agama, apa pun dalihnya, maka dalam menghadapi cobaan ini, berbagai komunitas harus meningkatkan kesadaran sikapnya sebagai seorang Indonesia. Masing – masing perlu mawas diri dan mengadakan instrospeksi mengapa masih terjadi pergesekan di masyarakat. Barangkali kelemahannya terletak dalam kemampuan individu – individu atau organisasi atau kelompok masyarakat yang belum mempunyai mentalitas daya penyesuaian yang tinggi sesuai dengan tuntutan moralitas yang terkandung dalam falsafah Pancasila.

II.2 Bidang Penalaran :

1. Munas LDII merekomendasikan agar di bidang budaya, perlu dikembangkan budaya kerja keras dan kecenderungan menabung semakin tinggi yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan produktivitas bangsa yang semakin tinggi. Adalah sewajarnya apabila bangsa Indonesia perlu meningkatkan *agregat output* tahunannya agar mampu mencapai target diatas kewajiban pembayaran hutangnya. Upaya ini seharusnya menjadi *committment* bangsa dalam upaya meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang bebas hutang.

2. Karena itu Munas LDII merekomendasikan agar dalam proses demokratisasi yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak

tereduksi menjadi hanya sekedar merubah mekanisme pemilihan kepemimpinan baik di tingkat nasional ataupun daerah. Proses demokratisasi, baik di bidang politik dan di bidang lainnya, hendaknya menyangkut pula dengan upaya proses – proses peningkatan kualitas partisipasi serta emansipasi, agar pada akhirnya dapat dicapai sinergi positif diantara berbagai kelompok masyarakat.

3. Dalam semangat ke Bhineka Tunggal Ika, dalam proses pemulihan krisis multidimensional ini, maka Munas LDII merekomendasikan, agar kehidupan yang penuh toleransi perlu semakin diwujudkan dan ditingkatkan dalam upaya mencapai kondisi sinergi nasional baik antar komponen masyarakat maupun internal masing – masing komponen. Untuk itu perlu lebih dikembangkan semangat dialog dan keterbukaan dalam berbagai kehidupan se-hari harinya, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui semangat musyawarah dan selanjutnya dapat dihindari kehidupan yang saling curiga yang jelas kontra produktif dan akan menghambat proses penumbuhan kondisi sinergi nasional.

4. Munas merekomendasikan sangat perlunya menumbuhkan iklim sinergi nasional sangat diperlukan dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik yang berasal dari dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri, maupun yang berasal dari faktor eksternal bangsa Indonesia. Kasus embargo dan kasus Ambalat merupakan beberapa contoh yang lebih dari cukup untuk mengingatkan bagi bangsa Indonesia agar meningkatkan upayanya menuju terwujudnya sinergi nasional diantara para komponen bangsa.

5. Dalam menyikapi keberhasilan proses Pilpres pada tahun yang lalu, maka menghadapi era pilkada, Munas LDII merekomendasikan agar dalam era Pilkada, tetap mengedepankan nilai – nilai yang luhur dalam proses pilkada tersebut, sehingga seluruh bangsa Indonesia dapat mempunyai pimpinan di segala tingkatan yang semakin *legitimate* dan semakin berkualitas, untuk itu kepada segenap komponen masyarakat agar bersikap semakin taat hukum dan peraturan yang ada dalam menerima apapun hasil – hasil pilkada, sehingga bangsa Indonesia dapat mencapai predikat bangsa yang telah dewasa dalam berdemokrasi. Khusus terhadap partisipasi jajaran kepengurusan LDII di daerah – daerah yang menghadapi Pilkada, maka Munas merekomendasikan agar dukungan terhadap para calon diserahkan pada keputusan masing – masing pribadi warga ataupun simpatisan LDII.

6. Munas LDII mengharapkan agar seluruh komponen masyarakat dalam semangat efisiensi, merekomendasikan agar masing – masing komponen bangsa melakukan upaya penghematan melalui upaya menaikkan *lifetime* seluruh instrumen fisik penunjang kehidupan baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, agar dapat dicapai peningkatan penghematan nasional.

7. Dalam menyikapi terjadinya bencana di berbagai wilayah Indonesia ini, maka Munas LDII merekomendasikan perlu ditingkatkannya rasa solidaritas nasional, sehingga nilai dan semangat mewujudkan kondisi **yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit, yang berada di daerah aman membantu yang berada di daerah musibah,** pada akhirnya dapat menumbuhkan tingkat ketahanan nasional yang semakin meningkat dan berkelanjutan.

8. Dalam rangka keberlanjutan bangsa Indonesia baik secara fisik ataupun secara kualitas SDM, maka MUNAS LDII merekomendasikan agar para orang tua dapat lebih meningkatkan perhatian pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkemampuan *problem solver*, sehingga sebagai bangsa senantiasa dapat mewariskan pada generasi penerusnya suatu kondisi yang semakin baik. Kewajiban mewujudkan dan meningkatkan SDM yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk pada tataran keluarga.

9. Mengamati berkembangnya berbagai masalah kesehatan akhir – akhir ini, maka Munas merekomendasikan perlunya dikembangkan sistim pelayanan kesehatan ibu dan anak, agar sejak dini kualitas kesehatan generasi penerus telah dijaga semenjak berada dalam proses awal terbentuknya janin, yang dengan demikian pada akhirnya dapat dilahirkan SDM yang diharapkan paling tidak telah mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang relatif telah lebih tinggi dan mempunyai potensi intelegensia yang semakin meningkat.

10. Dalam tataran keluarga, Munas LDII merekomendasikan terwujudnya program keluarga yang mengamalkan perintah agama yang terkait dengan kebersihan fisik, bersih dari pornografi dan pornoaksi.

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-07/MUNAS VI LDII/2005

TENTANG

PENGESAHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi telah menetapkan diselenggarakannya pemilihan secara langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 ;

b. bahwa dari pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah memilih Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2005 - 2010 ;

c. bahwa Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, bersama dengan 3 [tiga] orang dari unsur Dewan Pimpinan Daerah Propinsi yang dipilih dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ditetapkan menjadi Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

d. bahwa pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir b dan c di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-02/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

3. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-04/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

4. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-05/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Rencana Strateji Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005 - 2010 ;

5. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-06/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pernyataan dan Rekomendasi Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

6. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/RAPIMNAS/LDII/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Penundaan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perpanjangan Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

7. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-074/DPP-LDII/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan: Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010 DAN PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pasal 1

Mengangkat dan mengesahkan Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010.

Pasal 2

Membentuk Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dengan susunan sebagai berikut

1.	Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc	:	Ketua
2.	Drs. Nurhamid Hadi	:	Sekretaris
3.	DR. Ir. Krishna P. Chandra, M.S	:	Anggota
4.	Abdussalam Polanunu, S.Pd	:	Anggota
5.	Drs. H. Achmad Suarno, M.M. PhD	:	Anggota

Pasal 3

Memberi mandat kepada Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini untuk :

1. menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasihat Ttingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010;

2. menetapkan komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Pimpinan Munas

1. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc : Ketua, merangkap Anggota
2. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc : Sekretaris merangkap Anggota
3. Drs. HM. Hidayat Nahwi Rasul : Anggota
4. Ir. Hasan Busyairi : Anggota
5. Ir. H. Muhammad Nurchozim : Anggota
6. H. Selamat, S.H. : Anggota
7. Drs. La Alimuddin, M.Si : Anggota

KEPUTUSAN

FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENASIHAT TINGKAT PUSAT DAN PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia diberi mandat penuh untuk menentukan komposisi dan susunan personil Dewan Penasihat Tingkat Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Masa Bakti 2005 - 2010 ;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, cakap dan mampu mengemban amanat dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Dewan Penasihat Tingkat Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 ;

c. bahwa oleh sebab itu perlu ditetapkan Keputusan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pengesahan Susunan Dewan Penasihat Tingkat Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010.

Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

2. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-02/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

3. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-04/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

4. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-05/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Rencana Strateji Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005 - 2010;

5. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-06/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

6. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-07/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 13 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENASIHAT TINGKAT PUSAT DAN PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010.

Pasal 1

Mengangkat dan mengesahkan susunan Dewan Penasihat Tingkat Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Memberikan amanat, berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Dewan Penasihat dan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini sesuai funginya masing-masing.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2005

FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1. Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc : Ketua,
2. Drs. Nurhamid Hadi : Sekretaris merangkap anggota
3. DR. Ir. Khrisna P. Chandra, M.S : Anggota merangkap anggota
4. Abdussalam Polanunu, S.Pd : Anggota merangkap anggota
5. Drs. H. Achmad Suarno, M.M. PhD : Anggota merangkap anggota

Lampiran
Keputusan Formatur
Musyawarah Nasional VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

1. SUSUNAN DEWAN PENASIHAT TINGKAT PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010

Ketua	:	Drs. H. Ahmad Suarno, MM, PhD
Wakil Ketua	:	K.H. Kasmudi Asshidqy
Wakil Ketua	:	Ir. H. Kemal Mertohadidjojo, MBA, M.Sc.
Sekretaris	:	H. Ahmad Alfurqon Ngaino , S.H., MM.
Anggota	:	1. Ir. H. Jusuf Harahap, M.E.
		2. KH. Abdul Syukur
		3. H. Hasan Bishri
		4. DR. H. Bambang Kusumanto, MA
		5. H. Andi Amier Hamzah, SSP
		6. Drs. H. Bambang Sukamto, S.E, MM.

2. SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010

Ketua Umum	: Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua	: 1. Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T. 2. HR. Sunaryo Siswowardoyo, SH. MM 3. H. M. Soehartono Rijadi, MBA 4. H. Achmad Kuntjoro,S.E., MBA 5. Ir. H. Zainal Asyikin Abbas 6. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc 7. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA 8. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc 9. DR. Ir. H. Shobar Wiganda, M.Sc 10. H. Ashar Budiman, SE
Sekretaris Jenderal	: H. Muhammad Sirot, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: 1. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si 2. Ir. H. Djoko Padmono, M.Si. 3. Ir. H. Eddy Supriadi 4. Drs. H. M. Hidayat Nahwi Rosul 5. H. Supriasto, S.H., M.H.
Bendahara	: H. Moch. Sidik Waskito, B. Sc
Wakil Bendahara	: 1. H. Ide Kusnadi, BA 2. H. Dody Taufiq Wijaya, Ak, M.Com

FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1. Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc	: Ketua,	
2. Drs. Nurhamid Hadi	: Sekretaris merangkap anggota	
3. DR. Ir. Khrisna P. Chandra, M.S	: Anggota merangkap anggota	
4. Abdussalam Polanunu, S.Pd	: Anggota merangkap anggota	
5. Drs. H. Achmad Suarno, M.M. PhD	: Anggota merangkap anggota	

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1. **Nomor KEP-001/DPP LDII/V/2005**
   tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 – 2010

2. **Nomor KEP-074/DPP LDII/II/2005**
   tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005

3. **Nomor KEP-075/DPP LDII/II/2005**
   tentang Komposisi Personalia Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-001/DPP LDII/V/2005

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 - 13 Mei 2005 telah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk melaksanakan konsolidasi dan penyesuaian struktur organisasi di seluruh jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Rencana Strateji dan keputusan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu dibentuk susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang solid dan dapat bekerja secara kolegial, serta bersedia melaksanakan tugas-tugas organisasi secara maksimal ;

c. bahwa personil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas-tugas organisasi yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010 ;

d. bahwa susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : a. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-04/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

b. Keputusan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-07/MUNAS VI LDII/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 – 2010 dan Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ;

c. Keputusan Formatur Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pengesahan Susunan Dewan Penasihat Tingkat Pusat dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2005 - 2010.

Memperhatikan: Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 18 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2005 - 2010.

Pasal 1

Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Memberikan amanat, berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2005 - 2010 untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan program kegiatan sesuai fungsinya masing-masing.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc

Sekretaris Jenderal,

H. Muhammad Sirot, S.H.

Lampiran
Keputusan DPP LDII
Nomor : KEP-001/DPP LDII/V/2005
Tanggal: 18 Mei 2005

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN MASA BAKTI 2005 - 2010

I. DEWAN PENASIHAT

Ketua	: Drs. H. Ahmad Suarno, M.M, Ph.D
Wakil Ketua	: KH. Kasmudi Asshidqy
Wakil Ketua	: Ir. H. Kemal Mertohadidjojo, MBA, M.Sc.
Sekretaris	: H. Ahmad Alfurqon Ngaino , S.H., M.M.
Anggota	: 1. Ir. H. Jusuf Harahap, M.E.
	2. KH. Abdul Syukur
	3. H. Hasan Bisri
	4. DR. H. Bambang Kusumanto, MA
	5. H. Andi Amier Hamzah, S.SP
	6. Drs. H. Bambang Sukamto, S.E, M.M.

II. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	: Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua	: 1. Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T.
	2. HR. Sunaryo Siswowardoyo, SH. MM
	3. H. M. Soehartono Rijadi, MBA
	4. H. Achmad Kuntjoro,S.E., MBA
	5. Ir. H. Zainal Asyikin Abbas
	6. Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc
	7. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA
	8. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc
	9. DR. Ir. H. Shobar Wiganda, M.Sc
	10. H. Ashar Budiman, SE
Sekretaris Jenderal	: H. Muhammad Sirot, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: 1. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si
	2. Ir. H. Djoko Padmono, M.Si.
	3. Ir. H. Eddy Supriadi
	4. Drs. H. M. Hidayat Nahwi Rosul
	5. H. Supriasto, S.H., M.H.
Bendahara	: H. Moch. Sidik Waskito, B. Sc
Wakil Bendahara	: 1. H. Ide Kusnadi, BA
	2. H. Dody Taufiq Wijaya, Ak, M.Com

III. DEPARTEMEN - DEPARTEMEN

1. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi

Ketua : H. Muhammad Ied, S.E.

Anggota : H. Isrujito, S.H.
Ir. H. Kemal Pasya
H. Agus Mundjahit, BA
Drs. Teteng Jumara, M.M.
Wira Supardi, S.E.
Ir. H. Paidjo
Herlan Maulana Muhammad, S.Sos

2. Departemen Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri

Ketua : A. A. Ngurah Bagus Samudra Aryawan, S.E.

Anggota : H. Tri Gunawan Hadi. S. Sos.
H. Sabaruddin Roestam, S.H.
Noerwahjudin, S.T.
H. Jamaludin Mahmud, S.H.
Yapto Sendra, S. Sos.
H. Muhammad Farid AlJawi, S.E.
H. Semoga Jaya M.S. Bc. KU
Hj. Trisna Wardani, S.E.
H. Ponco Budiman S. Sos.

3. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media

Ketua : Rully Kuswahyudi, S.Sos

Anggota : H. Joko Haryanto, S.E.
Hj. Ida Daniar Royani
Ibnu Anwaruddin, S.H.
Ludhy Cahyana, S.Sos

Tuti, MBA
Drs. Untung Maulana
Ir. H. Edy Irawan Setianto
Pahala Sibueya, S.Kom.

4. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah

Ketua : Drs. KH. Thoyibun, S.H., M. Ag., M.M.
Anggota : KH. Aceng Karimullah, B.E., S.E.
KH. M. Daldiri Ariyanto, S.Ag.
KH. A. R. Amirrudin, S.Ag.
KH. M. Agus Salim, S.Ag.
Drs. H. Mansur Pribadi, S.Ag. MM.
Drs. KH. Muhammad Irsyad Rosyidi
KH. Ubeyd Choiri
Drs. KH. Suprapto
Ir. H. Anton Subekti
Drs. H. Buwono

5. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan

Ketua : DR. Ir. H. Rorim Pandey
Anggota : Drs. H. Bambang Purnomo, MBA, M.M.
Drs. Sardji, M.Pd
Ir. Edwin Sumiroza
Drs. Edi Rachman, M.Kes.
Ir. H. M. Nursution
H. Aswin Arbyansha Ratu Langie
Drs. H. Budiyono, M.Si.

6. Departemen IPTEK, Lingkungan Hidup dan Kajian Strategis

Ketua : Prof. DR. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.

Anggota : DR. H. Amir Musadad, M.Sc.

Drs. H. Basseng, M.ED.

Ir. H. Zulfi Hadi

H. Ruli Bernaputra

Ir. Ahmad Fauzi Abdillah

Ir. H. Budi Rahayu

Ir. H. Joy Nugroho, M.Eng.

Ir. H. Hermanu Wijaya, M.S.

7. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : H. Rahmatullah, S.E., Ak., MBA

Anggota : Drs. H. Subiyanto, S.H., M.H.

Drs. H. Bachrun Idris

Ir. H. Iwan A. Wibowo

Ir. H. Trisulo, M.M, MBA

H. Hasyim Nasution, S.E.

H. Andri Krisnanto, SE, MSM

Drs. H. Budi Priyadi, M.M.

8. Departemen Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya

Ketua	:	Ir. H. Adityo Handoko, M.M
Anggota	:	Ir. H. Azhar Aryanto
		dr. H. Lutfi Hardiyanto
		H. Adi Dharma, B.A.E.
		Medy Restu Wardhana Mukri
		H. Edi Sudarnoto, S.H.

9. Departemen Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia

Ketua	:	H. Samsuri, S.H., M.M
Anggota	:	H. Didik Tondo Susilo, S.H., M. Si.
		Hari Murti Agung Purwanto , S.H.
		H. Turaji Mentorejo, S.Pd, S.H.
		Wa Ode Nur Zainab, S.H.
		Rioberto Sidauruk, S.H.
		Hari Sumiarto, S.H.
		Rusman Hidayat, S.H.
		Iwan Setiawan Warganegara, S.H.
		Rizon Alisyahbana, S.H.

10. Departemen Pemberdayaan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga

Ketua	:	Hj. Andi Datja Patoppoi, S.H., M.H.
Anggota	:	Dra. Hj. Sri Tutini Sanusi KR
		Hj. Nurul Hidayah Mulyono
		Hj. Suzana Rudi Setiabudy
		Ir. Hj. Sri Tresnahati Ashar
		Ir. Hj. Titi Amantari
		Hj. Etty Sabariah Wuryanto

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc

Sekretaris Jenderal,

H. Muhammad Sirot, S.H.

KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-074/DPP LDII/II/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, akan diselenggarakan di Jakarta;

b. bahwa hasil musyawarah Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah menetapkan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005;

c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII.

3. Rekomendasi Rapat Pimpinan [RAPIM] Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 26-27 Mei 2004.

Memperhatikan : Pendapat dan saran yang dikemukakan dalam musyawarah pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 14 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI LDII TAHUN 2005.

Pasal 1

Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005, untuk selanjutnya dalam keputusan ini disingkat MUNAS VI LDII 2005, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-13 Mei 2005.

Pasal 2

[1] Tema MUNAS VI LDII 2005 adalah :
"Melalui Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Kita Wujudkan Indonesia yang Berdaulat dan Bermartabat"

Pasal 3

Dalam MUNAS VI LDII 2005 akan dibahas materi yang terdiri dari :
[1] AD/ART LDII
[2] Program Umum LDII / Rencana Strateji LDII
[3] Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP LDII periode 1998-2005
[4] Rekomendasi

Pasal 4

Peserta MUNAS VI LDII 2005 terdiri dari :

[1] Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat LDII
[2] Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi masing-masing 2 orang [Ketua dan Sekretaris]
[3] Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing 1 orang Ketua
[4] Unsur Penasihat DPP LDII
[5] Unsur lain yang dianggap perlu oleh DPP LDII.

Pasal 5

[1] Penanggung jawab MUNAS VI LDII 2005 adalah DPP LDII.

[2] Untuk persiapan dan pelaksanaan MUNAS VI LDII 2005 akan dibentuk suatu panitia yang susunan dan personalianya ditetapkan dengan Keputusan DPP LDII secara terpisah.

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan MUNAS VI LDII 2005 ditanggung oleh DPP LDII.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP LDII.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc

Sekretaris Jenderal,

H. R. Sunaryo Siswowardoyo, S.H. M.M.

KEPUTUSAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

NOMOR : KEP-075/DPP LDII/II/2005

TENTANG

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 11-13 Mei 2005 di Jakarta;

b. Bahwa untuk menunjang agar Musyawarah Nasional tersebut berlangsung dengan lancar dan sukses, diperlukan suatu keputusan tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang Panitia Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII.

3. Rekomendasi Rapat Pimpinan [RAPIM] Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 26-27 Mei 2004.

4. Keputusan DPP LDII Nomor : KEP-74/DPP LDII/II/2005, tentang Pelaksanaan Munas VI LDII 2005.

Memperhatikan: Hasil musyawarah dan rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Panitia Musyawarah Nasional VI LDII 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL VI LDII 2005.

Pasal 1

Membentuk kepanitiaan MUNAS yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

Pasal 2

Tugas panitia pengarah adalah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi MUNAS, sedangkan tugas panitia pelaksana adalah melaksanakan tata penyelenggaraan MUNAS sebaik-baiknya.

Pasal 3

Panitia pengarah dan panitia pelaksana bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP LDII.

Pasal 4

Komposisi dan personalia panitia pengarah dan pelaksana MUNAS adalah seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini bila dipandang perlu dapat diatur selanjutnya oleh DPP LDII.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.	H. R. Sunaryo Siswowardoyo, S.H. M.M.

Lampiran
Keputusan DPP-LDII
Nomor : KEP-075/DPP-LDII/II/2005
Tanggal : 20 Februari 2005

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

I. Penanggungjawab : Ketua Umum DPP LDII
Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

II. Panitia Pengarah [*Steering Committee*]

Ketua	:	HR. Sunaryo Siswowardoyo, SH. MM.
Wakil Ketua	:	Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T.
Sekretaris	:	Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Wakil Sekretaris	:	Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA.
Anggota	:	Drs. H. Ahmad Suarno, MM. PhD.
		H. Ahmad Alfurqon, SH. MM.
		Ir. Kemal Mertohadidjojo, MBA, M.Sc.
		H. Andi Amier Hamzah, SSP.
		H. M. Soehartono Rijadi, MBA.
		H. Achmad Kuntjoro, S.E., MBA.
		DR. H. Bambang Kusumanto, MA.
		Ir. H. Zainal Asyikin Abbas.
		Drs. H. Bambang Sukamto, S.E., M.M.
		H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.
		Ir. Chriswanto Santoso, M.Sc.
		Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si
		H. M. Sirot, SH.
		H. Muhammad Ied, SE.
		Rully Kuswahyudi, S.Sos.

III. Panitia Pelaksana [*Organizing Committee*]

Ketua	:	H. Achmad Kuntjoro, SE. MBA.
Wakil Ketua	:	drh. H. Chaidir Taufik
Sekretaris	:	Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si
Wakil Sekretaris	:	Samudra Aryawan, S.E.
Bendahara	:	H. Moch. Sidik Waskito, BSc.
Wakil Bendahara	:	H. Samsuri, SH. MM.
Koordinator Bidang I	:	H. Muhammad Ied, S.E.
Sie Kesekretariatan	:	Suparno Yahya
		Mujiyarto Kusdiono, S.Kom.
		Rohmat Nurhadi, ST.
		Arief Nurokhim, SH.
		Teguh Prayogo, SE.
		Drs. Edy Sularno
		Eko Budiono
		Herry Budiarto
		Kiky Hadi Firmansyah, S.Hut.
Sie Acara dan Persidangan	:	Ir. H. Adityo Handoko, MM.
		Syamsul Hilal, S.Si.
		Drs. Sarji Faisal, M.Pd.
		H. Nurrohmat
		M. Noerwahjudin
		H. Tri Gunawan Hadi
		Dwi Cahyono Susilo

Koordinator Bidang II	:	*Rully Kuswahyudi, S.Sos.*
Sie Akomodasi dan Konsumsi	:	H. Jendro Hidayat H. Bambang Sumadi H. Dalyono Danny Yunus Budi Fauzan
Sie Dekorasi	:	H. Tavip Herlambang Yuditia Warman Opy Yudini
Sie Perlengkapan	:	Anggoro Bayu Sidiq H. Sarjono H. Sabarudin Rustam, SH.
Sie Dokumentasi dan Publikasi	:	Eko Mugianto Muslih Godo Ratman Drs. Untung Maulana
Sie Humas dan Media Massa	:	Ludhy Cahyana, S.Sos Ibnu Anwar, SH. H. Joko Hariyanto, S.E Meddy Restu Wardhana
Koordinator Bidang III	:	H. M. Sirot, SH.
Sie Keamanan	:	H. Bambang Tri Asep Wahdiana Dany AM. Sunardi Sugiardi 30 orang anggota Senkom

Sie Kesehatan	:	dr. H. Agus Sudrajat dr. Lutfi Hardiyanto H. Suhardi Kasdu Teguh
Sie Transportasi	:	Yitno H. Ferry Fadil Fauzianto Supriyatna Moch. Arzaqi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc

Sekretaris Jenderal,

H. R. Sunaryo Siswowardoyo, S.H.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SAMBUTAN

- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LDII
  Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc
- Ketua DPR RI
  H.R. Agung Laksono

PENGARAHAN

- Ketua Komisi II DPR RI
  Drs. Ferry Mursyidan Baldan
- Menteri Dalam Negeri RI
  Letjen TNI (Purn) Moch. Ma'ruf, SE
- Jaksa Agung RI
  Abdul Rahman Saleh, SH, MH.
- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  DR. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H. LLM
- Ketua PB Nadhatul Ulama
  DR Ir. H. Andi Jamaro, M.Sc
- Guru Besar Filsafat dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
  Prof. DR. Komaruddin Hidayat
- Wakil Rektor Universitas Paramadina
  DR. Yudi Latif

LAIN-LAIN

- SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN dari Mabes POLRI
- Doa Penutupan MUNAS VI LDII Tahun 2005
- Foto Galeri MUNAS VI LDII Tahun 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

SAMBUTAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Disampaikan oleh :

Prof. DR. Ir. KH. ABDULLAH SYAM, M.Sc

Ketua Umum LDII

pada

PEMBUKAAN
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DI HOTEL MILLENNIUM
JAKARTA, 11 MEI 2005

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ، أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ ، اَمَّا بَعْدُ :

Yth. Bapak Ketua DPR RI,
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI atau yang mewakili,
Yth. Bapak Jaksa Agung RI atau yang mewakili,
Yth. Anggota Komisi-1 dan Ketua Komisi-2 DPR RI,
Yth. Bapak Ketua KOMNASHAM,
Yth. Bapak Ketua PBNU atau yang mewakili,
Yth. Para Ulama, Ketua Partai, Ketua ORMAS, Tokoh Masyarakat, para undangan dan peserta MUNAS yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Alloh Subhanahu Wataa'la atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salamnya kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sollallohualaihi Wassalam, para keluarga dan para sahabatnya serta para ulama sebagai warosatulambia.

Tidak lupa juga kepada Ibu-ibu, Bapak-bapak, para perwakilan eksekutif, legislatif, yudikatif, pemimpin partai politik, pemimpin organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, para undangan baik dari unsur pengurus organisasi maupun unsur pembina pondok-pondok pesantren

seluruh indonesia, dan pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada acara ini, sehingga sebagaimana kita saksikan bersama acara ini dapat berjalan tanpa halangan yang cukup berarti. Untuk itu kami ucapkan Alhamdulillah jaza kumullohu khoiron. Semoga Alloh memberikan pahala dan ganjaran yang barokah.

Ibu-ibu, Bapak-bapak peserta MUNAS serta hadirin yang berbahagia,

Mari sejenak kita renungkan, betapa jaman ini telah berubah begitu cepat bahkan kadang di luar dugaan kita semua. Arus globalisasi telah merambah ke setiap pelosok tanah air dengan segala konsekuensinya. Penyebaran nilai-nilai universal semakin tidak terbendung, terutama dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini. Kita tidak memungkiri adanya hal-hal yang positif dari nilai-nilai universal tersebut seperti dijunjungnya prinsip-prinsip demokrasi, ditegakannya nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai-nilai moral bangsa, namun kita juga perlu mewaspadai hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara kita.

Sebagai bangsa yang berdaulat, kita berhak untuk menentukan arah dan tujuan negara kita, yaitu bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, komponen bangsa, baik pihak-pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, parpol, ormas, LSM, pelaku ekonomi dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhoi Alloh subhanahu wata'ala.

Hadirin dan para peserta MUNAS yang kami hormati,

Kesatuan dan persatuan sebagaimana saya sebutkan di atas bukan berarti kita harus sama, tidak ada perbedaan dalam segala hal, itu tidak! Justru perbedaan-perbedaan yang ada harus dapat saling memperkuat untuk tercapainya tujuan bersama. Sebagai contoh pada praktek kehidupan berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan parpol, dan lain-lain itu justru merupakan manifestasi *checks* and *balances*, sehingga tidak ada pihak yang berjalan semaunya sendiri dan selalu ada yang mengingatkan kalau ada kekeliruan. Dengan demikian tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara dapat tercapai.

Demikian juga penegakan nilai-nilai **hak asasi manusia**, nampaknya perlu labih disosialisasikan secara lebih intensif, sehingga mereka tidak

hanya menuntut hak-haknya saja, tetapi juga harus bisa menghormati hak-hak orang lain. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia ini, maka hukum haruslah ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan demikian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara secara adil. Disini pemerintah mempunyai peran yang sangat penting, lebih-lebih aparatur penegak hukum dan lembaga legislatif.

Peserta MUNAS,serta hadirin yang berbahagia,

Ijinkanlah kami untuk lebih mengelaborasi tentang kehidupan berdemokrasi dalam kaitannya dengan upaya penguatan **masyarakat madani** [*civil society*]. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi sebagai suatu sistem ditandai dengan adanya pemilihan umum yang jujur dan adil, penyediaan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara tanpa diskriminasi, penciptaan aturan main [*rule of the game*] yang disepakati bersama serta dijunjungnya nilai-nilai dan etika politik yang bermartabat.

Alhamdulillah kita bersyukur bahwa serentetan proses demokrasi telah kita laksanakan bersama dan kita saksikan adanya proses pendewasaan berpolitik bangsa Indonesia yang sangat mencengangkan dunia, yaitu terselenggaranya Pemilihan Umum secara langsung baik untuk legislatif maupun eksekutif [Presiden dan Wakil Presiden] untuk pertama kalinya di negara berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa ini. Meskipun demikian kita tetap menyadari bahwa Pemilu langsung bukan tujuan demokrasi itu sendiri, tetapi paling tidak dengan mengikuti terus proses pembelajaran berdemokrasi ini suatu saat dapat kita temukan nilai-nilai demokrasi yang menjadi dambaan setiap individu bangsa dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama.

Demikian juga patut kita syukuri bahwa ruang partisipasi publik telah berangsur-angsur terbuka luas terutama dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan pers yang berbasis pada moral dan etika bangsa Indonesia. Selanjutnya, hak-hak sipil dan politik warga negara secara berangsur-angsur telah menunjukan kemajuan, sehingga pada akhirnya nanti tidak ada golongan yang dimarjinalkan dan menjadi warga negara kelas dua. Sedangkan adanya *"rule of the game"* serta dijunjungnya etika politik kita terus upayakan agar tercapai hasil yang lebih baik yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akal sehat.

Apabila proses demokratisasi berjalan dengan baik, maka paling tidak pilar-pilar demokrasi bagi masyarakat ekonomi [*economic society*] dan masyarakat madani [*civil society*] akan tumbuh subur sehingga dapat menjadi

partner pemerintah dalam mewujudkan negara yang menyejahterakan masyarakat [*welfare state*].

Ibu-ibu/Bapak-bapak,hadirin yang kami hormati,

Dalam konteks peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan, maka kiranya perlu upaya-upaya yang sistematis dalam rangka penguatan *civil society* sebagai salah satu pilar demokrasi. Ormas atau *civil society* merupakan salah satu *stake holder* dalam sistem politik demokratis, selain lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga negara lainnya serta pers. Oleh karena itu ormas menjadi mitra sekaligus penyeimbang dari *stake holders* yang ada di sebuah tatanan sistem politik demokratis. Peran ormas lainnya yaitu sebagai agen perubahan sosial sekaligus agen pembaharu bagi terciptanya idenditas masyarakat yang mengetahui hak-hak sipil yang dimilikinya. Demikian juga ormas dapat memerankan diri sebagai agen pemersatu dalam sebuah wadah negara yang plural seperti Indonesia.

Dengan *civil society* yang kuat berarti masyarakat sudah berdaya sehingga dengan adanya ruang partisipasi publik yang luas dan terbuka di alam demokrasi ini, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Kuatnya *civil society* sama sekali bukan ancaman bagi negara. Tetapi justru merupakan mitra/partner yang kritis menjalankan fungsi kontrol dalam menyikapi secara positif kebijakan-kebijakan publik dan keputusan-keputusan strategis sehingga pengelolaan negara dapat berlangsung secara baik dan benar.

LDII sebagai unsur *civil society*, maka peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan sebagai wadah peran-serta masyarakat *[community participation]* dalam pembangunan nasional dan sebagai sarana penyalur aspirasi anggotanya hendaknya dapat ditingkatkan lagi sejalan dengan alam demokrasi yang sedang tumbuh sekarang ini.

Hadirin dan para peserta MUNAS yang kami banggakan,

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai ormas Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, senantiasa mengharapkan adanya kerjasama antar sesama komponen bangsa sehingga tercipta sinergi positif dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Perbedaan-perbedaan yang ada diantara sesama anak bangsa hendaknya dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan, bukan sebaliknya malah menjadi benih perpecahan. Menurut sejarahnya, masyarakat kita memang sudah majemuk, heterogen, plural, penuh perbedaan-perbedaan. Mari kita jadikan perbedaan yang ada sebagai aset bangsa, sesuai sabda Nabi Muhamad sollallohu alaihi wassalam yang artinya, bahwa sesungguhnya perbedaan-perbedaan di antara umatku adalah rohmat.

Pada kesempatan ini, ijinkan kami mengajukan permohonan, kiranya Bapak HR Agung Laksono Ketua DPR-RI berkenan membuka Munas VI LDII, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Demikianlah sambutan kami, mohon maaf apabila ada ungkapan yang kurang berkenan.

Wasalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Jakarta, 11 Mei 2005



Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua Umum



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

Disampaikan oleh :

H. R. AGUNG LAKSONO

Ketua DPR RI

DISAMPAIKAN DALAM
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
JAKARTA, 11-13 MEI 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Para Peserta Munas VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,

Suatu kebahagiaan bagi saya dapat berada di tengah-tengah Saudara hari ini dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional [Munas] VI yang dilakukan oleh salah satu organisasi massa [ormas] di Indonesia, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII]. Munas tahun 2005 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LDII.

Sesuai permintaan Ketua Umum LDII, dalam forum ini akan saya uraikan tentang "Peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penegakan Nilai-nilai Demokrasi". Mudah-mudahan uraian saya ini dapat menjadi masukan, dan bahan diskusi/telaah bagi saudara-saudara peserta MUNAS dalam menindaklanjuti kebijakan ke depan, untuk turut serta mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Dalam uraian, saya bagi dalam beberapa bab, sebagai berikut:

I. Pendahuluan;
II. Nilai Demokrasi;
III Peran Ormas atau Organisasi Masyarakat Sipil dalam Negara Demokrasi;
IV. Penutup.

I. Pendahuluan

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan [Ormas] yang hingga saat ini secara *de-jure* masih dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentangKeormasan, sangat diperlukan dalam sebuah sistem politik demokratis seperti di Indonesia. Namun, memang diakui bahwa landasan hukum yang mengaturnya tidak relevan, mengingat perkembangan sistem politik Indonesia kontemporer, di mana pada UU No. 8 Tahun 1985 masih menggunakan paradigma lama yang bersifat otoriter dan membatasi ruang gerak organisasi kemasyarakatan yang ada, sementara itu pada saat ini telah berubah paradigmanya menjadi paradigma demokratis, sesuai era reformasi.

Melihat perkembangan di alam demokrasi ini, maka kehadiran Ormas yang oleh beberapa kalangan disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM], merupakan sebuah keniscayaan. Dalam sebuah sistem politik suatu bangsa, kehadiran berbagai elemen sangat perlu demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri. Dan Ormas atau *civil society* merupakan salah satu *stake holder* dalam sistem politik demokratis tersebut, selain elemen suprastruktur [Pemerintah, DPR dan lembaga negara lainnya dan pers]. Oleh karena itu, Ormas menjadi mitra sekaligus **penyeimbang** dari *stake holders* yang ada di sebuah tatanan sistem politik demokratis.

Hubungan negara dengan masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Ormas atau *civil society* di era reformasi mengalami sebuah transformasi yang cepat dan besar. Salah satunya dapat dilihat dari semakin kuatnya peran masyarakat sipil di dalam mengorganisasikan dirinya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya ketika berhadapan dengan negara, atau mengisi ruang pelayanan publik yang tidak dapat diisi oleh negara, Pemerintah, DPR, beserta lembaga negara lainnya. Hal yang berbeda dialami ketika masa pemerintahan yang lalu, yang berkuasa selama sekitar 32 tahun.

Melihat perubahan yang begitu cepat terutama sejak tahun 1998 ketika terjadi dorongan kuat untuk melakukan perubahan, maka organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi masyarakat sipil melakukan proses **penguatan** sekaligus **pemberdayaan diri** *[self empowerment]*. Oleh karena itu, sebagai sebuah kelompok kepentingan, ormas atau *civil society* memiliki peran dalam proses pengembangan nilai-nilai demokrasi, yaitu

nilai-nilai **kesetaraan** dan **partisipasi publik** dalam setiap proses pengambilan keputusan termasuk dalam hal memilih pemimpin negara.

II. Nilai Demokrasi

Salah satu nilai demokrasi yang fundamental adalah adanya partisipasi dari segenap unsur atau elemen bangsa dalam proses pengambilan kebijakan, tidak terkecuali masyarakat secara perorangan maupun secara berkelompok. Nilai demokrasi yang seperti itu memberikan ruang kepada publik untuk ikut memberikan masukan sekaligus mengontrol atas apa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan di tingkat suprastruktur politik baik Pemerintah, lembaga perwakilan maupun lembaga-lembaga negara demokratis lainnya.

Keterlibatan banyak pihak dalam sebuah proses politik menjadi ciri dari sistem demokrasi. Sebab, demokrasi sendiri memiliki makna yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh banyak pihak, yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga formal negara sebagai suprastruktur politik, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Selain itu, demokrasi melibatkan juga partisipasi aktif masyarakat terutama yang direpresentasikan dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat sebagai infrastruktur politik, yang memiliki tugas utama memberikan **input** sekaligus memberikan kontrol atas kebijakan yang diproses dan diputuskan.

III. Peran Ormas atau Organisasi Masyarakat Sipil dalam Negara Demokratis

Dalam sistem politik demokratis, kedudukan masyarakat ditempatkan pada posisi yang cukup tinggi dalam tatanan proses perumusan kebijakan di tingkat negara. Pelibatan masyarakat yang seringkali diwakili oleh kelompok-kelompok kepentingan *[interest group]* yang sekaligus bertindak sebagai kelompok penekan *[pressure group]* dirasakan cukup efektif mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang dilakukan negara [Pemerintah dan DPR]. Tetapi, muncul pertanyaan mendasar yaitu sejauh mana proses penguatan peran masyarakat melalui ormas-ormas yang ada, seperti LSM [Lembaga Swadaya masyarakat] atau CSO *[Civil Society Organization]*, organisasi non pemerintah [Ornop] atau NGO *[non-government organization]* yang bergerak di banyak sektor, seperti keagamaan, kepemudaan, perburuhan, lingkungan, perlindungan anak, perlindungan tenaga kerja, perlindungan wanita dan lain-lain.

Perkembangan masyarakat yang dilakukan khususnya oleh ormas-ormas dalam kaitan memperjuangkan aspirasi yang berkembang di masing-masing jenis ormas adalah melalui berbagai proses pemberdayaan masyarakat untuk turut serta di dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Dalam konteks ini ormas islam memposisikan diri sebagai **agen perubahan sosial** sekaligus **agen pembaharuan** bagi terciptanya sebuah identitas masyarakat tentang hak sipil yang dimilikinya.

Proses pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara ormas melakukan program pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan non-formal, serta forum-forum lain yang mengarah kepada terciptanya kesadaran masyarakat tentang perlunya mereka berdaya dalam kehidupan negara demokratis.

Selain memiliki peran menyadarkan masyarakat yang hak-hak sipilnya, ormas juga dapat memerankan diri sebagai **agen pemersatu** dalam sebuah wadah negara yang plural seperti Indonesia. Ketika ormas-ormas keagamaan besar berdiri awal abad 20-an seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama [NU], mereka melakukan berbagai peran dalam rangka penguatan identitas kebangsaan dan menciptakan toleransi terhadap pluralisme dan universalisme. Sehingga, dengan demikian ormas melakukan sebuah upaya penyadaran bahwa dalam pluralisme suku bangsa, agama, ras dan golongan terdapat sebuah persatuan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti menghilangkan perbedaan yang ada yang merupakan sebuah nikmat yang tak terhingga bagi Indonesia. Perbedaan tersebut harus dikelola sebagai rahmat. Hal itu menjadi kewajiban Pemerintah dan unsur negara lain serta masyarakat pada umumnya yang utamanya diperankan oleh ormas-ormas.

Peran lain yang dapat dijalankan oleh ormas islam dalam konstelasi sistem politik kebangsaan adalah menjalankan fungsi kontrol terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan khususnya oleh negara, adanya fungsi kontrol atau pengawasan tersebut dilakukan oleh ormas melalui penyampaian aspirasi baik secara langsung atau tidak langsung seperti demontrasi secara tertib, penyampaian aspirasi dalam forum rapat-rapat dengar pendapat dengan DPR dan forum diskusi dengan para pengambil keputusan lainnya serta melalui media baik cetak maupun elektronik tentang suatu isu yang menyangkut hajat hidup masyarakat umumnya dan isu khusus sesuai bidang garapan ormas tersebut pada khususnya.

Dalam sebuah negara demokratis dan modern, negara semakin sedikit terlibat secara langsung sebagai pelaksana, tetapi lebih sebagai fasilitator bagi tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, meskipun untuk beberapa hal tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah [negara] untuk melaksanakannya.

Oleh karena pentingnya peran ormas dalam penegakan nilai demokrasi, maka jangan sampai pelabelan negatif kepada ormas-ormas yang ada dibiarkan berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap ormas untuk melakukan reorientasi terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Artinya, setiap ormas memiliki visi dan misi yang jelas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Sebab, tanpa orientasi, visi dan misi yang jelas, akan sulit menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-hak sipilnya serta sadar akan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Visi dan misi akan menuntut sebuah organisasi untuk mampu menjalankan program-programnya serta mengarahkan organisasi itu kepada tujuan yang luhur yakni adanya kesetaraan dan keterlibatan masyarakat dalam sebuah sistem politik yang demokratis.

IV. Penutup

Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] sebagai sebuah lembaga perwakilan yang memiliki tugas utama membentuk undang-undang akan mendorong lahirnya sebuah undang-undang pengganti UU No. 8 tahun 1985 tentang Keormasan dengan paradigma baru. Ormas atau organisasi masyarakat sipil harus diberi ruang yang luas untuk berperan serta dalam proses perumusan kebijakan negara. Selain itu, UU yang baru harus menjadi acuan bagi terciptanya iklim demokratis dengan munculnya partisipasi aktif masyarakat melalui ormas. Jangan lagi sebuah UU menjadi halangan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Juga jangan lagi terjadi ormas menjadi "corong" Pemerintah tanpa disertai daya kritis terhadap kebijakan yang diambil.

Namun demikian, ormas juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat atas apa yang menjadi agenda Pemerintah [negara] yang menyangkut kahidupan masyarakat secara proporsional. Jika agenda tersebut memiliki nilai positif bagi masyarakat, maka ormas harus mendorong disertai kontrol. Tetapi jika ormas melihat ada sesuatu yang kurang pas dengan agenda negara, maka menjadi kewajiban ormas pula untuk

memberikan masukan agar agenda tersebut sejalan dengan kehendak masyarakat secara umum. Selain itu, ormas juga harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan membuat masyarakat tenang, tidak bergejolak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan.

Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dengan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan nilai-nilai demokrasi menjadi kenyataan. Tanpa sinergi antara negara [Pemerintah dan lembaga negara lainnya] dengan masyarakat, niscaya sulit Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang akan menyelenggarakan MUNAS VI nya, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan sambutan saya ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pesertanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 11 Mei 2005
KETUA DPR RI,

ttd

H. R. AGUNG LAKSONO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

OTONOMI DAERAH DAN PILKADA

Disampaikan oleh :

Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN
Ketua Komisi II DPR RI

pada

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DI HOTEL MILLENNIUM
JAKARTA, 11 MEI 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

OTONOMI DAERAH DAN PILKADA

Dalam sistem politik modern, demokrasi adalah cita-cita ke arah terbentuknya negara modern. Demokrasi diyakini sebagai identitas politik yang memberikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Karenanya, ketika muncul gelombang reformasi pada pertengahan 1997, yang dikatalisasi dengan krisis moneter [mata uang], ada tuntutan ke arah demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bangsa ini.

Kenapa demokratisasi ? Sebab, ada anggapan, tanpa demokratisasi maka akibatnya seperti yang dialami bangsa ini, yang akhirnya, terjerumus dalam krisis multidimensional yaitu, antara lain : krisis politik yang berujung pada krisis kepercayaan, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan sangat dalam, dan krisis sosial yang mengarah pada segregasi sosial dan disintegrasi.

Maka, ketika gerakan mahasiswa semakin marak pada awal 1998, menuntut mundurnya Presiden Soeharto, ada lagi tuntutan yang menyertainya, antara lain, tiga agenda reformasi, yaitu : reformasi politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan [birokrasi]. Tuntutan itu diajukan karena tampaknya sebagai jawaban terhadap krisis multidimensi yang membelit bangsa ini saat itu.

Reformasi politik muncul berlatar belakang kebosanan rakyat terhadap kondisi dan kehidupan politik nasional, terutama, disebabkan oleh pengekangan-pengekangan politik [sistematis] yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Seperti diketahui, langkah pertama yang diambil Soeharto pada masa awal pemerintahannya adalah melancarkan program depolitisasi masyarakat. Politik, bagi pemerintah saat itu merupakan barang haram dan potensial mengganggu jalannya pembangunan nasional [ekonomi]. Karenanya masyarakat harus dijauhkan dari politik. Politik hanya menjadi kajian ilmu saja.

Reformasi ekonomi menguat dipicu oleh krisis moneter pada sekitar Juni 1997. Kondisi ini menggoncangkan perekonomian nasional. Dampaknya, pada pertengahan Agustus 1997, nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Tercatat, 1 dollar Amerika Serikat sama dengan Rp. 15.000 [US$ 1 = Rp. 15.000]. Akibat dari depresiasi nilai tukar rupiah ini, sektor-sektor perekonomian nasional mengalami "mati suri" dan kebangkrutan. Misalnya, industri bahan kayu dan hutan merosot menjadi [-3, 83 %], industri pengolahan Migas [-3,42%], dan industri barang kulit [-1,69%]. Dampak selanjutnya adalah terjadinya pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan tambahnya tingkat pengangguran. Pada tahun 1998, pengangguran terbuka meningkat menjadi 13,5 juta [14,7 % dari total angkatan kerja] dan pengangguran bruto menjadi 48,6 juta [53 % dari total angkatan kerja].

Reformasi administrasi pemerintahan [birokrasi] lahir dari relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, di mana pejabat-pejabat publik seharusnya melayani warganya tapi dalam kenyataannya justru "minta dilayani" dengan buah konkritnya ada dalam bentuk Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme [KKN].

Tiga agenda reformasi itulah yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang [UU] No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian juga dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dimunculkanlah mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah, yang dapat didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri, telah membuat pemerintah pusat tidak lagi mendominasi perumusan kebijakan publik di daerah. Dalam bahasa lain, sentralisme kekuasaan secara dramatis berkurang dan hampir secara otomatis banyak proses pengambilan pengambilan keputusan beralih dari pusat ke daerah. Dari perspektif kehidupan politik, fenomena demikian menunjukkan arah yang benar, yaitu, menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Karena itu, dalam UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Dari sisi demokratisasi, rakyat menjadi mudah menyalurkan aspirasinya, salah satunya karena dekatnya pemerintah dan wakil rakyat. Kedekatan yang dimaksud adalah dekatnya wewenang dan kekuasaan pemerintah dengan rakyat, di mana sekarang ini keduanya sudah berada ditangan pemerintahan daerah, yang merupakan hasil dari *devolution of power* dan *delegation of authority* dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan

kedekatan wewenang ini, pemerintah daerah di era UU Mo. 22 Tahun 1999 ini tidak lagi merupakan "Pemerintahan di Daerah" tetapi sudah menyatu dengan rakyat setempat dan benar-benar menjadi Pemerintahan Daerah.

Sedikitnya ada tujuan otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah membebaskan pemerintah pusat dari beban pekerjaan yang terlalu berlebihan sehingga pemerintah pusat akan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dan merumuskan kebijakan-kebijakan makro. Kedua, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan diri secara optimal. Dengan desentralisasi, banyak bidang yang dulu merupakan kewenangan pusat, sekarang menjadi kewenangan daerah seperti, alokasi anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, pengangkatan dalam jabatan strukural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan, dan desa, serta pemilihan kepala daerah.

Selain itu, diterimanya sebagian kekuasaan pusat, memberikan peluang pada pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Asumsinya, semakin banyak kewenangan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh daerah akan semakin baik karena pemerintah daerah tentu lebih memahami kondisi setempat sehingga kebijakannya dapat lebih tepat sasaran.

Namun dalam prakteknya, sejak kebijakan otonomi daerah pasca Orde Baru berlaku efektif pada 1 Januari 2001, telah menimbulkan pro dan kontra dan tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, pasal 7 ayat [2] daerah cenderung menafsirkan bahwa semua kewenangan diluar kewenangan pusat adalah menjadi kewenangan daerah. Lalu, ada masalah kemampuan sumber daya manusia di daerah yang belum memadai, hingga perangkat/aparat pemerintahan yang terseret dalam pusaran dinamika politik lokal. Contohnya, pegawai cenderung di kooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik baik oleh Kepala Daerah maupun dari DPRD [putra daerah, non job, kesukuan, sulitnya mutasi antar daerah atau ke pemerintah yang lebih atas].

Selain itu, ada pula yang menilai bahwa pelaksanaan otonomi daerah ini terkesan terburu-buru dan kurang sosialisasi. Malah ada yang menafsirkan otonomi daerah dengan versinya masing-masing yang berakibat timbulnya "benturan" kepentingan antara pemerintah pusat dengan daerah atau di

dalam instansi daerah masing-masing. Hal ini tampak di beberapa daerah dengan terjadinya konflik antara DPRD dan Kepala Daerah ketika Kepala Daerah memberi laporan pertanggunjawaban kepada DPRD. Konflik penguasaan keuangan yang menghasilkan penerimaan keuangan daerah. Daerah cenderung mencari sumber-sumber penerimaannya yang hampir tidak ada relevansinya dengan pemberian pelayanan yang terkait dengan kewenangan. Sementara, masyarakat merasakan pelayanan dari pemeritah daerah menurun karena belanja aparatur cukup tinggi, sedangkan belanja untuk pembangunan relatif lebih rendah, yang didalamnya adalah untuk pelayanan publik.

Dari aspek kewilayahan, kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada tidak ada hubungan hierarki antara Pemerintahan Propinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Kemudian, adanya persepsi pengkaplingan laut. Belakangan yang perlu dicermati secara serius adalah fenomena daerah-daerah yang berkehendak membentuk daerah otonom baru Kabupaten/Kota atau Propinsi. Karena, dalam beberapa hal, pembentukan daerah otonom baru lebih merupakan agenda dari segelintir elit daerah untuk menduduki kursi kekuasaan ketimbang memenuhi tujuan otonomi daerah seperti untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menghadapi situasi yang seperti diuraikan di atas, maka ke depan perlu strategi guna keberhasilan otonomi daerah. Salah satunya adalah penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 terutama pasal-pasal yang dianggap kurang sesuai dan menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah. Penyempurnaan ini sebaiknya dipandang sebagai penataan kembali atau dipopulerkan menjadi "reformasi", atau haruslah dibaca sebagai "usaha membangun dan menciptakan" sistem pengaturan [*government system*] segala bentuk sumber daya secara lebih sehat, melalui sistem hubungan antara rakyat dengan negara, dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang tidak saling eksploitatif, tidak saling meniadakan, dan tidak saling melemahkan. Melainkan sistem hubungan yang saling melindungi, saling memperkuat, dan saling memberdayakan sebagai prinsip dasar.

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai adalah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, hubungan keuangan

pusat dan daerah [dalam rangka otonomi daerah], dilakukan dengan memberikan kebebasan daerah, untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.

Hal ini kelak akan berkaitan dengan penyempurnaan hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena, salah satu modal dasar suksesnya implementasi kebijakan otonomi daerah adalah ditentukan oleh tersedianya sumber pembiayaan yang mencukupi. Selama ini pemerintah daerah tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, dan juga dalam melaksanakan pelayanan publik serta pembangunan bagi masyarakatnya, apabila tanpa didukung dengan tersedianya dana atau keuangan yang optimal.

Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penerapan desentralisasi fiskal. Transparansi dalam perhitungan *fiscal transfer* [*all categories*] dan kepastian perhitungan akan selalu menjadi isu terutama formula perhitungan [*regulatory framework*] dan proses penentuannya. Ketergantungan daerah terhadap pusat dalam desentralisasi seharusnya kecil, namun faktanya justeru membesar. Penyediaan *lokal public facility* seharusnya tidak menjadi tanggungan orang *non lokal* [eksternalitas negatif]. Selama ini, *public expenditure* masih menjadi fokus utama daerah dan tergantungnya daerah pada *fiscal transfer* membuat daerah menjadi *less governance*.

Lalu juga ada *Vertical Fiscal Gap [Imbalance]* yang memberikan arti bahwa sumber-sumber pendapatan pusat lebih besar dari belanja langsung pemerintah pusat. *Vertical Fiscal Gap* menggambarkan [potret] keadaan pemerintah [sekarang dan ke depan], dan ini bisa sebagai alat ukur *degree of centralization*. Selama ini seolah-olah ada proses "penyembunyian", yaitu melalui mekanisme dana dekonsentrasi [yang seharusnya melalui mekanisme pembantuan], dimana Gubernur bisa di-*bypass* [terkait dengan masalah administrasi].

Kemudian masalah *Horizontal Fiscal Disparities* yang tercermin dalam fakta kritikal yaitu perbedaan sumber daya alam [SDA] yang dimiliki oleh setiap daerah, perlu segera diatasi. Hal tersebut seharusnya dapat teratasi dengan komitmen kebijakan *fiscal equalization*, yaitu formula Dana Alokasi Umum [DAU].

Untuk lebih jelasnya, dari sisi fiskal, prinsip-prinsip kesinambungan fiskal

dapat dilihat dalam pengendalian defisit dan pengendalian utang [negara dan daerah]. Daerah selama ini secara praktek masih menganut *soft budget control* pada keuangannya [bila terjadi defisit, masih menjadi tanggungan pusat]. Ke depan, *hard budget control* harus dilakukan dengan *evaluation/monitoring control, maximizing revenue,* menertibkan pajak/retribusi yang tidak ada *spillover*-nya, *introducing system* standar akuntansi dan implementasinya, dan mengawasi terjadinya gagal bayar [misal dengan daerah yang tidak *perform* jangan langsung *bailouts* oleh pusat].

Kegagalan karena *miss-management* dalam pengelolaan keuangan daerah ini jangan ditanggungkan ke rakyat. Pemda seharusnya *balance budget system* saja [dalam jangka menengah]. Sementara, pemekaran daerah yang marak, seolah-olah sebagai perwujudan otonomi daerah, kenyataannya bisa mendistorsi keadaan perekonomian [karena bocornya efisiensi], baik propinsi maupun kabupaten/kota. Kalau bisa, pemekaran daerah harus ditunda dahulu.

Akhirnya, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dukungan seluruh *stakeholder* yang terlibat, baik Pemerintah Pusat, Pemda maupun swasta, dan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah komitmen dan semangat untuk mensukseskan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga terbentuk daerah-daerah otonom disertai iklim politik nasional dan lokal yang demokratis.

PILKADA

Kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung [pilkada langsung] tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan akan dilaksanakannya pilkada [pemilihan kepala daerah secara langsung] berarti kita akan memasuki sejarah baru dalam pemilihan pemimpin lokal, sekaligus merupakan perwujudan dari kembalinya kedaulatan rakyat yang sebelumnya hanya menjadi milik dari sekolompok elit yang mengatasnamakan rakyat. Kebijakan pilkada ini, bila dicermati, setidaknya ada tiga alasan mendasar mengapa perlu dilakukan.

Pertama, tuntutan demokratisasi yang tidak bisa dielakkan, memerlukan penyesuaian pada proses-proses pemilihan pemimpin lokal. Kedua, tuntutan konstitusi [UUD 1945 setelah diamandemen] dengan menekankan pemilihan

kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis, di mana pemaknaan demokrasi harus diwujudkan dengan mengakui dan memberi kedaulatan kepada pemilih berbasis individu yang memenuhi syarat. Dan ketiga, adanya kebijakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang baru saja dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 lalu. Sebelumnya praktik pemilihan pimpinan secara langsung hanya berlangsung pada pemilihan kepala desa atau organisasi-organisasi sosial yang memiliki atau sudah terlebih dahulu membangun tradisi demokrasi.

Dengan pilkada diharapkan mampu mengurangi distorsi atau kelemahan pilkada yang hanya dilakukan oleh DPRD. Setidaknya kepala daerah yang terpilih lebih memiliki derajat legitimasi sosial yang kuat dibanding dengan pemilihan yang hanya dilakukan oleh para anggota DPRD. Penyelenggaranyapun, yakni KPUD [Komisi Pemilihan Umum Daerah] dipandang bisa melakukan itu, demikian juga rakyat [pemilih], karena sudah pernah mengalami pemilihan presiden dan para calon anggota DPD [Dewan Perwakilan Daerah].

Ada pun mekanisme pilkada, secara ringkas, dapat digambarkan sebagai berikut :

Bermula dari KPUD sebagai penyelenggara pilkada, yang menetapkan tanggal dan tata cara kampanye hingga tanggal pencoblosan atau pemungutan suara. Tidak hanya itu, KPUD juga meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon. Termasuk juga, meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan [lengkapnya pada pasal 66 dan 67].

Selanjutnya, pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 [satu] bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir [lihat pasal 86 dan 99]. Pemungutan suara ini dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Dalam pilkada ini ada pemantau pilkada yang dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri. Pemantau ini harus memenuhi persyaratan yaitu : bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas [pasal 113 dan 114].

Selain itu, dalam penyelenggaraan pilkada ini ada panitia pengawas yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pilkada. Panitia pengawas ini keanggotaanya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi,

pers, dan tokoh masyarakat.

Kelak bila telah terpilih kepala daerah dari hasil pilkada itu, maka DPRD akan mengadakan pelantikannya dalam suatu rapat paripurna DPRD. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, semua hal tentang penyelenggaraan pilkada ini dapat disimak dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Namun demikian, bukan hanya prosedural saja yang perlu dicermati, ada lebih banyak substansi dalam proses pilkada ini yang perlu diperhatikan dan kalau perlu menjadi prinsip bersama. Pertama, pilkada ini dalam rangka ikut memajukan Negara Republik Indonesia. Ini sangat penting, sebab jika sistem pilkada yang dikembangkan dalam rangka merongrong kedaulatan Negara R I, atau untuk pemisahan diri dari Negara R I, maka harus cepat dicegah. Di berbagai negara, termasuk negara maju, jika ada wilayah yang akan memisahkan diri pasti dicegah.

Kedua, menjadikannya sebagai proses politik untuk menciptakan transparansi. Pilkada haruslah menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat dan sekaligus mewujudkan transparansi baik dalam sistem rekrutmen pasangan calon maupun dalam penggunaan anggarannya.

Jakarta, 11 Mei 2005

ttd

Drs. Ferry Mursyidan Baldan
Ketua Komisi II DPR RI



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PEMBEKALAN
MENTERI DALAM NEGERI

tentang

PERANAN ORMAS DALAM MENGUATKAN OTONOMI DAERAH YANG BERBASIS "NKRI"

pada

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DI HOTEL MILLENNIUM
JAKARTA, 11 MEI 2005



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERANAN ORMAS DALAM MENGUATKAN OTONOMI DAERAH YANG BERBASIS NKRI

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII]; Saudara-Saudara Peserta Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII]; dan Para hadirin yang berbahagia

PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII] yang saya nilai sangat penting dan strateji khususnya bagi kemajuan organisasi LDII yang merupakan salah satu wadah umat islam yang menfokuskan kegiatannya pada bidang Dakwah.

Saya katakan ini penting karena dalam pertemuan ini disamping membicarakan hal-hal yang menyangkut keberadaan organisasi juga akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan lainnya khususnya dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa pada saat ini.

Saudara – saudara yang saya hormati;

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan [Ormas] merupakan suatu realitas sosial yang telah ada sejak lama seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Ormas telah

menjadi bagian dari kehidupan sosial politik yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga kontribusi yang diberikan kepada masyarakat tidaklah kecil. Peran Ormas dalam memberikan pendidikan politik dan pemberdayaan terhadap masyarakat betul-betul berdampak positif, sehingga tidak jarang masyarakat lebih banyak berkomunikasi dengan keberadaan Ormas ketimbang Partai Politik. Namun faktual ada Pula Ormas dan LSM yang kinerjanya tidak jelas dan juga memiliki sifat yang apriori terhadap Pemerintah. Pada saat ini di Indonesia, hubungan yang sinergi antar Ormas dan Pemerintah telah menjadi suatu tuntutan jaman sebagai pencerminan adanya perubahan dalam era demokratis. Keterlibatan semua komponen masyarakat dalam membangun bangsa menjadi satu keharusan. Hubungan Pemerintah dan Ormas yang ditandai oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan merupakan hal yang harus ditinggalkan. Kritik-kritik yang dilontarkan oleh Ormas kepada Pemerintah merupakan bentuk kepedulian sebagian masyarakat Indonesia terhadap jalannya proses membangun bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Berbagai bentuk sinergi antara Pemerintah dan Ormas merupakan suatu kekuatan yang ampuh untuk mendorong bergeraknya roda-roda pembangunan di Indonesia. Hubungan saling percaya yang dilandasi kemerdekaan, kebebasan, keadilan dan kesetaraan antara Pemerintah, Ormas dan komponen bangsa lainnya harus ditegakan bersama.

PERAN PEMERINTAH TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PASCA REFORMASI

Dalam era reformasi sekarang ini, paradigma peran Pemerintah terhadap Ormas telah bergeser dari yang semula "Membina" dalam arti luas dan untuk kepentingan Pemerintah sekarang dalam posisi sebagai regulator dan fasilitator serta mitra pemerintah dalam kehidupan politik demokratis guna mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Dalam posisi regulator, Pemerintah melakukan upaya-upaya membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung dan mendorong Ormas agar lebih mampu menyikapi realitas kehidupan masyarakat secara lebih proporsional dan profesional sesuai kondisi kultur bangsa. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum yang dijadikan acuan oleh Ormas dalam menggerakan segenap potensi yang dimiliki oleh Ormas dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Ormas guna mendukung terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Sejalan dengan tuntutan era reformasi, maka Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan perubahan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan untuk mengakomodasikan dan menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi baik pada saat era reformasi maupun pasca reformasi. Untuk itu saya mengharapkan agar LDII dapat memberikan masukan-masukan yang komprehensif pada Pemerintah guna dijadikan bahan dalam rangka perumusan perubahan UU dimaksud.

Dalam posisi sebagai fasilitator, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberdayakan Ormas agar lebih mampu mengembangkan dan melaksanakan secara kongkrit program-program dari Ormas. Bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah adalah dalam bentuk koordinasi, komunikasi dan klarifikasi. Dalam fungsi fasilitasi jangan diterjemahkan Pemerintah melakukan upaya-upaya intervensi, namun semata-semata dalam kerangka mendukung dan mendorong agar kinerja Ormas dapat berjalan dengan baik, namun disisi lain yang paling strategis kinerja Ormas lebih banyak tergantung kepada kemandirian Ormas itu sendiri terutama dalam hal kemampuan finansial untuk menggerakan roda organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan program-programnya. Untuk itu Ormas harus memiliki sumber dana yang kuat dalam rangka menggerakan sumber daya yang dimilikinya, tentunya dilandasi dengan aturan main yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam posisi sebagai mitra Pemerintah, Ormas dituntut memiliki program dan kegiatan yang bersifat sinergis serta dalam kerangka mengedepankan komitmen kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya. Artinya segenap kegiatan Ormas merupakan bagian yang integral dalam rangka memberi kontribusi untuk tercapainya tujuan dan cita-cita nasional serta dalam kerangka mengawal integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KONDISI STRATEGIS KEKINIAN

Sementara itu dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang untuk pelaksanaannya telah diterbitkan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kita dihadapkan oleh agenda politik besar lainnya yaitu Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung [Pilkadasung] oleh rakyat, yang akan dimulai pada bulan Juni 2005 yang akan datang. Berdasarkan catatan yang dihimpun oleh Departemen Dalam Negeri terdapat sebanyak 226 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang pemilihannya dilaksanakan pada bulan Juni 2005 berjumlah 181 orang terdiri atas 8 orang Gubernur,

173 Bupati/Walikota, sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Desember 2005 berjumlah 45 orang terdiri atas 3 orang Gubernur dan 42 Bupati/Walikota.

Pilkadasung tersebut merupakan agenda nasional yang mempunyai beberapa sasaran fungsional, meliputi *pertama,* Pilkada sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi masyarakat sebagaimana telah dibuktikan dengan keberhasilan Pemilu 2004; *kedua,* sebagai wujud dari amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan pelaksanaannya harus dipersiapkan dengan baik; *ketiga,* sebagai proses pembelajaran demokratisasi dengan aktualisasi berdemokrasi secara sistematis, berkualitas dan konstitusional; *keempat:* merupakan spirit untuk berotonomi dengan baik dan memperkuat otonomi daerah, dengan aktualisasi hak-hak otonom daerah diantaranya memilih pemimpinnya sendiri secara langsung di demokratis; *kelima,* sebagai proses pendidikan kepemimpinan bangsa di setiap strata dengan promosi berjenjang, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memenuhi harapan rakyat; *keenam,* merupakan rangkaian awal yang sangat penting dari proses penyelenggara, pemerintahan daerah, yaitu pada daerah-daerah yang kepala daerahnya telah selesai masa jabatannya secara konstitusion, *ketujuh,* merupakan salah satu prasyarat dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan sasaran fungsional tersebut, maka pelaksanaan Pilkadasung menjadi sangat penting dan tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali berlangsung dan terlaksana dengan baik.

Menyikapi pelaksanaan Pilkadasung 2005, serta melihat kondisi obyektif masyarakat dan negara kita dewasa ini secara jujur sebenarnya harus kita akui bahwa sudah cukup banyak yang telah kita capai dalam berbagai aspek kehidupan; baik dalam kehidupan sosial budaya maupun dalam bidang pemerintahan. Oleh karenanya Pilkadasung tersebut adalah bagian yang harus kita sukseskan bersama dimana Pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat, tokoh - tokoh Ormas dan LSM, termasuk didalamnya LDII.

Dengan paradigma sistem politik demokrasi yang kita bangun dan kembangkan saat ini, telah memberikan koridor yang cukup luas bagi setiap warga masyarakat baik secara individual, kelompok maupun kelembagaan untuk mengaktualisasi ekspresi dan eksistensi serta agregasi kepentingan politiknya dengan berbagai ragam acuan, perspektif beserta ideologinya untuk memperoleh posisi atau pengaruh dalam mengendalikan

penyelenggaraan politik serta penentuan kebijakan publik. Secara realitas hal itu dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya jumlah partai politik, Ormas serta bentuk kelembagaan lainnya.

Para hadirin yang saya hormati

Sesuai dengan tuntutan reformasi saat ini telah terbuka kesempatan yang sangat luas kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi melalui berbagai bentuk diantaranya melalui wadah organisasi kemasyarakatan dalam rangka memaksimalkan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Keberadaan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII] diharapkan dapat juga memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi melalui pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat serta sebagai alat kontrol sosial yang sangat konstruktif. Dalam kaitan ini anggota yang tergabung dalam LDII kualitas SDM-nya tidak perlu diragukan mengingat mereka semua telah lulus ujian dari sisi keimanan, yang tentunya sebagai modal yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang tengah digiatkan Pemerintah. Di era globalissi dan reformasi dengan bekal SDM yang unggul saat ini peran LDII sangat strategis dikaitkan dengan implementasi kebutuhan untuk eksisnya kesatuan dan keutuhan bangsa adalah merupakan partisipasi kebangsaan secara nyata dalam membangun bangsa dan negara guna mengangkat harkat dan martabat bangsa ditengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin kompetitif.

Optimalisasi peran Ormas memiliki arti strategis pula yang dikaitkan dengan perannya sebagai *pressure group* yang sangat efektif sebagai penyerap aspirasi terhadap masyarakat. Bagi masyarakat yang majemuk termasuk pula majemuk dalam hal kehidupan beragama seperti di Indonesia ini, upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan skala prioritas untuk ditangani, mengingat realitas pluralitas agama merupakan titik rawan. Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama, salah satu upaya Pemerintah adalah melakukan musyawarah dan mengintesifkan dialog, sebagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang memang masih perlu diintensifkan. Dalam hubungan ini, organisasi keagamaan kiranya perlu memelihara komunikasi dan konsultasi secara terus menerus dengan semua pihak, terutama dengan para tokoh agama dan Instansi yang berwenang memberikan pembinaan teknis di bidang keagamaan.

Komunikasi dan konsultasi yang demikian itu, sangat penting dilakukan

agar seluruh organisasi keagamaan yang bernafaskan keislaman dapat ikut berperan dan memberi contoh dalam mengembangkan kehidupan keagamaan, sehingga terbina hidup rukun diantara sesama ummat seagama dan antar ummat beragama dalam usaha kita memperkokoh persaudaraan dan kekuatan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Organisasi kemasyarakatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII] sebagai organisasi berdasarkan kesaman agama Islam tidak perlu menutup diri atau bersikap ekslusif akan tetapi justeru harus lebih terbuka dan lebih dapat membuka diri karena Islam yang disampaikan bukanlah untuk sekelompok orang tetapi merupakan rahmat bagi seluruh alam termasuk umat manusia. Disamping itu, organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII] hendaknya secara terus menerus dapat membangkitkan motivasi dan semangat anggotanya untuk meningkatkan pendalaman penghayatan iman dan mengamalkan makna nilai keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan bernasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Umat Islam yang tergabung dalam organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia [LDII] baik secara pribadi maupun bersama-sama akan lebih mampu berbuat dalam berbagai hal yang memang diserukan oleh ajaran agama dan sekaligus dapat bertindak sebagai pelopor pembaruan, penggerak dalam berpartisipasi dan berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan yang berakhlak. Hal tersebut dimungkinkan karena pembangunan nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan telah memberikan peluang yang sangat besar bagi siapapun untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif sesuai bidangnya dan kapasitas masig-masing. Keikutsertaan masyarakat beserta elemen-elemennya merupkan hal yang wajar karena pembangunan nasional ini pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan terpeliharanya integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan sejumlah himbauan dan harapan kepada Saudara-saudara, bahwa keikutsertaan segenap lapisan masyarakat, termasuk didalamnya organisasi LDII mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk berperan aktif mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Kita semua didesak atau ditantang untuk mampu merespon dengan sebaik-baiknya berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Untuk itu kita perlu memiliki pemahaman yang cerdas benar dan tepat

atas berbagai persoalan bangsa dan negara khususnya persoalan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pemahaman yang cerdas benar dan tepat terhadap berbagai hal yang berpengaruh terhadap kesatuan bangsa dan negara akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perwujudan kepedulian kita atas kelangsungan hidup dan nasib bangsa ini. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu tujuan politik yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh kita semua, karena tanpa persatuan dan kesatuan kiranya tujuan-tujuan yang luhur seperti terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial, mustahil akan tercapai.

Dalam kaitan dengan konteks tersebut kepada peserta MUNAS VI LDII saya berharap kiranya Saudara-saudara senantiasa memberikan kontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan :

a. menjadi pioner dalam pendewasaan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi yang dilandasi dengan mantapnya pemahaman nilai-nilai Pancasila;

b. menjaga kualitas ketahanan bangsa dari berbagai cobaan dan musibah yang sedang menerpa bangsa ini;

c. meraih kesempatan yang terbuka luas kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi dan menciptakan kreativitas dalam ikut serta membangun pemerintahan yang baik dan amanah.

d. Tetap mendukung suasana reformasi yang normatif dalam tataran budaya yang santun serta tanggap terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

e. Menjaga dan memelihara situasi yang kondusif dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkadasung yang dimulai bulan Juni 2005.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya Munas ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat membawa organisasi LDII melangkah maju menatap hari depan yang lebih cerah dengan wujud program kerja lebih konkrit dan jelas yang akan dihasilkan dalam menyumbangkan darma baktinya terhadap bangsa dan negara.

Selamat mengikuti Musyawarah Nasional

Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan limpahan rakhmat dan tuntunan kepada kita semua, Amiin. Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 11 Mei 2005

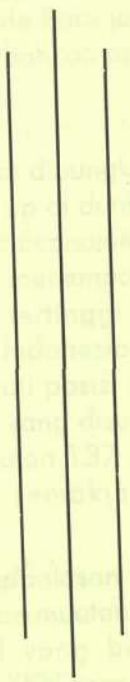
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

ttd

Letjen TNI [Purn] Moch. Ma'ruf, SE

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEMBEKALAN MATERI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)



JAKARTA, 11 MEI 2005



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PENDEKATAN KULTURAL DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KKN

A. PENDAHULUAN.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN] muncul sebagai akronim menjelang jatuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1997. Praktek KKN sudah tidak dapat ditolerir lagi karena dianggap telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Dengan jatuhnya Pemerintahan Orde Baru diharapkan praktek-praktek tercela KKN dapat dihapus sehingga tercipta kehidupan sosial yang sehat. Namun setelah Pemerintahan Orde Baru jatuh, penanganan perkara KKN dirasa belum membuahkan hasil bahkan pada tataran tertentu KKN dinilai masih tetap seperti dulu.

Di mata Internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* [PERC] yang diumumkan bulan Maret 2002, menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9,92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan dari sumber *Transparency International [TI]* Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi [IPK] Indonesia tahun 2003 menempati posisi memprihatinkan, yaitu 1,9 dan peringkat 122 dari 133 negara yang disurvei. IPK Indonesia tahun 2004 menjadi 2,0 dan menduduki urutan 137 dari 146 negara yang disurvei. Semakin rendah IPK maka semakin parah tingkat korupsinya.

Penegakan hukum dalam pemberantasan KKN yang hanya mengandalkan instrumen hukum pidana, yang bermuatan sanksi pidana yang berat dinilai belum memperlihatkan hasil yang berarti. Masyarakat Indonesia mengharapkan praktek-praktek KKN segera dihapuskan, komitmen rakyat

Indonesia **secara konkret menghendaki diberantasnya korupsi di negara Indonesia.**

B. MAKNA PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan pengertian mikro terkait dengan proses pemeriksaan di Pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *[in kracht]*.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan ketertiban dan lainnya adalah untuk tercapainya keadilan.[1] Dengan kata lain ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk budaya hukum suatu masyarakat.

Penegakan hukum menempati posisi strategis dalam pembangunan hukum lebih-lebih di suatu negara hukum. Jeremy Bentham mengatakan penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak.[2]

C. KOMITMEN NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KKN.

Dalam melaksanakan penegakan hukum pemberantasan KKN, persyaratan utama adalah adanya komitmen dari segenap komponen bangsa.

1. KOMITMEN POLITIK RESMI.

Tujuan nasional yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN] sudah dinyatakan secara resmi dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan

[1] Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan* Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Citra Bandung, Hal. 2-3

[2] Jeremy Bentham, "Anarchical Fallacies" dalam A.I. Belden, ed., Human Right, Calif : Wardsworth, 1970, Hal. 30

Nasional Sebagai Haluan Negara, Bab IV Kebijakan Reformasi Pembangunan,

Bagian A. Ekonomi, butir 2.d. menjelaskan :

"Meningkatkan keterbukaan pemerintahan dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme *serta praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan Negara dan rakyat. "*

Bagian D. Agama dan Sosial Budaya, butir 2.b. menjelaskan :

"Menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat bebas dari ***korupsi, kolusi dan nepotisme.*** "

Dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 2 ayat [2] menjelaskan :

"Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggaraan Negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek **korupsi,kolusi dan nepotisme.**

Dengan ketetapan MPR No. X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, bangsa Indonesia telah mempunyai komitmen politik untuk memberantas KKN.

2. KOMITMEN POLITIK RAKYAT SECARA KONKRIT.

Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unsur rakyat seperti dalam aksi unjuk rasa, diskusi, pernyataan pendapat, dan sebagainya, menyatakan sikapnya agar praktek-praktek KKN segera dihapuskannya.

Keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia telah menyatu dan menghendaki praktek-praktek KKN segera dihapuskan. Hal ini berarti setiap langkah pemberantasan KKN yang dilakukan, akan mendapat dukungan penuh dari rakyat.

3. KOMITMEN PEMERINTAH.

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu juga mempunyai komitmen serupa. Hal ini terbukti pada tanggal 9 Desember 2004, bertepatan dengan ditetapkannya hari anti korupsi sedunia yang ditetapkan oleh PBB, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden

tersebut intinya menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia bersatu, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapoiri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komitmen Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah konkrit :

1. Membuat program Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi [RAN-PK] 2004 s/d 2009. Pelaksanaan RAN-PK 2004-2009 dilakukan semua institusi pemerintah serta komponen masyarakat. RAN-PK tersebut meliputi langkah-langkah pencegahan, penindakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
   - Langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, kelembagaan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun pencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
   - Langkah penindakan terhadap perkara korupsi dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, berupa pengenaan sanksi / hukuman terhadap segala bentuk penyimpangan norma / peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
   - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dilakukan selain dengan penguatan fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga dilakukan pengawasan yang bersifat eksternal, dimana elemen masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar.
2. Membentuk Tim Terpadu Pemburu para Koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Tim terpadu yang dibentuk terdiri dari beberapa instansi terkait, dengan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, bertugas mencari keberadaan para terpidana kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri untuk segera dieksekusi sesuai dengan putusan Pengadilan.
3. Membuat perjanjian ekstradisi dengan Negara Singapura. Negara Singapura disinyalir menjadi tempat persembunyian para koruptor yang melarikan diri dari Indonesia. Untuk menangkap para koruptor di Singapura diperlukan perjanjian ekstradisi. Meskipun

sampai saat ini perjanjian tersebut belum terbentuk namun Pemerintah Indonesia terus berupaya menjalin hubungan dengan Singapura untuk membentuk perjanjian ekstradisi.

4. Membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Tim Koordinasi Pemberantasan korupsi terdiri dari berbagai instansi terkait yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk mengejar *asset* [harta kekayaan] para koruptor.

D. PENDEKATAN KULTURAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KKN.

Penegakan hukum sangat tergantung dari berbagai faktor, seperti faktor hukum atau peraturan itu sendiri; faktor petugas yang menegakkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan faktor kebudayaan atau kultur.

Sejarah mencatat, strategi pemberantasan KKN dengan hanya mengandalkan instrument hukum pidana, meskipun memuat sanksi pidana yang berat belum memperlihatkan hasil yang berarti.

Barda Nawawi Arief, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro, berpendapat strategi dalam penanggulangan korupsi, bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri melainkan penanggulangan "kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi", penanggulangan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan *simptomatik*, sedangkan penanggulangan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangan *kausatif*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi antara lain:

1. Dari Aspek Individu, meliputi antara lain :
   a. Sifat tamak manusia.
   b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan.
   c. Gaya hidup yang konsumtif.
   d. Malas atau tidak mau bekerja keras.
   e. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

2. Dari Aspek Organisasi, meliputi antara lain :
   a. Kurangnya adanya teladan dari pimpinan.
   b. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
   c. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

3. Dari Aspek masyarakat tempat keberadaan individu dan organisasi, meliputi antara lain :
   a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
   b. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri juga terlibat dalam praktek korupsi.

Masalah pemberantasan KKN banyak diselesaikan dari aspek *represif,* yaitu penyelesaian secara hukum atas perbuatan KKN yang telah terjadi. Kepolisian, Kejaksaan dan KPK memegang peranan yang sangat penting. Dengan terjadinya korupsi, instansi yang berwenang dalam hal ini melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepolisian, Kejaksaan dan KPK terus melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi baik di pusat maupun di daerah. Bahkan sudah banyak kasus korupsi yang telah diselesaikan dan pelakunya telah dijatuhi hukuman yang berat. Ironisnya, kasus korupsi tidak semakin surut malah semakin meningkat baik mengenai jumlah pelaku, modus operandi maupun jumlah uang negara yang dikorupsi [kerugian keuangan negara].

Strategi pemberantasan KKN juga dapat dilakukan melalui aspek preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap terjadinya KKN. Dalam aspek ini, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan kelompok ulama dapat dilibatkan.

Dalam aspek preventif, pencegahan terhadap terjadinya KKN dapat dilakukan melalui pendekatan kultural. Untuk mencegah terjadinya korupsi, masyarakat dibudayakan untuk tidak memberi ataupun menerima uang "pelicin" [suap], bergaya hidup yang wajar [tidak konsumtif / hidup hemat], mau bekerja keras dalam memperoleh segala sesuatu, melakukan kompetisi secara fair dalam segala hal termasuk urusan proyek, menghargai seseorang tidak didasarkan pada harta kekayaannya dan sebagainya. Juga, apabila masyarakat mengetahui adanya orang yang melakukan perbuatan yang salah mengarah kepada korupsi atau memberi kontribusi kepada perbuatan korupsi, masyarakat jangan "cuek". Masyarakat yang *permissive* [cenderung

membolehkan secara diam-diam] terjadinya penyimpangan menjadikan kondisi sangat kondusif terhadap terjadinya korupsi.

Pendekatan kultural mempunyai peran dalam pemberantasan KKN, khususnya pencegahan terhadap terjadinya korupsi.

E. PENUTUP

Demikian uraian singkat ini, kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN] di Indonesia.

Terima Kasih.

Jakarta, 11 Mei 2005

JAKSA AGUNG RI

ttd

ABDUL RAHMAN SALEH, SH, MH



KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

KETERTINGGALAN PEMBARUAN HUKUM DI TENGAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Disampaikan oleh :

DR. ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, SH, LLM
Ketua Komnas HAM

pada

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DI HOTEL MILLENNIUM
JAKARTA, 12 MEI 2005

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

KETERTINGGALAN PEMBARUAN HUKUM DI TENGAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI?

Apakah pembaruan hukum tertinggal oleh lajunya perkembangan demokrasi? Jawabannnya bisa tidak dan bisa ya. Tidak bilamana kita menyaksikan pesatnya perubahan dan perkembangan perangkat norma hukum dan pembentukan lembaga-lembaga hukum yang ditugasi untuk menjalankan aturan hukum itu. Lihatlah apa yang terjadi dalam pengaturan kehidupan politik, pemerintahan dan hukum. Berbagai produk undang-undang mengalami reformasi, misalnya, Amandemen UUD 1945. reformasi UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum. UU Susduk DPR, DPD, dan MPR. UU Pemerintah Daerah [menjadi UU Otonomi Daerah], UU Otonomi Khusus untuk NAD dan Papua, UU Pers, UU HAM. UU yang mengatur hak untuk unjuk rasa, UU Tindak Pidana Korupsi, UU MA, UU Kepolisian, dan lain sebagainya. Berbagai UU tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan aktifitas politik pemerintahan dan hukum, antara lain: pendirian partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum [yang dinilai damai dan fair], pengelolaan pers yang bebas, penyelenggaraan otonomi daerah, dan lain sebagainya. Pembaruan hukum memasuki pula ranah ekonomi, bisnis, dan keuangan. Disini kita menyaksikan tidak hanya perombakan UU ekonomi, tapi juga mengintroduksi UU baru dan kelembagaannya yang dimaksudkan untuk memfasilitasi, melindungi bekerjanya sistem ekonomi pasar. Berbagai UU Ekonomi itu, antara lain UU Kepailitan dan PKPU, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen. dan lain sebagainya.

Selain pembaruan dan penciptaan norma hukum baru. seperti dikemukakan di atas gerakan pembaruan hukum membentuk pula lembaga-lembaga pelaksana hukum *[legal agencies]* baru, seperti: KPK. KOMNAS HAM

* Pengantar Diskusi untuk Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

[awalnya dibentuk berdasarkan Keppres, kemudian dibentuk berdasarkan UU HAM], Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak [Pidana Korupsi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan puncaknya tentu saja adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Pembaruan berbagai norma hukum di bidang politik, pemerintahan, dan hukum serta pembentukan lembaga-lembaga pelaksananya tak dapat diingkari sedikit banyak dipengaruhi oleh gagasan kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum yang demokratis. Gagasan negara hukum menegaskan, bahwa hukum tidak sekedar aturan main formal atau prosedural, tetapi lebih daripada itu ia mengandung nilai-nilai keadilan. Walaupun tak dapat diingkari dalam kenyataan sosiologisnya nilai keadilan itu tak terelakkan dipengaruhi oleh kepentingan, ideologi, dan posisi kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Sementara itu, pembaruan UU ekonomi nampak nyata dipengaruhi oleh idea dan konsep ekonomi pasar yang tak dapat disangkal amat didesakkan oleh kekuatan ekonomi internasional seperti, Bank Dunia, IMF, MNC, negara-negara maju.

Dalam perspektif negara hukum, hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis itu diharapkan dijalankan oleh kekuasaan yudisial yang kompeten dan independen, dalam arti relatif bebas dari berbagai pengaruh yang dapat menciderai kedaulatan [otonomi] hukum. Kekuasaan yudisial meliputi wewenang penyidikan oleh Polisi, wewenang penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan wewenang mengadili dan memutus oleh Hakim. Polisi, Jaksa, dan Hakim inilah merupakan subsistem yang membentuk sistem yudisial. Setiap sub-sistem yudisial akan menghadapi kasus konkrit dan dituntut untuk menerapkan norma hukum yang abstrak itu dalam situasi konkrit. Disitu masing-masing sub-sistem akan menghadapi kasus nyata di mana dapat terjadi ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum. Dalam menghadapi situasi konkrit itu tidak ada kemutlakan. Yang berarti yang harus dikedepankan adalah keseimbangan yang terukur dan akuntable antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Itu berarti keputusan yang diambil oleh tiap sub-sistem yudisial harus bernalar dan selalu dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Apakah pembaruan hukum tertinggal? jawabannya bisa ya bila kita melihat aspek penegakan hukum di mana kita hampir sulit menemukan kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Tapi masalah kedaulatan hukum lebih banyak merupakan persoalan politik, ekonomi, dan budaya daripada persoalan

undang-undang atau tekhnis hukum. Krisis kedaulatan [otonomi] hukum yang kita hadapi di masa lalu dan sampai hari ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Ideologi patrimonialisme yang selama empat dasa warsa menenggelamkan ideologi hukum masih sangat kuat mempengaruhi pandangan dan perilaku jajaran pemerintah dan sistem yudisial di Indonesia. Perilaku saling memahami dan toleran atas kesalahan atau kekeliruan masing-masing karena kepentingan bersama masih cukup kuat di jajaran Polisi. Jaksa. Hakim dan birokrasi pemerintah dan TNI. Fakta ini menjelaskan kenapa sistem *check and balance* dalam sistem peradilan pidana yang di atur dalam KUHAP tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Fakta itu menjelaskan kenapa banyak kasus di mana rakyat mem-praperadilankan polisi atau jaksa kandas di pengadilan. Ideologi patrimonialisme yang melahirkan perilaku saling memahami, toleran, dan melindungi kesalahan atau kekeliruan, serta saling menutupi jelas telah menyuburkan praktek korupsi dalam sistem yudisial kita. Perilaku saling memahami, saling menutupi dan tekanan telah pula menggagalkan Sistem Pengadilan HAM kita dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti, kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur, Tanjung Priok, Trisakti Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei dan lain sebagainya.

2. Pengaruh TNI atau setidaknya unsur-unsur dalam tubuh TNI pada jajaran sistem yudisial kita tidak bisa diremehkan. Dalam periode yang panjangTNI mendominasi kehidupan politik, hukum dan pemerintahan. Akses mereka pada tiap sub sistem yudisial masih cukup kuat. ini akan membawa pengaruh pada independensi kinerja badan yudisial. Sistem yudisial kita sangat sulit menyentuh kasus-kasus dugaan korupsi didalam tubuh TNI dan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI.

3. Ideologi pragmatisme [mau cari gampangnya] dan budaya kekerasan masih cukup kuat mempengaruhi perilaku aparat koersif kita seperti, Polisi, Satpol, Tramtib, TNI. dan kalangan sebagian pengusaha kita. Ini mengakibatkan kekerasan masih menjadi pola yang terus berulang dalam menangani kasus pertanahan, konflik sumberdaya alam, perburuhan, unjuk rasa dan lain sebagainya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang mendasar yang terjadi dalam kasus-kasus UMI, Bulukumba, Manggarai, Bojong, dan lain sebagainya menunjukkan masih cukup kuatnya ideologi pragmatisme dan budaya kekerasan. Budaya baru

[reformis] yang mengedepankan negosiasi, persuasi, dan partisipasi masih belum berkembang di jajaran aparat koersif kita.

4. Eksploitasi atau penyalah-gunaan sentimen kultural yang negatif untuk tujuan jangka pendek yang dilakukan oleh pemuka masyarakat maupun unsur-unsur dalam jajaran penegak hukum dan keamanan telah memustahilkan penegakan kedaulatan hukum.

5. Krisis sumberdaya hukum *[a Legal resource]*. Yang dimaksudkan adalah kemampuan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari setiap pengemban hak atau kewajiban hukum sebagai syarat efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum tersebut. Misalnya, sebuah produk hukum mengakui hak-hak rakyat untuk turut serta mengelola lingkungan hidup. Pengakuan hak oleh hukum tersebut tidak akan efektif bilamana rakyat tidak mengetahui dan mempunyai kecakapan untuk mengaktualisasikan hak-hak tersebut, termasuk mendesak pihak pengemban kewajiban, misalnya pemerintah untuk menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut. Disitu sumberdaya hukum, seperti, daya-daya politik dan ekonomi serta budaya sangat diperlukan bagi efektivitas pelaksanaan hak-hak hukum tersebut.

6. Orientasi masyarakat politik kita pada kepentingan jangka pendek, yaitu, kekuasaan dan uang mendorong mereka untuk membuat berbagai kompromi yang mengorbankan prinsip penegakkan kedaulatan hukum. Kompromi kepentingan ini memustahilkan penyelesaian kasus mega korupsi yang diduga melibatkan Soeharto dan konglomerat hitam dan kasus pelanggaran berat HAM.

Jelaslah sudah bila yang dimaksudkan dengan ketertinggalan pembaruan hukum itu adalah tiadanya atau langkanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Maka jelas sebabnya lebih banyak pada faktor-faktor di luar hukum. Oleh karena itu lebih tepat dikatakan, yang sesungguhnya terjadi adalah, bukan ketertinggalan pembaruan hukum. Tetapi tahapan demokrasi yang kita capai belum mampu mewujudkan kedaulatan hukum relatif sebagai syarat bekerjanya negara hukum yang demokratis.

Jakarta, 12 Mei 2005

ttd

Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA



PENGURUS BESAR
NAHDHATUL ULAMA

PERAN ORMAS DALAM PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY

Disampaikan oleh :

DR. Ir. KH. ANDI DJAMARO DULUNG, M.Sc
Ketua PBNU

pada

MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
DI HOTEL MILLENNIUM
JAKARTA, 12 MEI 2005

PENGURUS BESAR
NAHDHATUL ULAMA

PERAN ORMAS DALAM PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Yang saya muliakan, Prof. DR. KH. Abdullah Syam, Ketua Umum DPP LDII, dan seluruh jajaran LDII yang hadir pada siang hari ini, terutama kawan-kawan peserta Munas VI.

Tentu saja di antara yang hadir disini banyak yang sudah saya kenal baik, sebagian di organisasi kepemudaan. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Alloh SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita. Solawat serta salam atas junjungan nabi besar kita, Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa menjadi pengikut-Nya yang setia.

Hadirin yang saya muliakan, pertama -tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari *al mukharom* KH Sahal Machfud dan KH Ahmad Hasyim Muzadi, Pengurus Besar NU. Semestinya beliau hadir di rapat ini, tapi tiba-tiba harus istirahat di RS Medistra. Mungkin karena kelelahan. Saya tadi berkelakar dengan beliau, saya bilang, "Kyai kalau tidak bisa dibesuk, kelasnya sama dengan Pak Harto".

Para hadirin yang saya muliakan, saya ini mewakili beliau. Paling tidak ada syarat yang harus saya penuhi. Syarat *pertama* saya tidak boleh melebihi kecerdasan yang saya wakili. Yang *kedua* tidak boleh sama sekali melebihi kebiasaan lamanya pidato yang diwakili. Tetapi yang harus sama dan tidak boleh berbeda yakni honornya. Itu kalau ada. Tapi biasanya sesama organisasi seperti ini tebal amplopnya tetapi isinya permohonan.

Ya seperti inilah cara saya bersilaturrahmi dengan sesama. Saya diberi judul untuk menyampaikan materi dengan judul *Peran Ormas dalam Pengembangan civil society*. Pengertian *civil society* harus kita terjemahkan

dalam bahasa yang kita pahami. Secara sederhana adalah bagaimana rakyat bisa memiliki keseimbangan wibawa dengan pemerintah. Memiliki keseimbangan dengan lembaga-lembaga. Karena itu rakyat tidak boleh dibodohi atau dibodohi karena ketidaktahuan mereka.

Berdayanya rakyat dapat diukur dengan beberapa indikator ; *pertama* bahwa rakyat bukan hanya mengenal kewajibannya tetapi dia juga mengenal hak-haknya. *Kedua* kalau dia sudah tahu hak-haknya maka dia harus tahu cara memperoleh hak itu. Yang *ketiga* bahwa ada keterbukaan dari seluruh peralatan negara, agar hak-hak warga negara itu terpenuhi. Itulah sebetulnya *civil society* itu. Lalu kalau kita *breakdown*, hak-hak warga negara tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Supaya sama kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara mendapat pendidikan, dan biaya pendidikan itu harus ditanggung negara. Apa ini sudah? Hak warga negara untuk mengajukan pendapat berserikat dan berkumpul. Apa ini sudah apa belum? Hak mendapat penghidupan yang layak itu diatur semua di dalam UUD 45.

Tadi sebelum saya kesini saya didatangi oleh salah satu tamu dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ada orang Banyuwangi di sini? Ada orang yang mewakili delapan orang kawannya, melakukan gugatan terhadap pemerintah mengenahi UU No. 36 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di mana dalam undang-undang tersebut, menyebut anggaran pendidikan nasional itu besarnya 20 persen dari APBN. Jumlah 20 persen itu di luar gaji guru. Sementara realisasinya itu belum pernah melampaui. Padahal itu perintah undang-undang. Nah di dalam penjelasan itu memang ada yang kurang benar menurut versi penggugat, yakni untuk menyesuaikan hingga 20 persen dilakukan bertahap sesuai kemampuan negara. Padahal kalau itu dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah, *insya Alloh* seluruh lembaga pendidikan dapat mengelola dengan leluasa dana sebesar itu. Namun, apakah negara memberi kekuasaan kepada warga negara dengan layak?

Fakir miskin yang dijamin dengan undang-undang, belum ada cara operasional bagaimana menjamin mereka. Padahal ini adalah amanat undang-undang. Bapak sekalian sebelum semua itu tercapai, idealnya *civil society* adalah masyarakat bukan saja mengerti hak atau kewajibannya, tetapi mengerti hak dan kewajibannya, lalu negara memberikan dan memfasilitasi agar masyarakat mendapat haknya. Tetapi kenyataannya, negara belum melaksanakannya. Nah sekarang pertanyaan apa peran ormas agar masyarakat bisa berdaya? Seperti LDII, NU, Al Wasiyah, Persis, dan sebagainya.

Mari lihat kekuasaan partai politik hingga hari ini. *Pertama* dia memiliki kebebasan sampai ke tingkat bawah, untuk merekrut rakyat sehingga dia bisa mempengaruhi opini rakyat. Yang *kedua* ketika ada rekrutmen anggota legislatif. Anda boleh kiai, Anda boleh pimpinan pesantren memiliki puluhan ribu santri, Anda kepala suku, tetapi kalau tidak punya partai politik Anda tidak bisa duduk di parlemen. Itu berarti parlemen dikuasai parpol. Berarti mereka memiliki dua kekuasaan : kepada rakyat dan parlemen. Untuk menentukan eksekutif, harus melalui partai politik. Bayangkan saja, untuk menentukan bupati, gubernur, sampai panglima TNI, jaksa agung, sampai kapolri, ditentukan oleh parlemen. Jadi tangan dan kaki parpol masuk di eksekutif. Lalu mereka juga menentukan jaksa agung dan hakim agung.

Kalau mereka memenuhi kualifikasi tidak apa-apa. Coba bayangkan, saya ini orang NU di PPP atau PKB. Seorang anggota partai PPP atau PKB disuruh meneliti bagaimana orang bisa menjadi kapolri. Kualifikasi apa yang dimilikinya. Padahal sebetulnya di PKB, PPP, atau organisasi lain memiliki lembaga pengkaderan. Mereka yang dikader di parpol, sebenarnya sudah jadi. Tapi yang menjadi anak kiai, tidak melalui prosedur pengkaderan. Berbeda dengan tentara. Tentara kalau mau menjadi anggota DPR paling tidak pangkatnya Letjen atau Mayjen. Itu berarti seorang jenderal sudah merasakan pengalaman komando, pengalaman pemimpin komando, dan pemimpin teritorial. Artinya denyut nadi masyarakat dia sudah tahu. Lalu dididik orientasi selama enam bulan. Itupun bisa lulus dan bisa tidak. Itu yang dilakukan tentara kalau mau menjadi anggota dewan.

Bandingkan parpol, katakanlah yang saya sebut tadi PPP dan PKB, dari takmir masjid langsung ke Senayan. Kalau yang datang ke dewan, menteri agama, tentu mereka yang paling pintar. Tapi kalau yang datang menteri keuangan, mereka pura-pura pegang surat kabar, atau kelihatannya dzikir pegang tasbih, tapi begitu diselidiki dia bersms ria. Nah ini kualitasnya dewan kita, yang diberi amanah menentukan siapa kapolri, panglima TNI, dan berhak menentukan hakim agung dan jaksa agung.

Karena dari takmir mesjid langsung ke Senayan, sehingga tidak jarang terjadi di daerah-daerah pada rapat paripurna DPR atau rapat komisi, mereka meminta izin ke kamar kecil. Karena tidak bisa menulis huruf latin, mereka meminta izin dengan menggunakan tulisan arab gundul. Isinya "Pimpinan sidang saya mau keluar buang air kecil". Begitu sampai ke pimpinan sidang, langsung pimpinan sidang mengatakan, "Wah ini jimat untuk membangun parlemen". Itulah kualitas parlemen kita yang diberi kewenangan yang begitu besar.

Mereka yang ingin menjadi bupati, boleh memiliki dukungan karena suku Anda besar, karena warga NU di situ banyak, karena warga Muhammadiyah di situ banyak. Tapi tidak bisa tanpa melalui pintu partai. Sementara pintu partai sekarang, ternyata tidak hanya dilalui anak atau kader sendiri, tetapi bisa dikontrak oleh tetangga. Tergantung nilai kontraknya. Bisa kita yang lihat, tiba-tiba calonnya PAN, dulu tidak kampanye untuk PAN. Ini terjadi di partai-partai lain. Misalnya setelah kontrak atas nama Partai A, setelah menjadi anggota parlemen atau eksekutif kalau diminta pertanggungjawabannya, menghindar. Alasannya, "Saya beli partai, setelah saya beli selesai urusan. Saya nggak ada yang urusan dengan yang coblos partai A".

Inilah kekuasaan politik yang jauh mengalahkan parpol. Sebenarnya tidak apa-apa partai diberi kewenangan besar, kalau partai itu memang benar melakukan pengkaderan. Benar-benar melakukan seleksi rekrutmen dan kader. Sehingga siapapun kader itu, dia telah melewati seluruh piranti kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan. Tapi partai mana yang sekarang ini melakukan pengkaderan? Terus terang saya pernah punya NPAG [Nomor Pokok Anggota Golkar]. Banyak di sini yang memiliki NPAG. Saya sebagai pegawai negeri juga dapat. Memang pada waktu itu, kalau memilki NPAG, hampir sederajat dengan *rodhianllohu anhu*. Luar biasa hebat. Di organisasi itu memang disiapkan : ada pengkaderan, ada kader fungsional, dan sebagainya. Saya tidak mengkampanyekan partai itu, tetapi apa salahnya yang baik dicontoh yang lainnya. Bila ini ditiru, lahirlah pemimpin dari seleksi yang begitu ketat.

Saudara-saudara yang saya hormati. Kita kembali kepada peran ormas. Meskipun peran masyarakat belum diatur sepenuhnya, namun Anda dapat mengambil peran. Syaratnya kita harus memiliki ormas yang lahir di negeri ini. Dibandingkan dengan ormas yang bertahan dan yang tinggal papan nama, lebih banyak yang tinggal papan nama. Mereka yang bertahan, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis, karena mereka memiliki lembaga pendidikan.

Jakarta, 12 Mei 2005

ttd

DR. Ir. KH. Andi Djamaro Dulung, M.Sc
Ketua PB Nahdhatul Ulama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAGAIMANA MENGHADAPI GLOBALISASI

Disampaikan oleh :

PROF. DR. KOMARUDDIN HIDAYAT

Guru Besar Filsafat dan Direktur

Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah

pada

MUSYAWARAH NASIONAL VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

DI HOTEL MILLENNIUM

JAKARTA, 11 MEI 2005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

BAGAIMANA MENGHADAPI GLOBALISASI ?

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh.

Saudara sekalian saya sangat terperanjat, saya hadir di forum yang sangat terhormat dan meriah ini, se-Indonesia. Jadi betul-betul di luar bayangan dan dugaan saya. *Masya* Allah luar biasa, sehingga, walaupun tadi saya memberi kuliah ketika masuk ke sini jadi seger.
Saya ingin memberi materi untuk *training,* tapi saya ingin ringkaskan yaitu bukan islam dan peradaban global, tapi satu materi bagaimana menghadapi peradaban global dan bagaimana kita bersikap.

Kebetulan yang hadir di sini adalah para *mubaligh,* jadi saya tak usah memberi kata pengantar. Sama-sama guru jangan saling mengganggu, sama-sama seprofesi jangan saling ganggu, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Jadi saya tak ada beban. Tepuk tangan boleh, caci maki juga boleh.

Sebab ada cerita, ada orang kena insomnia, yaitu orang yang sulit tidur. Lalu tanya ke dokter, "Saya telah meminum bermacam obat tapi kok belum sembuh". Dokter menjawab, "Oo, satu syaratnya kalau ingin sembuh, datanglah ke mesjid waktu solat jum'at". Dan betul ketika mendengarkan khutbah, ngantuklah dia, sembuh. Jadi, obatnya, ternyata menghadiri sholat Jumat.

Nah ini, dunia modern yang kita hadapi[1]. Anak-anak kita di ibukota, generasi muda seusianya di seluruh dunia, bukan hanya mendengar musik rebana tapi juga musiknya orang kafir. Tapi ternyata lagu-lagu Timur Tengah, Arab Lebanon itu isinya sama saja. Bahasanya Arab, tapi isinya sama saja: kafir! Bukan hanya bahasanya ternyata, tapi isinya, dan bagaimana

[1] Saat mengatakan kalimat ini, proyektor menampakkan gambar suasana kota metropolitan, yang serba canggih, indah, nyaman, sekaligus macet di sana-sini. Sepanjang pemaparan ceramah, Komarudin menggunakan proyektor yang menayangkan adegan visual diiringi gemuruh musik yang berdentam-dentam, semisal studio bioskop.

menyikapi? Saya kalau dakwah pakai musik, biar nggak ngantuk, jadi yang sakit insomia itu biar saja, jangan tidur.

Judul ceramah saya adalah *The Art of Happyness*, bagaimana memperoleh kebahagiaan *sya'adah*, bagaimana kita bahagia dalam dunia yang gila? Dunia boleh kacau boleh gila tetapi bagaimana kita meraih hidup bermakna bahagia.

Kapan anda *happy*? Wah ini jawabannya sulit, kapan anda merasa bahagia? Ya ketika dapat rapel, mungkin! Ketika anak-anaknya lulus ujian, bisa jadi! Ketika istrinya mengizinkan kawin lagi, mungkin saja! Macam-macamlah jawabannya bahagia itu.

Jadi, bahagia bisa dinyatakan. Tetapi kalau didefinisi, kapan anda bahagia? Mengapa anda bahagia? Semakin sulit ini, mengapa? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kapan pantat anda merasa bahagia? Ketika gatel dikukur, oke! Ketika mendapatkan kursi yang empuk. Ketika dapat kursi yang empuk ada yang ngiri, siapa yang ngiri? Punggung kita, kenapa nggak sandaran ya kan?

Setelah duduk mau bengong. Mulutnya suruh apa? Makan! Telinganya? Macam-macam. Bahagia itu macam-macam jawabannya. Tapi, ketika berbagai kebutuhan terpenuhi, nah *where is happyness?* Di mana kebahagiaan itu? Ada yang mengatakan kebahagian itu sebuah seni. Not lagu itu ada berapa macam? *Do re me fa sol la si do*. Hanya tujuh. Sekarang saya tanya berapa banyak jumlah lagu yang tercipta oleh tujuh not balok itu? tidak terhitung. Padahal hanya tujuh.

Gitar itu berapa senarnya? Berapa banyak tercipta nyanyian dengan gitar? Kalau anda diberi gitar untuk apa? Jadi yang membedakan *skill* yang membedakan modal kita. Sehari sama-sama 24 jam, tapi hasilnya berbeda-beda. Kalau kita ceramah dan marah energinya sama nggak? Sama-sama mengeluarkan suara tidak? Tapi hasilnya berbeda. Artinya bahagia menyangkut seni yaitu bagaimana kita meraih bahagia dengan memanfaatkan atau memainkan modal yang ada.

Ketika ada kecelakaan itu objek bagi wartawan. Sebelum menolong difoto dulu. Mau menolong ditanya dulu, Anda Islam apa bukan? Kalau Islam saya tolong. Eh nanti dulu NU atau Muhammdiyah? Saya NU. Ini NU Gusdur atau Hasyim Muzadi? Oh saya PKB Alwi Shihab, atau ahh Muhaimin! Menyikapi situasi itu ada referensinya. itu seni. Jadi bagaimana menyikapi

nilai-nilai apa yang akan menentukan perilaku kita menentukan pilihan. Ada tanda-tanda kebahagiaan. Ini tidak absolut. Yang *pertama* adalah yang paling mudah. Bahagia itu berhubungan dengan fisik jasmaniah. Fisik makan enak, duduk yang empuk, Kebahagian fisik yang tertinggi berupa kesehatan. Demi kesehatan seseorang rela mengeluarkan depositonya sampai miliaran.

Ada suatu dongeng, seorang raja berburu pada saat malam. Saking asyiknya mengejar hewan buruannya dia nyasar sampai padang pasir. Jauh dari desa jauh dari mata air. Pada siang harinya, matahari semakin tinggi maka ia merasa haus sekali. Pas haus ada musyafir lewat, Nah ini kebetulan botol musyafir kelihatan.

Dia bilang, "Tolong saya ini haus sekali saya minta air," kata raja.
"Tidak boleh ini bekal saya. Saya mau pergi jauh sekali," jawab musyafir.
"Moso minta nggak boleh".
"Kalau beli saya pikirkan, ya sudah beli berapa kau punya duit?"
"Seribu!"
"Wah nggak boleh!"
"Mengapa tidak boleh?"
"Sampai sejuta minuman itu nggak boleh!"
"Saya ini raja!"
"Wah kebetulan kalau raja, kamu punya berapa istana?"
"Saya punya dua".
"Sekarang begini satu istana satu gelas. Kalau mau saya kasih, tapi kalau nggak saya akan pergi jauh".

Raja ini bingung. Kalau sekarang kira-kira menelepon *handphone* istrinya, "Saya ini haus sekali, tetapi harus menukar dengan istana. Ini bagaimana, saya harus pulang jadi mayat atau pulang hidup tapi istananya hilang". Kebetulan istrinya setia. Kalau istrinya kurang ajar, bisa bilang mati *aja deh*. Akhirnya istrinya bilang, "Biarkanlah kita relakan".

Akhirnya dia relakan kunci salah satu istana, ditukar dengan segelas air demi menjaga kesehatan secara fisik. Mahal sekali. Sekarang anda raja-raja kaya-kaya, pertanyaannya, setelah sehat mau apa? Pertama sehat itu harus fisik, tapi mau apa?

Raja pun pulang. Sesampai di desa ingin pipis. Tapi rasanya sakit sekali, lalu kalau tidak pipis bagaimana? Mencari dokter kemana-mana tidak ada, tetapi ada tabib terkenal. Ketika dia tahu yang berobat adalah raja, dia

meminta bila sembuh satu istana kalau tidak sembuh dia meminta dipenggal lehernya.

Raja kemudian menelepon lagi istrinya, "Gimana ini pulang tapi kalau *tititnya* sakit gimana? Nggak bisa kencing kan sakit". Akhirnya kesembuhan itu ditukar dengan istana. Istana lepas Bapak-bapak, tapi kencingnya lancar. Kenikmatan fisik itu mahal. *Masya* Allah, *alhamdulillah,* kesehatan fisik memang harus disyukuri. Kadang-kadang kita ini tidak bersyukur kecuali pada waktu sakit.

Kesehatan itu bagaikan mahkota sang raja. Kita baru menikmatinya bila mahkotanya lepas. Kebahagiaan fisik (*physical happyness*) adalah apa yang membuatmu bahagia secara fisik? Misalnya ingin langsing agar bisa berpakaian dengan bagus. Berapa banyak uang yang di belanjakan istri-istri untuk mempercantik diri. Berapa banyak bapak mengeluarkan biaya untuk fisik di mall-mall. Ada banyak macam untuk mendapatkan kebahagiaan fisik, tapi ingat setelah sehat untuk apa, itu pertanyaannya?

Kalau orang mendambakan kesehatan fisik, siap-siap semakin hari semakin bangkrut. Ketika muda ingin makan enak – lalu kerja keras – tapi setelah punya duit tidak boleh makan enak, tidak boleh makan daging kambing, tidak boleh olahraga. Tidak boleh macam-macam. Fisik itu hanya sesaat. Fisik terkena hukum nabati. Seperti pohon, wanita usia 10 tahun selalu ceria, seperti pohon yang sedang tumbuh : ceria, cantik, dan manis. Ketika umurnya belasan, *wah* lagi mekar-mekarnya : jadi kembang desa. Tapi itu hanya sesaat, makanya orang kalau mengandalkan fisik sesaat. Lambat laun condong, daunnya menguning, rontok.

Ibarat pohon, manusia pun semakin tua giginya kropos dan rambutnya putih. Bapak-bapak sebagian rambutnya sudah putih, kena angin juga roboh. Makanya jangan mengandalkan kehebatan fisik. Berapa lama untuk meraih jabatan? Setelah punya jabatan *so what?* Manusia berasal dari sperma yang mirip kecebong, untuk menyebutnya saja malu. Lalu manusia mengalami pertumbuhan, istri kita yang kita cintai nantinya akan tua renta, jadi langganan dokter. Ya batuk, ya beser, ya bengek. Kalau sudah tua dibawa ke salon, pegawai salonnya malah jadi bingung, mau diperbaiki apanya.

Makanya, sekali lagi kalau hidup hanya mengejar *physical happyness* bersiap-siaplah, yang lalu tetap berlalu dan yang sekarang banyak kurangnya. Bapak-bapak bisa buat daftar, kekurangan, pasti banyak kurangnya. Akan

datang suatu kepastian, yang pasti kita tua renta dan ujungnya mati. Iya kalau matinya *khusnul khotimah*. Iya kalau sebelum meninggal nggak ngerepotin orang lain, iya kalau sakaratul mautnya sebentar. Maka, kalau kita membanggakan hidup ini hanya fisik siap-siaplah untuk kecewa pada dunia.

Kenikmatan dunia itu kenikmatan yang menipu. Keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, para politisi, jangan hanya mengejar *physical happyness*. Kebahagiaan ini diraih dengan merebut atau menjegal kawan. Manusia bisa ditertawakan gajah. Manusia bisa mengangkat beberapa kilo sudah minta medali, gajah mengangkat beban tak pernah minta medali.

Manusia seringkali mengeluarkan biaya untuk membeli gaya hidup. Akhirnya menetapkan yang bernilai itu bajunya dan mobilnya, bukan orangnya. Akhirnya beli mobil bagus, yang nikmati sopirnya. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Dengan uang bisa membeli hingar-bingar. Tapi belum tentu uang dapat membeli ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan karena uang orang bisa berantem, karena uang orang bisa dipanggil ke meja hijau, karena uang, teman-teman saya di KPU bernasib sial.

Manusia membeli buku, tapi tidak untuk menulis. Manusia membeli buku tapi tidak mendapat pengetahuan, bisa membeli jam padahal belum tentu punya waktu luang. Malah sering dikejar jam bikinan manusia. Uang juga bisa untuk membeli kawan, tapi kawan untuk hura-hura. Sangat berbeda antara kawan posisional dan kawan personal.

Allah menciptakan diri kita dengan meniupkan roh ilahi-Nya, di dalam kandungan ibu kita selama sembilan bulan. Maka instrospeksilah. Kita di dalam bumi ini, bahwa dari sekian banyak galaksi di antaranya bintang-bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan mata Anda jauhnya 500 triliun kilometer.

Mari kita lihat letak diri kita dari galaksi kita. Ada sekitar 250 milyar bintang dalam galaksi Bimasakti. Bumi kita hanyalah salah satunya dari sembilan planet yang mengililingi Matahari dalam keselarasan tinggi. Seluruh sistem ini disebut tata surya. Bumi kita menempati satu ruangan yang teramat kecil. Jika Anda bayangkan bumi sebagai kelereng, maka Matahari bagaikan bola kaki berjarak 280 kilometer. Walaupun berukuran raksasa galaksi Bimasakti hanya menempati ruangan kecil diantara 200 miliar galaksi.

Jadi kalau kita nggak sujud kepada Alloh mau sujud kepada apa? Kalau

kita tidak meraih *maqom* spiritualitas sebagian kita mau apa? Kita ini kecil sekali, Coba kita sekarang menelusuri ke dalam tubuh diri kita ini. Pori-pori ketika ditelusuri terdiri dari himpunan sel-sel. Kalau anda memakai kaca mata *rontgen* yang super hebat, yang namanya cantik dan tampan nggak ada. Yang ada itu tulang-tulang dan pori-pori. Bila ketampanan itu hilang yang ada hanyalah sumber penyakit di dalamnya. Dan sel-sel itu akan rusak kalau kita salah makan.

Sejak dari galaksi dan sel yang paling bawah, atom dan galaksi semua bergerak *towaf*. Maka ketika *towaf* di Mekah kita *towaf* bersama jagad raya dan sel-sel diri kita yang paling kecil. Dan gerakannya sama seperti mengitari Hijr Ismail, memutar ke arah kiri. Kita dari tanah kembali ke tanah. Sebagian tubuh kita dimakan oleh cacing. Tapi karena kita yakin ada roh Ilahi dalam diri kita, itu yang paling berharga, tapi itupun kalau kita laksanakan sebagai khalifah. Mengapa mayat kita ditanam dalam tanah? Karena tanah itu bisa mengurai dan ujungnya fana, baiklah Bapak ibu sekalian ini yang bisa saya sampaikan semoga manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Mei 2005

ttd

Prof. DR. Komaruddin Hidayat
Guru Besar Filsafat dan
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri [UIN]
Syarif Hidayatullah

UNIVERSITAS PARAMADINA

SEJARAH PERGERAKAN ISLAM DI INDONESIA

Disampaikan oleh :

DR. YUDI LATIF

Wakil Rektor Universitas Paramadina

pada

MUSYAWARAH NASIONAL VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

DI HOTEL MILLENNIUM

JAKARTA, 12 MEI 2005



UNIVERSITAS PARAMADINA

SEJARAH PERGERAKAN ISLAM DI INDONESIA

Assalamualaikum wr.wb

Muqoddimah
Robisrohlisodri wayasirli amri wahluluqdatan milisani yahqohu qouli

Hadirin sekalian Bapak-bapak, Ibu-ibu saya berdiri di sini karena terlalu pendek di sana, bahwa saya berdiri disini masih terlalu pendek rupanya, mudah-mudahan pendeknya tubuh tidak mencerminkan pendeknya pikiran.

Karena hari ini saya menulis di koran Kompas[1], mengenai keprihatinan bahwa kita harus memuliakan kembali pikiran setelah semua gugus kelompok organisasi masyarakarat menanggalkan pikiran dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk prakmatis dan kekuasaan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini telah mengembirakan saya, bahwa kiamat masih jauh bukankah ada suatu hadist yang mengatakan, bahwa bila dunia ini masih dihuni orang beriman, maka pertanda masih panjang usia dunia ini.

Dan yang lebih menggembirakan, saya telah berbicara di depan aktifitas komunitas organisasi LDII. Barangkali Bapak-bapak tidak sadar, bahwa LDII adalah organisasi masa pertama di Indonesia yang menggunakan kata dakwah, Meskipun kata dakwah berasal dari bahasa arab dan sangat tua usianya, tetapi popularitas kata dakwah di Indonesia baru kira-kira muncul pada tahun 60-an. Di Indonesia sebelum tahun 60-an kata-kata dakwah nyaris tidak pernah digunakan. Biasanya kata populer yang digunakan yaitu *tabligh*,

Memasuki tahun 60-an ketika gerakan poltik Islam mengalami kesulitan

[1] Pada tanggal 12 Mei 2005, Yudi Latief menulis opini di *Harian Umum Kompas* berjudul : *Memuliakan Kembali Pikiran*, yang terbit bertepatan dia memberikan materi di depan peserta Munas.

untuk berkiprah, seperti misalnya Masyumi tidak lagi diizinkan untuk mengikuti pemilu di era Soekarno.

Ada banyak evaluasi yang muncul. Mengapa di Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam tetapi kalau masuk pada Islam politik Islam, selalu dalam posisi marjinal? Maka situasi-situasi tahun 60-an itu melahirkan banyak refleksi, misalnya di Masjid Tanah Abang dan sebagainya, kelompok Natsir, Masyumi, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah berkumpul. Mulai membedah sebenarnya apa yang membuat Islam sejak Indonesia merdeka tidak pernah memperoleh tempat terhormat di republik ini.

Maka mereka menyimpulkan, pertama, meskipun mayoritas penduduk di Indonesia adalah orang Islam tetapi yang benar-benar paham terhadap Islam itu hanya sedikit saja. Kedua, meskipun sebenarnya, kalau dihitung-hitung para politisi Islam atau wakil dari ormas Islam banyak di parlemen, tetapi mengapa mereka kesulitan mengatasi tantangan dari kelompok lain dan bagaimana menjalin kerja sama di kalangan orang-orang Islam. Itu susahnya bukan main.

Saya akan gambarkan nanti. Sebenarnya jika orang Islam bersatu apapun yang dikehendaki di parlemen, bisa! Tetapi masalahnya, seperti istilah lama: orang Islam itu senengnya eker-ekeran. Atas dasar itu, timbul refleksi jadi apa yang salah dengan gerakan-gerakan ormas-ormas Islam selama ini? Antara lain disimpulkan bahwa kelihatannya selama ini gerakan-gerakan seruan keagamaan itu masih berbasis stabil, artinya dakwah hanya garisan saja. Hanya semata-mata santapan rohani. Apa artinya disantap? Masuk telinga kanan keluar telinga kiri yang kadar kedalamannya – mengutip salah satu hadits -- hanya sebatas tenggorokan. Tidak pernah masuk menjadi inspirasi dan motivasi, menjadi darah hidup yang terefleksi dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu mereka berpikir barangkali istilah tabligh ini tidak terlalu cocok karena terlalu menekankan aspek krusial, ceramah, dan kotbah. Dakwah seperti itu tidak menyentuh pokok persoalan umat di akar rumput. Dakwah krusial tidak bisa menyelesaikan problem-problem kemiskinan, problem-problem ketertinggalan, dan problem-problem dekadensi moral. Pada tingkat yang paling real dakwah harus memberikan masukan, bagaimana memulihkan ekonomi umat, bagaimana memberdayakan jaringan-jaringan dakwah Islam. Sehingga betul-betul melindungi orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Dakwah juga harus memberikan masukan bagaimana bisa memberikan

suatu proteksi terhadap kecenderungan meluasnya budaya hedonisme dan materialisme, yang dihembuskan lewat layar televisi, layar tancep, video-video porno, yang masuk menembus desa-desa di Indonesia.

Sejak itu mulailah di produksi kata dakwah. Di dalam kata dakwah atau menyerukan ada dalam salah satu ayat *qudusabillah robika hikmah malburutilhasanah* wa *jadawalladihaksadah* ; semua manusia kejarlah Allah dengan hikmah, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan strategi yang baik, dan dengan cara-cara yang baik yang tepat guna. *Wajahidunmilatiyahasan* dan berwacana, beragumen secara kreatif, cerdas. Dan karena dakwah ini memungkinkan bahwa seruan-seruan keagamaan tidak hanya melulu mengandalkan seruan-seruan lisan, tapi bisa lewat dakwah lewat perbuatan. Karena sesungguhnya seperti dikatakan bahwa Rasulullah adalah *uswatun hasanah,* satu teladan. Di mana semua perilaku, perangai, gerak gerik, kebijaksanaan, dan perbuatan itu adalah seluruhnya adalah dakwah.

Segala tingkah laku Nabi Muhamad itu *hayatu qullu alquran*, adalah Alquran yang berjalan. Rasulullah adalah Alquran yang berjalan. Kita sudah tahu bagaimana perangnya Rasulullah terhadap musuh dan sebagainya yang pada akhirnya membuat musuhnya pun harus pada hormat, itu bukan pada kata dan perbuatan. Bagaimana Rasulullah membebaskan orang-orang fakir, hamba sahaya seperti Aswad.

Dari orang yang sangat hina dina menjadi terangkat derajatnya. Ketika pintu kota Mekah dibuka, dia membawa bendera di barisan paling depan dan Aswad mendekat Rasulullah. Melihat itu, panglima barisan berkata, *iswatu,* luruskan barisan! *Iswatu,* luruskan barisan! Panglima itu mengatakan berkali-kali, agar Aswad mengerti tempatnya bukan di depan. Tapi Aswad semakin maju ke depan, lalu mencium Rasulullah. "Tetaplah di depan," demikian sabda Rasulullah SAW.

Lalu, Aswad untuk pertama kalinya berada dalam barisan paling depan membawa bendera Islam. Ini suatu posisi yang sangat terhormat. Melalui Aswad inilah Islam menyebar ke Maroko, Afrika, Cordoba. Itulah contoh dakwah yang membebaskan. Yang membebaskan, yang membesarkan, yang memberi dorongan semangat kepada fakir miskin dan orang-orang *mustadzafin*. Mereka merasa dibangkitkan marwah dan harkatnya. Jadi orang-orang terhormat.

Kalau sudah begitu maka gerakan dakwah sangat tidak bisa tertahankan

oleh gerakan apapun. Jadi LDII adalah sebuah dari semangat pada akhir tahun 1960-an, yang kemudian memunculkan literatur-literatur yang luar biasa banyaknya. Pada awal 1970-an setidaknya ada 100 buku, kemudian pada 1970-an, terjadi pertikaian dalam dakwah. Saya kan penyelidik sehingga tahu persis dengan judul-judul buku itu.

Kemudian ada namanya Dewan Dakwah Islamiyah, tetapi itu bukan ormas yang berbasis masa luas. Tetapi lebih pada *think tank* dari umat yang kecil saja. Yang sebenarnya berfungsi, sebagai pendidik kader-kader dakwah di kampus-kampus, kemudian pendidikan di pesantren-pesantren. Tetapi setahu saya, ormas pertama yang mewujudkan semangat dakwah dalam bentuk ormas, dengan jaringan masa yang luas adalah LDII.

Oleh karena itu kita berharap banyak bahwa LDII benar-benar harus menjadi pionir penggerak dan inovator di dalam gerakan-gerakan dakwah di Indonesia. Dengan presentasi dan perwakilan yang begitu banyak sebenarnya kita berharap bahwa gerakan Islam di masa depan akan lebih kreatif. Ini baru pembukaan Bapak-bapak!

*****

Kalau kita memasuki gerakan dakwah kita harus mengerti fase-fase, dari gerakan Islam di Indonesia, untuk tahu persis di mana posisi ormas Islam sekarang dan apa agenda terpenting ormas islam sekarang.

Kalau kita mulai membicarakan gerakan Islam kontemporer, ini dimulai pada awal abad ke-20. Gerakan-gerakan ormas keagamaan di dunia ini, pada dasarnya sebagai respon terhadap penjajahan, sebagai respon terhadap modernisasi yang diproduksikan oleh kekuatan penjajahan Belanda. Generasi pertama intelegensia atau Intelektual Islam itu, kira-kira telah lahir pada akhir abad ke-19, tetapi mulai bersekolah tetapi mulai bersekolah dan selesai SMP pada tahun-tahun pertama abad ke-20.

Generasi ini terdiri dari dua golongan penting, yang menggerakan mengobarkan gerakan Islam. Pertama, adalah mereka lulusan sekolah-sekolah Barat yang menyimpang dari skenario Belanda sendiri. Kedua, adalah ulama yang disebut ulama intelek yaitu ulama yang mulanya berbasis di pesantren, bersekolah di pesantren atau kemudian melanjutkan ke Timur Tengah. Namun karena perkenalan dengan pendidikan Belanda di Indonesia, mereka terpengaruh oleh gerakan-gerakan pendidikan awal dari Belanda. Perkenalan ini dimulai dengan masuknya koran-koran berbahasa latin, dan sebagainya. Sehingga mereka mulai melek pengetahuan modern. Mereka

menjadi pelopor awal dari gerakan dakwah atau gerakan keagamaan di Indonesia kontemporer.

Dari sisi intelektual, kita melihat angkatan pertama yang terdiri dari Agus Salim, Cokroaminoto, Abdul Muis, Suryopranoto dan sebagainya itu generasi pertama. Merka menjadi generasi yang berpihak kepada Islam karena efek bumerang dari kebijakan diskriminatif kolonial. Jadi pada mulanya gerakan liberal Belanda yang diajukan oleh politik etis itu dimaksudkan untuk melakukan sekularisasi terhadap elit bumi putra. Dengan pemikiran bagaimana menjadikan negara Nederland Raya yang terdiri dari dua wilayah geografis, yang satu di Eropa Barat [Belanda] yang satu di Asia Tenggara [Indonesia].

Yang secara geografis berbeda, tapi bisa disatukan secara sepiritual menurut subprogram arsiteknya. Kuncinya terletak pada kepemimpinan Indonesia. Supaya pemimpin-pemimpin baru ini bisa bersahabat dengan Belanda. Dengan syarat tidak dari kalangan pemuka-pemuka adat tradisional, karena mereka terlalu konservatif, tidak menguasai perkembangan modern. Pada saat yang sama, tidak mungkin mendatangkan dari keturunan santri yang kuat karena kiblatnya ke Mekah bukan ke Nederland. Bila mereka yang menguasai Indonesia, jelas tidak mungkin bisa dipersatukan.

Oleh karena itu harus ada upaya pendidikan, untuk mendidik elit-elit baru dengan cara melakukan proses sekularisasi di dunia pendidikan. Maka tibalah orang seperti *Agus Salim pada waktu kecil sudah masuk Madrasah,* mulai terpengaruh oleh pergerakan-pergerakan reformisme dan modernisme. *Seperti halnya Abdullah Ahmad* dan kawan-kawannya di Sumatera Barat. Ketika masuk ke LLS dan HBS, dia juga tinggal di Keluarga Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS, Agus Salim mengatakan sejak kecil dia dididik dalam pengkuan pendidikan agama, namun setelah menyelesaikan sekolah HBS, dia merasa kehilangan iman.

Hal yang sama juga terjadi pada Cokroaminoto, cucu dari K. H. Hasan Besari yaitu bapak dari para pendiri Pesantren Gontor. Dia sebenarnya anak-anak kyai, namun bapaknya sekaligus Wedana di Madiun. Bapaknya memasukkan di ke OSPIA, sekolah *ambtenar.* Di sana dia juga mengalami *brain washing,* pencucian otak melalui virus-virus sekularisasi. Sehingga setamat OSPIA, dia mengatakan, bahwa dia tak ada kaitannya dengan gerakan-gerakan dakwah Islam.

Orang-orang ini tadinya keturunan dan lahir dari keluarga santri. Lalu

masuk ke sekolah-sekolah Belanda sekuler sehingga hilang keimanannya. Namun mereka kembali ke Islam karena mengalami diskriminasi kolonial.

Agus Salim misalnya. Ketika bekerja di staf atase Belanda di Jedah, merasa dimarjinalkan oleh atasannya, seorang Belanda. Dia selalu disisihkan dinomorduakan, selalu dipandang tak berotak, dan sebagainya. Perbuatan atasannya itu mengantarnya ke Harmain, kelompok komunitas Jawa di Mekah. Dia bertemu Syeh Al Khatib, pamannya. Sejak itu dia berkenalan lagi dengan Islam. Dan ketika pulang ke tanah air, dia bergabung dengan Serikat Islam. Itulah yang membawa dia kembali ke komunitas Islam, dan sejak itu dia menjadi pejuang gerakan-gerakan Islam. Hal sama terjadi pada Cokroaminoto – bila saya uraikan habis waktunya.

Nah, patner dari kelompok-kelompok intelektual ini adalah ulama intelek. Tokoh penting dari ulama intelektual pertama adalah Syeh Al Khatib. Dialah ulama terbesar Melayu Indonesia. Di Harmain dia kyai ulama, tapi sebelum berangkat ke Mekah, pernah mengenyam pendidikan Barat, berupa sekolah pendidikan guru di Sumatera Barat. Jadi ketika dia ke Mekah dia sudah melek juga pengetahuan umum, yang memungkinkan dia mendidik kader-kader ulama intelek baru.

Maka murid-murid Syeh Al Khatib adalah ulama-ulama intelek yang menggerakkan organisasi Islam Indonesia. Sebutlah murid dia seperti Abdul Ahmad yang mendirikan sekolah Abadiyah di Padang. Lalu ada Taherjalaludin yang mendirikan Majalah Al Munir. Dia pindah ke Singapura, lantaran bila tetap di Sumatera Barat tidak cocok dengan budaya dominasi kaum perempuan. Kemudian Achmad Dahlan. Bahkan pemimpin-pemimpin ulama tradisional pun seperti Hasyim Ashari di Jombang, Jawa Timur dan Sulaiman Alusuri di Padang Panjang, Sumatera Barat, adalah murid-murid terakhir Syeh Al khatib

Di samping mempelajari ilmu-ilmu tradisional seperti mahzab Syafii, Syeh Al Khatib menganjurkan murid-muridnya melancong ke Mesir. Untuk mempelajari pemikiran-pemikiran Islam kontemporer.

Sebenarnya, gerakan-gerakan dakwah Islam di Indonesia disebarkan oleh para pedagang dan suku-suku yang gemar berdagang. Maka tanda arkeologinya begitu jelas. Di Pati, Demak, dan di Tuban, mesjidnya berseberangan dengan pasar. Di mana ada Masjid disitu ada pasar, karena Rosul kita adalah Rosul yang berprofesi sebagai pedagang.

Sejak zaman dahulu, santri identik dengan pemilik modal dan pedagang.

Pada awal abad ke-19 dengan masuknya kapitalisme Eropa akibat liberalisme, perkebunan-perkebunan mulai jatuh ketangan Belanda. Kemudian masuklah imigran-imigran dari Cina dan sebagainya. Melalui perbankan, usaha-usaha besar muslim dikuasai oleh orang asing dan Eropa.

Lalu muncullah ormas yang berdasarkan kepriyayian, tapi kurang kaitannya dengan dunia dagang. Basis utama mereka tidak cukup kuat, jaringannya juga tidak begitu kuat. Sehingga bila menyebut Budi Utomo sebagai awal pergerakan nasional sebenarnya tidak patut sebagai gerakan kebangkitan nasional. Karena semangatnya jawasentris.

Tidak ada satupun tanda-tanda, Budi Utomo harus diselebrasikan atau dirayakan sebagai gerakan pembangunan. Karena sangat ekosentrik anti jawa anti non jawa dan sangat elitis. Tapi mereka memiliki pendidikan yang sangat bagus, ini tercermin dari wakil-wakil mereka di Voolskard pada tahun 1917-an. Pada waktu itu hanya ada dua wakil dari Serikat Islam sisanya kurang lebih lima sampai enam orang barasal dari Budi Utomo.

Pada zaman itu orang pendidikan termaju bergabung dengan organisasi-organisasi non Islam, semisal Budi Utomo, Indische Partij, dan sebagainya. Tapi meskipun sedikit, mereka dipikul oleh kekuatan-kekuatan pedagang muslim dan langsung menyantuni orang-orang di akar rumput. Ingat! sejak Perang Jawa 1825 hingga 1830, orang-orang miskin dan petani di Jawa kehilangan kepemimpinan. Mengapa? Karena setelah itu pangrehpraja ditarik oleh kolonial, untuk dijadikan aparaturnya. Sehingga pedesaan dan petani-petani kehilangan kepemimpinan.

Baru ketika Sarekat Islam muncul dengan kepemimpinan ulama intelektual, membela mereka, membela pergerakan buruh, membela para petani. Dengan segera saja, basis massa yang luas itu, membayangkan ratu adil, membayangkan adanya penyelamatan baru, dan bergabung dengan Sarekat Islam. Maka posisi Sarekat Islam menjadi organisasi massa pertama di Indonesia yang berskala nasional. Generasi pertama dari ormas Islam, basis massanya kuat, tetapi pendidikan modern lemah.

Generasi pertama menghadapi serangan ideologis, sebab pada 1914 masuk Marxisme, yang dikampanyekan pengikutnya. Sehingga timbul perpecahan pada Sarekat Islam, berupa Sarekat Islam merah dan Sarekat Islam Putih. Kita dapat melihat musuh berat waktu itu Marxisme dan komunisme. Lalu untuk membendung Marxisme, Agus Salim dan Cokroaminoto mengumandangkan sosialisme Islam, sebagai lawan sosialisme Marxis.

Pada awal abad ke-19 dengan masuknya kapitalisme Eropa akibat liberalisme, Pada tahun 1924, Cokroaminoto menulis *Sosialisme Islam,* yang berkeinginan menghidupkan gerakan-gerakan ekonomi umat. Ideologi sosialisme Islam mampu menekan kapitalis Eropa dan Cina, sekaligus melawan komunisme.

Pada awal abad ke-19, lahir generasi kedua seperti Natsir, Roem, Yusuf Wibisono, Kasman Singodimejo, dan sebagainya. Jumlah mereka makin banyak, karena syarat pendidikan makin dilonggarkan, terutama syarat keturunan. Sehingga memungkinkan anak-anak kyai dan bangsawan rendahan bisa masuk pendidikan barat. Maka kita mendapati kebanyakan pemimpin Masyumi, kebanyakan adalah anak bangsawan rendahan. Misalnya Natsir adalah anak dari juru tulis tingkat Kecamatan, Yusuf Wibisono anak seorang mantri ukur, dan yang paling tinggi adalah Roem anak seorang lurah. Generasi pertama kemudian mengkader mereka. Agus Salim menjadi mentor mereka dalam Organisasi Perhimpunan Pemuda Pelajar Islam. Cita-cita Islam kontemporer, gerekan organisasi Islam pertama, mencita-citakan islamisasi kaum pelajar.

Mengapa? Hal ini timbul karena rasa sakit hati dan kekecewaan Raden Syamsu Rizal, Ketua ke-6 Jong Java, yang melihat beberapa misionaris Kristen, di antaranya Hendrik Kremer, yang masuk mangajarkan kekatolikan, kekristenan, dan teologi. Kremer juga berusaha menguasai organisasi dan para pelajar muslim. Syamsu Rizal berpendapat bila kekristenan diajarkan mengapa Islam tidak diajarkan kepada para pelajar Islam? Masalah ini dibawa ke kongres Jong Java, pada tahun 1924. Perdebatan mengenai pelajaran agama Islam ini berakhir dengan 50 : 50, dan ide pelajaran Islam ditolak. Akhirnya Syamsul Rizal kecewa berat, lalu keluar. Kemudian Agus Salim membujuknya supaya jangan bersedih, dan mendirikan organisasi sendiri .

Generasi ketiga, berikutnya memperoleh perlawanan dari munculnya kelompok nasionalis sekuler. Ini akibat pendudukan Jepang, yang mengambil alih seluruh sekolah dan universitas yang didirikan Belanda. Pendidikan saat itu menekankan kemiliteran dan bela negara. Yang pada akhirnya malah menumbuhkan jiwa nasionalisme, dengan pemikiran nasionalis. Inilah yang kemudian bersaing secara ideologis dengan kelompok intelektual Islam.

Jakarta, 12 Mei 2005

ttd

DR. Yudi Latif
Wakil Rektor Universitas Paramadina

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN INTELIJEN KEAMANAN
Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

No. Pol. : STTP/YANMIN/ 66 / V / 2005 / BAINTELKAM

1. Telah terima surat dari : **DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (DPP LDII)**

2. Nomor Surat : SUM-180/DPP LDII/IV/2005

3. Tanggal Surat : 27 April 2005

4. Perihal : Menyelenggarakan Musyawarah Nasional VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 – 13 Mei 2005, bertempat di Hotel Millennium Jakarta, yang dihadiri oleh ± 750 orang, penanggung jawab kegiatan Sdr. Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, Selaku Ketua Umum DPP LDII.

5. Alamat/No. Telepon : Jl. Tawakal IX No. 13-15 Jakarta Barat
Telp. 62 21 560 5851 / Fax. 62 21 563 3197

6. Pemberitahuan telah memuat keterangan tentang :

   a. Identitas penyelenggara (Organisasi/Badan Hukum/Perorangan).

   b. Bentuk kegiatan.

   c. Maksud dan tujuan kegiatan.

   d. Tanggal / waktu kegiatan.

e. Tempat kegiatan.

f. Jumlah peserta / undangan.

g. Susunan acara kegiatan.

h. Nama – nama penanggung jawab kegiatan.

i. Nama – nama pembicara.

j. Kesanggupan penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Mei 2005

An. KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KABID YANMIN

Drs. J. A. NARDJI, MBA
KOMBES POL. NRP. 49070279

Tembusan :

1. Dirjen Linmas dan Kesbang Depdagri.
2. Kabaintelkam.
3. Dir C & D Baintelkam.
4. Kapolda Metrojaya Up. Dir Intelkam dan Karo Ops.

DO'A PENUTUPAN MUNAS VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hadirin,
Marilah kita sama-sama berdo'a, memohon kepada Alloh s.w.t. agar pertemuan kita selama tiga hari ini dapat menghasilkan sebesar-besar manfaat bagi masyarakat, sebagai cerminan dari *rohmatal-lil-aalamien*, dan agar perpisahan kita setelah ini nanti selalu dalam rido-Nya serta kita bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dalam keadaan selamat dan bahagia.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Ya Alloh ya Rohman,

Telah banyak Engkau limpahkan kenikmatan kepada kami yang tidak mungkin bisa kami hitung satu-persatu.
Telah Engkau berikan kepada kami kesehatan yang tak ternilai harganya.
Telah Engkau berikan kepada kami sandang pangan dan papan.
Telah Engkau berikan kepada kami ilmu dan pengetahuan.
Telah Engkau berikan kepada kami sumber nafkah yang halal dan cukup terhormat.
Telah Engkau berikan kepada kami pasangan hidup serta anak-anak yang menyenangkan.

Ya Alloh ya Rohim,

Sadarkanlah kami bahwa segala nikmat yang ada pada kami adalah semata-mata anugerah-Mu.
Sadarkanlah kami bahwa bila Engkau menghendaki segala nikmat itu bisa hilang lenyap dalam waktu sekejap.
Maka gerakkanlah hati kami, ya Alloh, agar kami bisa selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami.
Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan takabur.

Sehingga yang kaya tidak sampai sombong dengan kekayaannya.
Sehingga yang merasa pandai tidak sombong dengan kepandaiannya.
Sehingga yang menjabat tidak sampai sombong dengan jabatannya.
Karena sesungguhnya tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali hanya pemberian-Mu, dan segala puji adalah hak-Mu semata.

اَللّٰهُمَّ اٰمِنَّا فِى دُوْرِنَا وَأَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُوْرِنَا وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ وِلَا يَتَنَا فِيْمَنْ خَافَكَ وَاتَّقَاكَ وَاتَّبَعَ رِضَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Ya Alloh,

Limpahkanlah keamanan pada rumah-rumah kami.
Limpahkanlah keamanan pada kampung-kampung kami.
Limpahkanlah keamanan pada kota-kota kami.
Limpahkanlah keamanan pada negeri kami.
Limpahkanlah segala kebaikan dan kekuatan lahir batin kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami.

Jadikanlah penduduk negeri kami ini sebagai orang-orang yang punya rasa takut dan bertaqwa kepada-Mu, dan selalu dapat mengikuti jalan keridoan-Mu, sehingga bangsa kami bisa tetap utuh berdaulat dan bisa berdiri di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini dengan penuh wibawa dan bermartabat.

Ya Alloh ya Wahhaab,

Kami titipkan kepada-Mu anak-anak dan generasi penerus kami,
Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang sholih dan sholihat,
Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang yang kuat imannya kuat pula ilmunya,
Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang sukses dunianya, sukses pula akhiratnya,
Jadikanlah mereka sebagai anak-anak pintar di sekolahnya pintar juga ngajinya,
Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang cakep parasnya cakep juga akhlaknya,
Jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata kami, penawar kegundahan hati kami.
Jadikanlah mereka sebagai salah satu sumber kebahagiaan kami, fiddun-yaa wal-akhiroh.

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Ya Alloh ya Ghoffar,

Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami,
Ampunilah kami bila pernah terbesit keraguan dalam hati kami atas segala kekuasaan-Mu.
Ampunilah kami bila pernah terbesit kekurangridoan dalam hati kami atas segala ketentuan dan taqdir-Mu.
Ampunilah kami bila pernah terbesit kebohongan dalam ucapan dan perkataan kami.
Ampunilah kami bila pernah terbesit hardikan atau bentakan yang pernah kami lontarkan kepada ayah bunda kami.
Engkaulah samudera pengampunan tak bertepi. Tanpa pengampunan-Mu kami akan menjadi kaum yang merugi.

Ya Alloh ya Latief,

Limpahkanlah rohmat dan kasih sayang-Mu kepada kami sehingga :
Yang kuat bisa menolong pada yang lemah dengan kasih sayang dan yang ditolong merasa dikasihsayangi.
Yang pintar bisa mengajari yang bodoh dengan kasih sayang dan yang diajari merasa dikasihsayangi.
Yang ingat bisa mengingatkan pada yang lupa dengan kasih sayang dan yang diingatkan merasa dikasihsayangi.
Yang benar bisa menasihati pada yang salah juga dengan kasih sayang dan yang dinasehati merasa dikasihsayangi.
Engkaulah yang Maha pengasih tak pilih kasih, Yang Maha Penyayang tak pandang sayang.

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

FOTO GALERI
MUSYAWARAH NASIONAL VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA



HR. Agung Laksono, Ketua DPR RI, memukul gong pertanda dimulainya Munas VI LDII



Drs. Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Komisi II DPR RI, menerima cinderamata dari Ketua Umum DPP LDII, Prof. DR. KH. Ir. Abdullah Syam, M.Sc.



Sution Usman Adji, SH, (paling kiri) Kasubdit PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat) mewakili Jaksa Agung menyampaikan materi



Ir. M. Karim Mustari, MSP (ketiga dari kanan) Sekretaris Dirjen Kesbangpol Depdagri, foto bersama Ketua Umum dan Pengurus Harian DPP LDII



HR. Agung Laksono (keempat dari kiri), Ketua DPR RI
foto bersama Dewan Penasihat DPP LDII



Penyerahan bendera panji LDII sebagai tanda bahwa pengurus lama telah demisioner



DR. Ir. H. Andi Jamaro Dulung, M.Sc. Ketua PBNU, menerima cinderamata dari Ketua Umum DPP LDII, Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.



DR. Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH. LLM, (ketiga dari kanan) Ketua Komnas HAM, foto bersama Dewan Penasihat dan Pengurus Harian DPP LDII



Suasana Munas VI LDII tahun 2005 yang hikmat dan meriah



Prof. DR. Komaruddin Hidayat (keempat dari kiri), Guru Besar Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, foto bersama Pengurus Harian DPP LDII



DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME, Komisi I DPR-RI menerima cinderamata dari Sekjen DPP LDII, H.R. Sunaryo Siswowardoyo, SH, MM.



DR. Yudi Latif (tengah), Wakil Rektor Universitas Paramadina foto bersama Pengurus Harian DPP LDII